



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
DELTA KAYAN FOOD ESTATE (DeKaFE)  
DI DESA TANJUNG BUKA  
KABUPATEN BULUNGAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**NURMAWATI**

**NIM. 500025084**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DELTA KAYAN FOOD ESTATE (DeKaFE) DI DESA TANJUNG BUKA KABUPATEN BULUNGAN

Nurmawati  
[nurmawati78@gmail.com](mailto:nurmawati78@gmail.com)  
Universitas Terbuka

Permasalahan utama yang dihadapi setelah adanya Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yaitu pengembangan kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan adalah belum adanya upaya untuk mengkaji bagaimana implementasi program dan kebijakan yang sudah dijalankan sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mencapai tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat tani.

Penelitian ini dilakukan, dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan suatu permasalahan yang ada dengan menguraikan data, menggunakan tabel, diagram maupun peta, dengan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat faktor-faktor yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan dan kekurangan pengembangan Delta Kayan Food Estate dan secara langsung menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan sejauh mana efektifitas kerjasama dan koordinasi peran lintas sektoral terkait program pengembangan food estate ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pengembangan Food Estate di Desa Tanjung Buka sudah dilaksanakan dengan baik oleh SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja (Pokja) guna mewujudkan program nasional yaitu meningkatkan sektor pertanian dalam hal swasembada pangan. Meskipun telah berjalan dengan baik, masih dihadapkan pada beberapa fakta internal yaitu (1) Komunikasi yang berjalan belum efektif sehingga dibutuhkan adanya peningkatan intensitas dan frekwensi komunikasi yang disepakati bersama antara Pokja, PPL dan Gapoktan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat petani di lapangan sehingga dapat memberikan manfaat dan tepat sasaran; (2) Sumber daya yang ada baik di Tingkat Pokja, PPL dan Gapoktan berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan terutama pada sarana dan prasarana pendukung operasional implementator lapangan (PPL dan Gapoktan), perluasan kewenangan implementator, rasio perbandingan luasan wilayah dan implementator lapangan, peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi implementator; (3) Sikap pelaksana yang terjadi pada program food estate bulungan menunjukkan respon yang baik namun masih kurang antusias dalam mendukung terwujudnya food estate di bulungan; (4) Struktur birokrasi yang ada dalam mendukung kegiatan food estate seperti Pokja Food Estate masih berjalan kurang efektif, lebih cenderung kaya struktur namun miskin fungsi sehingga perlu dilakukan modifikasi dan reorientasi struktur birokrasi yang menunjang kegiatan food estate.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)

## THE IMPLEMENTATION OF POLICY ON THE DEVELOPMENT OF DELTA KAYAN FOOD ESTATE (DeKaFE) IN TANJUNG BUKA VILLAGE OF BULUNGAN REGENCY

### Abstract

The main problem that emerged after the existence of Bulungan Regency Regional programme, namely the development of Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) area in Tanjung Buka village of Bulungan Regency, is that there have been no efforts to examine how the implementation of the program and the policies carried out are suitable with the target plans. As a result of this, the main goal can be reached in order to increase the social welfare, especially the farmers.

This research adopts a descriptive method to examine the problems on the basis of the data in the forms of tables, charts and maps. To do this, a descriptive analysis was used to look at the most influential factors that determine the success and failure of the development of Delta Kayan Food Estate and directly determines the level of farmers' social welfare and also how effective the cooperation and coordination across sectors related to the development programme for this food estate was.

The results of this research show that the implementation of policy on the development of DeKaFE in Tanjung Buka village of Bulungan regency has been carried out well by the related *SKPD* with working group (*Pokja*) in order to improve the agricultural sector in terms of food self-sufficiency. Even though it has been going well, it is still hampered by some internal constraints, such as (1) Communication has not been synchronized; it still need improvement in terms of intensity and frequencies agreed among the Working Groups, *PPL* and *Gapoktan* in order to elicit the wishes and needs of the farmer community in order to give the benefits and the precise targets; (2) The Available resources at the level of *Pokja*, *PPL* and *Gapoktan* have been running well but it still needs to be increased, especially both the medium and infrastructure which support the field implementer operational (*PPL* and union), The expansion of the implementer authority, the ratio of area width and field implementer, the increasing of knowledges, information and skills of implementers; (3) The attitude of the implementing happens to bulungan food estate programme, showed a fairly good response, but it is still less enthusiastic in supporting the realization of food estate in Bulungan; (4) The bureaucratic structure which exist in support for food estate activities such as *Pokja* Food Estate is still running less effective. It therefore need modification and reorientation of the bureaucration structures that fully support food estate activities.



Keyword : Policy Implementation, Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul :  
**Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)  
Di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan**  
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan  
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia  
menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar

Samarinda, 04 Desember 2015  
Yang Menyatakan,

  
  
NURMAWATI  
NIM. 500025084

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM : Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan  
Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka  
Kabupaten Bulungan

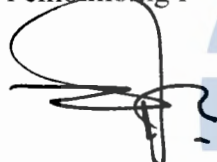
NAMA : Nurmawati

NIM : 500025084

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)

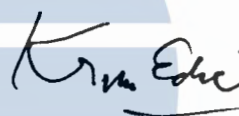
Hari/Tanggal : Jum'at, 04 Desember 2015

Pembimbing I



Dr. Entang Adhy Muhtar, MS  
NIP. 19580504 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Karnedi, M.A  
NIP. 19640508 199903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/  
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed  
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc, Ph.D  
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN


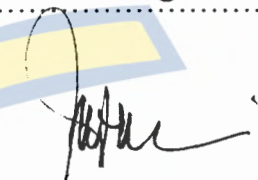

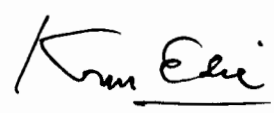
NAMA : Nurmawati  
NIM : 500025084  
PROGRAM STUDI : Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Desember 2015  
Waktu : Pukul 19.00 – 21.00

Dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji :   
Dr. Darmanto, M.Ed .....  
Penguji Ahli :   
Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si .....  
Pembimbing I :   
Dr. Entang Adhy Muhtar, MS .....  
Pembimbing II :   
Dr. Karnedi, M.A .....

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, ucapan puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya, Rahmat serta Karunia-Nya kepada penulis, tak lupa penulis panjatkan Salam serta Sholawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang Rahmatan Lil'alamin, sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) Di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan", dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini, berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing, keluarga, teman-teman yang kuliah di Universitas Terbuka Magister Administrasi Publik. Atas dasar itulah maka dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menghaturkan ucapan dan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana, Dr. Entang Adhy Muhtar, MS selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Karnedi, M.A. selaku Pembimbing Kedua. Keduanya telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta ketulusan, selama penulis mengikuti perkuliahan dan melakukan bimbingan hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan ikhlas penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Drs. Yurizal Rahman, M.KKK selaku Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Entang Adhy Muhtar, MS, selaku Pembimbing Pertama, yang begitu banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
5. Bapak Dr. Karnedi, M.A, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan terkait perbaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
6. Bapak Drs. Syafril, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan yang mendukung penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM), Angkatan Tahun 2015;
7. Bapak Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang telah memberikan dukungan dan informasi terkait Tugas Akhir penulis;
8. PPL SP.1, PPL SP.2, PPL SP.7, PPL SP.8, Ketua Gapoktan SP.1, Ketua Gapoktan SP.2, Ketua Gapoktan SP.7 dan Ketua Gapoktan SP.2 yang telah memberikan informasi terkait Tugas Akhir Penulis;
9. Bapak Azanasri, S.TP, M.P, selaku teman atau sahabat yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir;



10. Ayahanda Buhari Palangi dan Ibunda Mariamah Tandilo, sembah sujud ananda kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan Dukungan dan Do'a serta motivasi untuk belajar dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
11. Gunawan,SE, selaku suami saya yang telah memberikan dukungan dan Do'a dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana;
12. Rekan-rekan mahasiswa, Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2015, (Hj.Andriana, SH, Hj. Namlah, dan H.Hamlis) yang selalu saling berkomunikasi dan saling memberi motivasi, sehingga keakraban tercipta seperti saudara dan satu keluarga, semoga peningkatan SDM yang telah kita tempuh sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan dan kemakmuran di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
13. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang banyak membantu penulis baik materil maupun pikiran sehingga Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan.  
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran-saran yang sifatnya konstruktif dan membangun sangat diharapkan guna untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga segala bantuan, perhatian, nasehat, motivasi, kesempatan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.... Amiin Ya Robbal 'Alamin.....

Demikian penulisan Tugas Akhir Program Pascasarjana ini, diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Samarinda, 04 Desember 2015

Nurmawati



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Abstrak .....	i
Abstract .....	ii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiaris.....	iii
Lembar Persetujuan .....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Bagan.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik .....	8
2. Pengertian Implementasi.....	11
3. Implementasi Kebijakan .....	13
4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan .....	20
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	22
a. Sumber Daya (Resource) .....	22
b. Struktur Birokrasi.....	23
c. Komunikasi .....	23
d. Disposisi.....	24
6. Kebijakan Strategis Pengembangan Usaha Tani Nasional .....	24

7. Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan dan Tujuan DeKaFE .....	28
B. Delta Kayan Food Estate (DeKaFE).....	30
1. Pengertian dan Konsep Dasar Food Estate .....	30
2. Tujuan Pengembangan Delta Kayan Food Estate.....	31
3. Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Food Estate .....	32
C. Penelitian Terdahulu .....	36
D. Kerangka Pikir.....	44
E. Operasional Variabel Penelitian .....	53
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Disain Penelitian.....	55
B. Sumber Informasi dan Teknik Pemilihan Informan.....	57
C. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian .....	57
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	58
E. Metode Analisis Data.....	65
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	68
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan.....	68
2. Gambaran Umum Desa Tanjung Buka.....	75
3. Aspek Pertanian.....	80
4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	82
5. Aspek Pelayanan Umum .....	83
6. Aspek Daya Saing Daerah.....	84
7. Luas dan Legalitas Kepastian Kawasan Food Estate Delta Kayan ..	84
8. Pola Kelembagaan Kemitraan Agribisnis Delta Kayan Food Estate	85
9. Upaya Modernisasi Pertanian dalam Pengembangan Food Estate .	87
10. Kawasan Food Estate sebagai Penopang Ketahanan Pangan.....	88
11. Reorientasi Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate .....	92
B. Hasil Penelitian .....	93
1. Implementasi Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)	93
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi .	
Pengembangan Delta Kayan Food Estate.....	99
3. Model strategi Pengembangan Delta Kayan Food Estate di Desa....	
Tanjung Buka Kabupaten Bulungan.....	112

C. Pembahasan .....	117
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>126</b>
1. Kesimpulan .....	126
2. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN I Riwayat Hidup .....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN II Kondisi Realisasi Empirik di Lapangan .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN III Panduan Wawancara.....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN IV Dokumentasi Wawancara.....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN V Dokumentasi Desa Tanjung Buka.....</b>	<b>157</b>



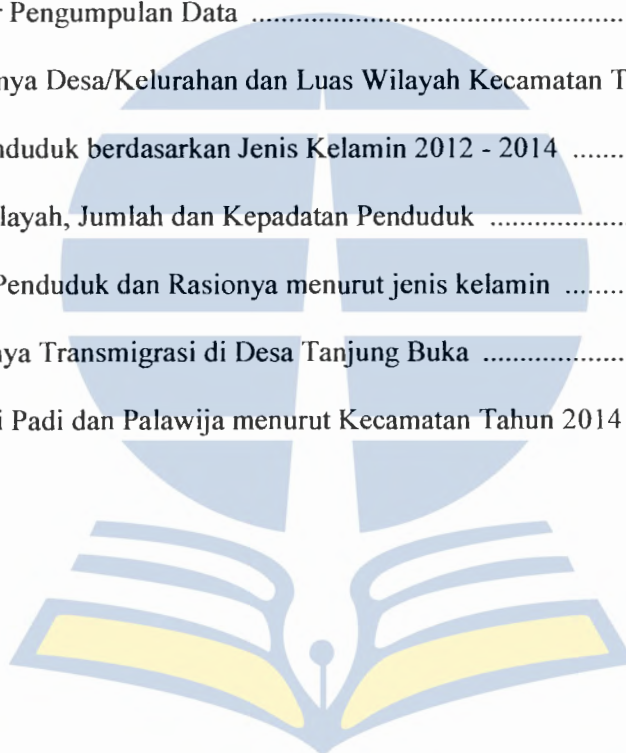
**DAFTAR BAGAN**

<b>Nomor Bagan .....</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Fikir Penelitian.....	51
3.1 Disain Penelitian.....	56



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel .....	Halaman
2.1. Review Tesis Hasil Penelitian Nuryatin, dkk .....	36
2.2. Review Tesis Hasil Penelitian Edi Darmawi .....	41
2.3. Definisi Operasional Penelitian .....	53
3.1. Prosedur Pengumpulan Data .....	65
4. 1. Banyaknya Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Tahun 2014 ..	69
4.2. Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 2012 - 2014 .....	74
4.3. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	78
4.4. Jumlah Penduduk dan Rasionya menurut jenis kelamin .....	78
4.5. Banyaknya Transmigrasi di Desa Tanjung Buka .....	79
4.6. Produksi Padi dan Palawija menurut Kecamatan Tahun 2014.....	81



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar .....	Halaman
3.1. Peta Lokasi Food Estate di Desa Tanjung Buka.....	58
4.1. Peta Wilayah Kabupaten Bulungan .....	68
4.2. Presentase Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan, 2014 .....	73
4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Bulungan 2009 - 2014 .....	74
4.4. Peta Lokasi Kawasan Food Estate di SP.1 – SP.8 .....	75
4.5. Perkembangan Produksi Padi Tahun 2011 - 2014 .....	80
4.6. Model Strategi Implementasi Pengembangan Food Estate, 2015 .....	116





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. UU No.7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat (Partowijoto, 2003).

Sebagai negara agraris, pembangunan di bidang pertanian menjadi prioritas utama, luas pertanaman padi yang ada di Indonesia diketahui sebesar 14 juta ha dengan perkiraan hasil rata-rata 7 ton gabah kering/ha (Sensus pertanian, 2013). Dan diperkirakan bahwa dalam waktu 25 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan berat untuk keluar dari krisis pangan akibat berkurangnya areal lahan pertanian produktif dan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan beberapa proyeksi yang telah dilakukan, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 400 juta jiwa dengan kebutuhan beras mencapai 54 juta ton, atau sekitar 100 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) per tahun. Dengan kondisi yang demikian, pada tahun 2025 Indonesia membutuhkan areal baku sawah seluas 15 juta ha (Masterplan DeKaFE, 2011). Usaha pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, pada dasarnya dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain ekstensifikasi, intensifikasi

dan diverdifikasi, namun upaya tersebut memerlukan waktu yang panjang. Menurut Saptana, dkk (2001), dalam jangka pendek pilihan yang layak untuk meningkatkan produktivitas usaha tani adalah melalui pengembangan sebuah kawasan pengembangan pertanian khususnya tanaman padi dengan memadukan pola intensifikasi dengan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan ekstensifikasi dengan pencetakan sawah baru serta beberapa regulasi dan kebijakan yang mendukung sektor pertanian dengan ditunjang oleh sistem modernisasi dan industri pertanian dalam satu kawasan pengembangan atau lebih dikenal dengan istilah pengembangan kawasan food estate.

Pengembangan Kawasan food estate di Kabupaten Bulungan atau yang lebih dikenal dengan "*Delta Kayan*" Food Estate (DeKaFE) merupakan salah satu opsi dalam mengatasi masalah pangan tersebut. Program ini merupakan moda produksi terobosan yang dicoba untuk diperkenalkan dan diimplementasikan untuk mengejar pemenuhan kebutuhan pangan provinsi dan sekaligus kebutuhan nasional yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan produktivitas dan intensitas tanam dan memperluas basis produksi melalui pembukaan lahan baru merupakan solusi yang ditawarkan program DeKaFE. Konsep DeKaFE ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan dari konsep pola tanam konvensional yang bersifat jangka pendek, terbatas dan tidak mampu mengakomodir perkembangan teknologi pangan mutakhir karena penguasaan lahan petani sempit dan miskin, sehingga solusi ini tidak mampu memecahkan

secara permanen permasalahan pangan ke depan. Oleh karena itu, perluasan basis produksi melalui pembukaan lahan baru berbasis konsep DeKaFE ini merupakan solusi yang tepat dan sangat sesuai dengan pemecahan permasalahan pangan ke depan karena merupakan konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan mengakomodasi pemanfaatan teknologi mutakhir, sehingga intensitas tanam dan produktivitas dapat ditingkatkan dan dapat dikatakan bahwa Delta Kayan Food Estate merupakan sebuah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan yang berada disuatu kawasan lahan yang terintegrasi dan saling mendukung.

Hasil kajian yang telah dilakukan terhadap lokasi Delta Kayan menunjukkan tingginya potensi secara fisik dan ekosistem pendukungnya. Kandungan mineral yang ada dalam tanah di wilayah ini sangat baik sebagai penyedia unsur hara bagi padi, terlebih suplai air yang sangat baik sepanjang tahun mampu memenuhi kebutuhan tanam untuk indeks pertanaman (IP) 300 atau panen 3 kali dalam setahun. Infrastruktur pendukung berupa transportasi darat dan air juga menjamin arus masuk input dan arus distribusi produk keluar daerah, sehingga hasil dari pengembangan food estate diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan menunjang ketahanan pangan nasional (Masterplan DeKaFE, 2011).

Pengembangan Food Estate saat ini dipandang sebagai salah satu terobosan dalam upaya menciptakan ketahanan pangan jangka panjang sehingga diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak dan

mendukung upaya pengembangannya baik di tingkat pusat dan daerah. Untuk itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman sebagai payung hukum bagi kegiatan investasi di bidang budi daya tanaman pangan khususnya berkaitan dengan kegiatan Food Estate dan diperkuat dengan SK Bupati Bulungan Nomor : 490/K-VI/520/2011 perihal penetapan kawasan pencadangan areal Food Estate seluas 50.000 Ha yang meliputi kawasan Delta Kayan seluas 30.000 Ha, Desa Tanjung Buka lokasi Transmigrasi yaitu SP.1 – SP.8 seluas 10.000 Ha, selebihnya di kawasan rice estate dan peluncuran program ini telah dimulai sejak tahun 2011 dan dilakukan secara bertahap.

Kegiatan Pengembangan DeKaFE merupakan salah satu program nasional yang bersifat kegiatan sinergis lintas sektoral yang melibatkan sektor BUMN dan swasta selaku investor serta berbasis partisipasi masyarakat terutama berorientasi pada keluarga petani. Lintas Sektoral ini terdiri dari semua SKPD yang terkait dengan program-program pengembangan ekonomi dan SDM yang juga di dukung oleh pihak seluruh kecamatan. Masing-masing sektor bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program DeKaFE ini harus didukung oleh faktor ketersediaan lahan dan infrastruktur kawasan dengan model perluasan areal persawahan yang digarap secara sistematis dan terintegrasi. Permasalahan utama yang dihadapi setelah adanya program pengembangan kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan

yakni belum adanya upaya untuk mengkaji bagaimana implementasi program dan kebijakan yang sudah dijalankan sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mencapai tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat tani. Permasalahan utama ini di latar belakang oleh adanya kecenderungan komunikasi yang belum efektif antara SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja (Pokja), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Sumber daya yang terbatas, Sikap Pelaksana kurang antusias dalam mendukung pelaksanaan program dan Struktur Birokrasi yang ada belum efektif dalam menunjang kegiatan food estate. Berdasarkan kondisi tersebut maka dirasa perlu untuk melakukan sebuah kajian tentang **"Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan"**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab *research question* yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi pengembangan Delta Kayan Food Estate di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan ?.
2. Faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan implementasi pengembangan food estate di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan?

3. Bagaimanakah model strategi kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka secara umum Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Menganalisis implementasi pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) bagi masyarakat petani di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan;
3. Mengetahui Model strategi kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dengan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE), dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu utamanya yang berkaitan dengan program studi administrasi publik;

2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi, pengetahuan dan informasi pada stakeholder dan masyarakat pelaksana tentang pentingnya peranan pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pola kemitraan yang partisipatif, berwawasan lingkungan dan diharapkan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Abstrak .....	i
Abstract .....	ii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Bagan.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori .....	8
1. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik .....	8
2. Pengertian Implementasi.....	11
3. Implementasi Kebijakan .....	13
4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan .....	20
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	22
a. Sumber Daya (Resource) .....	22
b. Struktur Birokrasi.....	23
c. Komunikasi .....	23
d. Disposisi.....	24
6. Kebijakan Strategis Pengembangan Usaha Tani Nasional .....	24



7. Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan dan Tujuan DeKaFE .....	28
B. Delta Kayan Food Estate (DeKaFE).....	30
1. Pengertian dan Konsep Dasar Food Estate .....	30
2. Tujuan Pengembangan Delta Kayan Food Estate .....	31
3. Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Food Estate .....	32
C. Penelitian Terdahulu .....	36
D. Kerangka Pikir .....	44
E. Operasional Variabel Penelitian .....	53
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....	55
A. Disain Penelitian .....	55
B. Sumber Informasi dan Teknik Pemilihan Informan.....	57
C. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian .....	57
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	58
E. Metode Analisis Data.....	65
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	68
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	68
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan.....	68
2. Gambaran Umum Desa Tanjung Buka.....	75
3. Aspek Pertanian.....	80
4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	82
5. Aspek Pelayanan Umum .....	83
6. Aspek Daya Saing Daerah.....	84
7. Luas dan Legalitas Kepastian Kawasan Food Estate Delta Kayan ..	84
8. Pola Kelembagaan Kemitraan Agribisnis Delta Kayan Food Estate	85
9. Upaya Modernisasi Pertanian dalam Pengembangan Food Estate.	87
10. Kawasan Food Estate sebagai Penopang Ketahanan Pangan .....	88
11. Reorientasi Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate .....	92
B. Hasil Penelitian .....	93
1. Implementasi Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)	93
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi.	
Pengembangan Delta Kayan Food Estate.....	99
3. Model strategi Pengembangan Delta Kayan Food Estate di Desa....	
Tanjung Buka Kabupaten Bulungan.....	112

C. Pembahasan .....	117
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	126
1. Kesimpulan .....	126
2. Saran .....	129
DAFTAR PUSTAKA .....	132
LAMPIRAN I Riwayat Hidup .....	135
LAMPIRAN II Kondisi Realisasi Empirik di Lapangan .....	137
LAMPIRAN III Panduan Wawancara .....	140
LAMPIRAN IV Dokumentasi Wawancara .....	150
LAMPIRAN V Dokumentasi Desa Tanjun Buka .....	157



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau lebih sering dikenal dan disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf (1980), seperti yang dikutip oleh Sjahrir (1988 : 66), pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Anderson (1999 : 33) memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Thomas R. Dye sebagaimana dikutip oleh Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). David Easton(1957) sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab

dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Anderson (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno (2008:20-21) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian “tindakan” (nyata/bukan suatu kehendak) yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## 2. Pengertian Implementasi

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "to implementasi" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program/kebijakan. Menurut Patton dan Sawicki seperti yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik, bahwa:

"Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program,

serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan". (Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas tahapan dari implementasi setelah menjadi sebuah kebijakan adalah bagaimana cara melaksanakan suatu kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan dalam pengawasannya lembaga tinggi negara akan mengatur cara pelaksanaan dari kebijakan tersebut yang bertujuan agar kebijakan tersebut efektif dan efisien.

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991) dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones

menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*" Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

### 3. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya



pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut George C. Edward III (1980) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu:

1. Communication
2. Resources
3. Dispositions
4. Bureacratic Structure

(Edward III, 1980:10).

Model implementasi menurut Edward III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu Communication, Resources, Dispositions dan Bureacratic Structure. Masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi terhadap implementasi. keterkaitan antara keempat struktur dapat menjadikan keselarasan fungsi dari masing-masing struktur. Yang akan mengakibatkan keberlangsungan implementasi suatu kebijakan.

Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno dalam buku Teori dan Proses Kebijakan Publik, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002)

Menurut Wahab (2008:64-65), yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya tentang implementasi diantaranya adalah Masmanian dan Sebatier, yang mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan Meter dan Horn (1978:70) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, terdapat dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2008).

Pada tahap implementasi dibahas tentang siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang dikerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan tersebut. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku

kelompok sasaran. Untuk implementasi sederhana hanya melibatkan satu implementor, sedangkan kebijakan yang bersifat makro melibatkan lebih banyak implementor (Subarsono, 2011).

Menurut Abdul-Wahab (2012) “Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)”. Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Selanjutnya menurut pendapat Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Abdul-Wahab (2012) dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya Menurut Edwards III (1980) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Menurut Smith dalam Islamy (1997), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. *Idealized policy*, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong,

- mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya;
2. *Target group*, yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan;
  3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan;
  4. *Environmental factors*, unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan agar tujuan yang dikehendaki tercapai maka perlu memahami teori yang mendasari kebijakan publik agar kebijakan itu tepat. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak akan lepas dari kesuksesan sebuah lembaga-lembaga atau badan-badan dalam menyelenggarakan suatu kebijakan. Tidak hanya lembaga atau badan, peran serta masyarakat akan menjadisangat penting karena targetnya adalah masyarakat. Menurut Budi Winarno, implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: "Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan". (Winarno 2002).

Pengertian diatas mengandung makna bahwa untuk mensukseskan suatu kebijakan dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat selaku objek dari kebijakan itu. Sedangkan untuk syarat-syarat mengimplementasikan suatu kebijakan disuatu daerah maka diperlukannya teori tambahan yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
  - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
  - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
- (Hogwood dan Lewis dalam Wahab 2005).

Penjelasan pengertian diatas adalah suatu kebijakan yang akan diterapkan disuatu daerah harus memperhatikan unsur eksternal seperti badan pelaksanaannya dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi. Ketersediaan sumber daya yang mempuni dan keselarasan hubungan sumber daya yang adapun menjadi factor keberhasilan kebijakan tersebut. Kejelasan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dari badan pelaksana serta komunikasi yang baik antara badan pelaksana dan masyarakat dapat mensukseskan suatu kebijakan.

Menurut James Anderson dalam Sugiono pada buku Hukum dan Kebijakan Publik, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

(Suggiono, 1994)

#### 4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (1997, 102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain;
2. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin Abdul Wahab, 1991:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan : (a). Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;

(b).Menentukan standar pelaksanaan; (c). Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan;

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan : Menentukan jadwal, Melakukan pemantauan, Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara.



## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (1980:111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

### a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup: Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, Perintah, Anjuran atasan/pimpinan disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak

akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

**b. Struktur Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka memiliki keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

**c. Faktor Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan

atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie, 1982). Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

**d. Faktor Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

**6. Kebijakan Strategis Pengembangan Usaha Tani Nasional**

Konsep kebijakan menurut Dye (1978) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Anderson (1984) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Dari dua pendapat ini, dapat ditegaskan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh sejumlah pelaku dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah.

Konsep Manajemen menurut Stoner dalam Siswanto (2001:2) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Kontribusi manajemen ilmiah sangat besar artinya bagi perkembangan suatu organisasi. Hal ini ditunjukkan bahwa metode manajemen ilmiah dapat diaplikasikan pada berbagai aktivitas organisasi maupun pengembangan usaha seperti pengembangan usaha tani yang dikelola oleh rakyat dan dibina oleh pemerintah.

Manajemen usaha pertanian rakyat yang merupakan usaha tani adalah istilah lawan dari perkataan “farm” dalam bahasa Inggris. Mosher, dalam Mubyarto (1995) mengemukakan “farm” (yang diterjemahkan oleh Krisnandi menjadi usaha tani) adalah merupakan suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi dimana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani baik sebagai petani pemilik, penyakap atau manajer yang digaji. Dalam hal ini, usaha tani merupakan himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat ditempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tumbuhan, tanah dan air, dimana usaha tani yang dimaksudkan dalam penelitian adalah meliputi kegiatan usaha bercocok tanam dan memelihara ternak.

Pengembangan manajemen usaha tani ini adalah merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan produk pertanian dan peternakan.

Keberhasilan kebijakan dan manajemen pengembangan usaha tani ini tergantung pada tiga unsur yaitu bibit (*breeding*), pakan (*feeding*) dan pengelolaan (*management*). Pada usaha tani yang bersifat tradisional yang pemeliharaannya secara tradisional belum memperhatikan ketiga unsur tersebut. Unsur pengelolaan (*management*) yang mencakup pengelolaan *breeding*, *feeding*, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, perkandangan maupun masalah kesehatan ternak belum dilaksanakan secara baik.

Usaha tani tanaman pangan (padi) memiliki peranan multifungsi yang besar dan keberhasilan pengembangannya akan memberikan pengaruh nyata terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil analisis kinerja kebijakan sebelumnya, pilihan kebijakan usaha tani tanaman pangan (padi) ke depan yang mempunyai prospek bagus adalah peningkatan penawaran, pasokan input dan sistem pascapanen, pengembangan iptek, dan subsidi benih disusul kebijakan penerapan harga dasar dan subsidi kredit usaha tani. Program intensifikasi dan pemberian subsidi pupuk memberikan respons yang relatif rendah, sementara penerapan teknologi pascapanen akan memberikan respons yang cepat dan signifikan. Dalam perumusan reorientasi arah dan penyesuaian kebijakan, sedikitnya perlu dipertimbangkan dua aspek, yaitu konteks kebijakan serta tantangan dan hambatan internal pembangunan agribisnis padi (Simatupang dan Rusastra 2004).

Konteks kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah: (1) krisis ekonomi, (2) kemiskinan dan kerawanan pangan, (3) keterbatasan kebijakan fiskal dan moneter, (4) liberalisasi perdagangan, (5) integrasi pasar, (6) ketimpangan distribusi pembangunan dan marginalisasi pasar, (7) pelaksanaan desentralisasi pembangunan, dan (8) perubahan pola iklim El Nino dan La Nina.

Beberapa tantangan dan hambatan internal yang perlu dipertimbangkan adalah: (1) kecenderungan penurunan daya saing yang ditunjukkan oleh penurunan total faktor produksi dan profitabilitas usaha tani padi; (2) marginalisasi kemampuan usaha tani akibat perpaduan dari marginalisasi luas pemilikan lahan, Penurunan laju pertumbuhan produktivitas, dan penurunan profitabilitas; (3) penurunan laju pertumbuhan produksi akibat perlambatan laju pertumbuhan luas panen dan produktivitas usaha tani padi; (4) peningkatan variabilitas produksi sebagai akibat makin rentannya usaha tani padi terhadap perubahan iklim dengan tingkat ancaman yang makin meningkat dan tidak menentu. Berdasarkan konteks kebijakan dan tantangan serta hambatan internal tersebut, reorientasi tujuan kebijakan pengembangan agribisnis (padi) hendaknya diarahkan untuk: (1) meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan petani; (2) memantapkan ketahanan pangan nasional; (3) mendinamisasi perekonomian desa. Reorientasi tujuan ini berbeda dengan paradigma lama yang hanya difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan nasional, tetapi kurang memperhatikan ketahanan pangan, rumah

tangga dan pendapatan keluarga tani. Dewasa ini kebijakan dan manajemen pengembangan usaha tani bukan terbatas pada usaha bercocok tanam dengan satu jenis tanaman saja misalnya padi, jagung atau palawija. Akan tetapi pola pengembangan usaha tani yang dilaksanakan adalah usaha tani yang terintegrasi dengan pengembangan komoditi lainnya.

#### **7. Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan dan Tujuan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)**

Landasan pengembangan delta kayan food estate meliputi beberapa kebijakan strategis yang menopang ketahanan pangan lokal dan Nasional diantaranya adalah Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Menurut Arifin (2005) ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Apabila melihat penjelasan PP No. 68 Tahun 2002

tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Penyediaan pangan yang dapat diakses oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau sangat penting bagi terciptanya ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Dalam upaya menerapkan kebijakan ketahanan pangan, Dewan Ketahanan Pangan pada tahun 2009 mengajukan draft konsep kebijakan umum ketahanan pangan 2009 – 2014 antara lain sebagai berikut :

- a) Menjamin Ketersediaan Pangan;
- b) Menjamin cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat;
- c) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang adil dan efisien;
- d) Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap pangan;
- e) Menjaga Stabilitas harga pangan;
- f) Mencegah dan menangani keadaan Rawan Pangan dan Gizi;
- g) Melakukan Diversifikasi Pangan;
- h) Meningkatkan keamanan dan mutu pangan;
- i) Meningkatkan peran serta masyarakat;
- j) Mengembangkan sumber daya manusia;



## **B. Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)**

### **1. Pengertian dan Konsep Dasar Food Estate**

*Farmer food estate* (FFE) merupakan salah satu opsi dalam mengatasi masalah pangan. Program ini merupakan moda produksi terobosan yang dicoba untuk diperkenalkan dan diimplementasikan untuk mengejar pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan produktivitas dan intensitas tanam dan memperluas basis produksi melalui pembukaan lahan baru merupakan solusi yang ditawarkan program FFE.

Konsep FFE ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan dari konsep pola tanam konvensional yang bersifat jangka pendek, terbatas dan tidak mampu mengakomodir perkembangan teknologi pangan mutakhir karena penguasaan lahan petani sempit dan miskin, sehingga solusi ini tidak mampu memecahkan secara permanen permasalahan pangan ke depan. Oleh karena itu, perluasan basis produksi melalui pembukaan lahan baru berbasis konsep FFE ini merupakan solusi yang tepat dan sangat sesuai dengan pemecahan permasalahan pangan ke depan karena merupakan konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan mengakomodasi pemanfaatan teknologi yang termutakhir, sehingga intensitas tanam dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Keberhasilan dari program FFE ini tidak terlepas dari faktor ketersediaan lahan dan infrastruktur kawasan. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah, maka perluasan areal baku sawah dapat dilakukan oleh swasta dengan dukungan pemerintah. Model perluasan areal persawahan yang digarap secara sistematis dan terintegrasi ini menjadi suatu kebutuhan mendasar dalam pembangunan sektor pertanian utamanya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bulungan kedepannya. Selain sebagai suatu konsep yang prospektif bagi peningkatan produksi pangan, FFE lebih jauh juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi upaya meningkatkan kesejahteraan stakeholders yang terlibat dalam kegiatan, serta peningkatan derajat kehidupan para petani pada khususnya terutama di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan.

## **2. Tujuan Pengembangan Delta Kayan Food Estate**

Tujuan pengembangan Delta Kayan Food Estate di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kawasan food estate sebagai pusat kegiatan perekonomian tumbuh cepat di bagian utara provinsi Kalimantan Utara;
- b) Mengembangkan sektor-sektor andalan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi;
- c) Menggerakkan dinamika pertumbuhan antar pengembangan melalui pusat-pusat kegiatan (urban center) yang dapat memacu

- perkembangan pusat-pusat permukiman/desa yang berada dalam wilayah pengaruhnya;
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas sumber daya penduduk terutama di wilayah terpencil yang masih sangat rendah;
  - e) Memantapkan perwujudan tata ruang wilayah berwawasan lingkungan.

### **3. Kebijakan dan Regulasi Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan.**

Pengembangan DeKaFE Kabupaten Bulungan di dukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman sebagai payung hukum bagi kegiatan investasi di bidang budidaya tanaman khususnya berkaitan dengan kegiatan food estate. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan di implementasikan di pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab pada pemerintahan kabupaten bulungan untuk menggali dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah tersebut, terutama untuk dapat mengantisipasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi akibat kecepatan dinamika perubahan pembangunan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman

dimana didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Usaha budidaya tanaman diselenggarakan untuk :

1. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
2. Menyediakan kebutuhan dan bahan baku sendiri;
3. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani;
4. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
5. Meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen dengan memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup;
6. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha budidaya tanaman;

Usaha budidaya tanaman merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mencapai usaha pertanian yang bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan. Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang maha esa kepada bangsa indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, upaya pembangunan pertanian dilakukan dengan pemanfaatan

lahan dan pemilihan jenis tanaman yang tepat, menerapkan teknologi proses serta alat dan mesin pertanian yang modern, menggunakan modal yang efisien dan menerapkan manajemen yang profesional. Pembangunan pertanian tersebut harus dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya serta berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman didasarkan pada semangat untuk menciptakan kepastian berusaha di bidang budidaya tanaman sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah ini mengatur budidaya tanaman, perizinan usaha budidaya tanaman, dan pembinaan serta peran masyarakat. Usaha budidaya tanaman terdiri atas proses produksi yang meliputi pembukaan lahan sampai dengan pemanenan, sedangkan pasca panen meliputi pembersihan sampai dengan siap untuk dipasarkan termasuk di dalamnya pengolahan, yang pelaksanaannya diarahkan melalui kerja sama usaha sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha budidaya tanaman dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya. Didalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 pasal 3 juga menerangkan bahwa usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di wilayah pengembangan budidaya tanaman diseluruh wilayah Indonesia. Selain di wilayah pengembangan, usaha budidaya tanaman juga dapat dilakukan ditempat lain yang merupakan cadangan lahan untuk budidaya tanaman

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Ketentuan mengenai wilayah pengembangan budidaya tanaman yang terdapat dalam rencana detail tata ruang. Selanjutnya pada pasal 6 budidaya tanaman meliputi Jenis dan Skala Usaha, Luas Maksimum Lahan Usaha dan Perubahan jenis tanaman, Pola usaha dan pemanfaatan jasa dan sarana milik negara yang diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis usaha budidaya tanaman terdiri atas usaha dalam proses produksi, usaha dalam penanganan pasca panen;
2. Skala usaha budidaya tanaman didasarkan pada luas lahan dan/atau tenaga kerja;
3. Lahan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dengan 25 Ha atau lebih wajib mendapat izin;
4. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib mendapat izin.

Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi lahan. Luas maksimum lahan untuk perusahaan budidaya tanaman yaitu 10.000 Ha. Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk bekerja sama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman. Kerjasama didasarkan prinsip berkedudukan yang sama, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang dibuat dalam

bentuk perjanjian secara tertulis dan diketahui oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. Perjanjian paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Kerjasama usaha yang dilakukan untuk peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha, karyawan dan masyarakat. Kerjasama usaha ada 2 (Dua) yaitu kerjasama yang dilakukan pada usaha proses produksi berupa penyediaan sarana produksi dan kerjasama usaha pada pasca panen berupa pengolahan, pemasaran, transportasi dan kerjasama operasional lainnya.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan berkaitan dengan topik penelitian yaitu mengenai Implementasi Kebijakan, yaitu :

Tabel 2.1 : Review Tesis Hasil Penelitian Nuryatin Phasky Sukowati, Minto Hadi, Stefanus Pani Rengus

No	Penelitian	Uraian
1.	Sumber Referensi	Jurnal Administrasi Publik (JAP)
2.	Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya, Malang
3.	Program Studi	Administrasi Publik
4.	Tahun Terbit	2013
5.	Judul	Implementasi Kebijakan Pelayanan

		Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM)
6.	Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	<p>1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin nonkuota (Jamkesda dan SPM) Kabupaten Blitar</p> <p>2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program</p>
7.	Metode Penelitian	Metode Penelitian Kualitatif
8.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	<p>1. Perbup Blitar No. 28 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk implementasi dengan pendekatan top down.</p> <p>2. Faktor Pendukung dan Penghambat :</p> <p>a. Komunikasi, Pelaksanaan komunikasi kepada masyarakat melalui media visual maupun audiovisual telah tersalurkan dengan baik dan menurut masyarakat sendiri telah cukup</p>



		<p>jelas dan dipahami. Hambatannya masih adanya beberapa warga yang buta aksara. Menurut data dan wawancara, tingkat kemelekan huruf di kab. Blitar memang masih tinggi;</p> <p>b. Sumber Daya, SDM (Staf) hanyalah pegawai pada PSDK dan Tenaga Honorer, masih dibutuhkan lagi beberapa personil. Terkait fasilitas fisik kesehatan, belum cukup memadai dan masih membutuhkan pembaruan atau penambahan perlengkapan medis;</p> <p>c. Disposisi, kondisi sikap dari pelaksana kebijakan masih memuaskan bagi masyarakat miskin pasien jamkesda dan SPM. Selanjutnya tidak ada bentuk insentif khusus yang diberikan kepada actor pelaksana kebijakan;</p> <p>d. Struktur Birokrasi, Faktor</p>
--	--	--

		<p>Pendukung : (1) Tingginya jumlah kepesertaan masyarakat miskin nonkuota yang membutuhkan SPM (2) Aturan dan prosedur pelayanan yang jelas. Faktor Penghambat : (1) Keterbatasan anggaran daerah untuk pembiayaan jamkesda (2) Keterbatasan Fasilitas dan sumber daya kesehatan</p>
9.	Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mempertahankan Penyelenggaraan Jamkesda dan SPM;</li> <li>2. Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda tahun 2013 secepatnya ditetapkan, agar pasien yang berobat tidak perlu bersusah payah mengurus administrasi;</li> <li>3. Dinas Kesehatan seharusnya menambah jumlah tenaga medis seperti dokter, perawat dan bidan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasien;</li> </ol>

		<p>4. Dinas Kesehatan mengatur kembali anggaran pembiayaan atau APBD yang digunakan untuk membiayai program jaminan kesehatan;</p> <p>5. Dinas Kesehatan sebaiknya membenahi manajemen dan memutakhirkan kelengkapan fasilitas medis yang dimiliki RSUD Ngudi Waluyo Wlingi seperti hemodialisa atau cuci darah, agar pasien tidak perlu mendapat rujukan ke RS provinsi yang lebih jauh jaraknya.</p>
10.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti	<p>1. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mencoba menganalisis implementasi pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan;</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pengembangan delta kayan food estate di desa tanjung buka;</p> <p>3. Menganalisis model strategi kebijakan</p>

		pengembangan delta kayan food estate di desa tanjung buka.
--	--	--

Tabel 2.2 :Review Tesis Hasil Penelitian Edi Darmawi, S.Sos, M.Si

No	Penelitian	Uraian
1.	Sumber Referensi	Jurnal Mimbar
2.	Perguruan Tinggi	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
4.	Tahun Terbit	2013
5.	Judul	Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Bengkulu Utara
6.	Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di kabupaten Bengkulu utara
7.	Metode Penelitian	Metode Penelitian deskriptif Kualitatif
8.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Tingkat keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara masih terhambat, hal ini dikarenakan antara lain :  1. Belum terjalannya komunikasi yang

		<p>efektif antara pembuat kebijakan (bupati) dengan pelaksana dilapangan (pejabat atau staf instansi terkait) dan pengelola industri kecil dan menengah;</p> <p>2. Rendahnya kualitas pejabat dan staf Badan Perencanaan Daerah;</p> <p>3. Dinas Perindustrian, perdagangan dan pasar menghambat evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan industri dan menengah dalam memberikan pelayanan public.</p> <p>4. Kurang tersedianya sarana kerja yaitu internet dan komputer untuk memberikan pelayanan secara online dan memberikan informasi kepada masyarakat luas secara cepat dan tepat;</p> <p>5. Sikap pejabat terkait cenderung mempertimbangkan kepentingan politik daripada kemampuan dan profesionalitas;</p>
--	--	--

		<p>6. Perubahan struktur birokrasi dan perubahan tugas pokok dan fungsi instansi menjadikan unit kerja kurang focus dalam menjalankan kewenangannya.</p>
9.	Rekomendasi	<p>1. Para pejabat memberikan perintah secara tertulis dan serinci mungkin, dengan menggunakan komunikasi personal yang tepat, dan menunjukkan kesungguhan dalam memberikan perintah yang akurat bagi para pelaksananya;</p> <p>2. Bappeda dan Dinas Perindustrian, perdagangan dan pasar, dituntut untuk menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal;</p> <p>3. Kesamaan pandangan dan sikap oleh instansi terkait sangat diperlukan dalam keberhasilan usaha untuk mencapai tujuan pengembangan industri kecil dan menengah;</p> <p>4. Organisasi di tata untuk melaksanakan</p>

		Tufoksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan sebagai instansi yang memberikan pelayanan public dalam menjalankan kebijakan pengembangan industry kecil dan menengah.
10.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti	Penelitian ini lebih mengarah kepada keberhasilan program pengembangan industri kecil dan menengah, berbeda jauh dengan apa yang akan peneliti lakukan yaitu terkait implementasi program pengembangan delta kayan food estate di desa tanjung buka kabupaten bulungan.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir yang dijabarkan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat para pakar kebijakan publik, dapat dipahami bahwa proses keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat berkaitan dengan berbagai hal dimana yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Untuk itu, pemahaman secara mendalam tentang berbagai hal tersebut sangat

menentukan tingkat keberhasilan dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### **1. Faktor-faktor Penentu keberhasilan dalam Implementasi kebijakan dalam pengembangan usaha tani**

Keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam hal ini para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam sebuah kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dalam kebijakan pengembangan usaha tani di Kabupaten Bulungan yaitu :

- a. Komunikasi yaitu kemampuan aparat pelaksana untuk memahami dan menyampaikan semua aturan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada semua aparat pelaksana sampai ke tingkat bawah (masyarakat petani). Dalam hal ini diperlukan kerjasama dan koordinasi terhadap setiap langkah program yang dilaksanakan. Setiap aparat pelaksana harus mengintegrasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang dengan pencapaian tujuan program, sehingga nantinya ditemukan kesatuan gerak langkah dalam melaksanakan kebijakan pengembangan usaha tani sampai ke tingkat masyarakat penerima bantuan;
- b. Sumberdaya yaitu ketersediaan staf pelaksana yang cukup dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas yang ditunjang dengan



kemampuan dan spesialisasi fungsi yang di perlukan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, sumber daya finansial dan dibarengi dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk melancarkan tugas dan pekerjaan aparat. Disamping itu perlu diberikan batas kewenangan yang dimiliki oleh aparat untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan dalam menjamin pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu merupakan komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan. Aparat pelaksana yang direkrut adalah aparat yang memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan untuk bekerja keras, sehingga apapun tantangan yang akan ditemuinya di lapangan diharapkan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian tujuan program. Sebagai konsekwensi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan, maka perlu ditetapkan pemberian insentif atau tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap aparat pelaksana tersebut. Hal ini tentunya semakin mendorong semangat dan memperkuat komitmen dari aparat pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha tani .
- d. Struktur organisasi yaitu adanya dukungan dari aparatur pemerintah berupa pembagian tugas dan fungsi sesuai bidang pekerjaan dan disertai dengan penyediaan Standar Operating Procedure (SOP) yang dapat mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Dalam

hal ini diperlukan pelaksanaan fragmentasi yaitu upaya penyebaran tanggung jawab di setiap kegiatan atau aktivitas aparat pelaksana dalam berbagai unit atau bagian sesuai dengan kondisi yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan kebijakan pengembangan usaha tani.

Dengan memperhatikan uraian-uraian tentang konsep dan teori implementasi kebijakan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempunyai pengaruh dominan dalam menentukan implementasi kebijakan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Sumberdaya
3. Sikap (Disposition),
4. Struktur birokrasi.

Berdasarkan temuan atas faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai faktor-faktor penyebab (variabel pengaruh) terhadap implementasi kebijakan.

#### 1. Faktor komunikasi

Faktor komunikasi merupakan hal terpenting dari proses implementasi kebijakan. Komunikasi menurut Kasim (1993:69) dapat diartikan sebagai “transmisi informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi mungkin meliputi pertukaran informasi yang menyangkut manusia dan mesin”. Efektifitas komunikasi tergantung pada sampai

seberapa jauh kelengkapan atau ketepatan waktu informasi yang ditransmisikan tersebut.

Kegiatan komunikasi biasanya mempunyai beberapa tujuan. Tujuan komunikasi dalam organisasi antara lain: (1) memberitahu si penerima tentang suatu hal; (2) mempengaruhi sikap si penerima; (3) memberi dukungan psikologis kepada si penerima; (4) mempengaruhi perilaku si penerima, dan sebaliknya.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan agar mencapai efektif, maka pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas itu harus memahami secara baik hal-hal yang harus dilakukannya. Perintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus ditransmisikan kepada pihak yang tepat, jelas, akurat dan konsisten. Bila pesan yang disampaikan tidak spesifik dan tidak jelas, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman mengenai apa yang dilaksanakan.

## 2. Sumberdaya

Efektifitas implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumberdaya. Tanpa sumberdaya, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah direalisasikan. Mengenai hal ini Edwards III (1980:53) menyatakan bahwa: "Resources can be a critical factor in implementing public policy. Important resources include staff of sufficient size and with the proper skills to carry out their assignment and information, authority and

facilities necessary to translate proposals on paper into functioning public services”.

Aspek yang sangat krusial dalam implementasi kebijakan dapat diidentifikasi menjadi empat, yaitu:

a. Staf atau tenaga pelaksana,

Menurut Edwards III(1980), ada beberapa komponen yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh berkaitan dengan staf yakni jumlah tenaga pelaksana (*size*), dan keahlian/kemampuan (*skill*).

b. Informasi

Berkaitan dengan implementasi kebijakan, informasi terdiri dari dua jenis yaitu informasi mengenai pelaksanaan suatu kebijakan yang berisi petunjuk pelaksanaan kebijakan dan kedua informasi yang merupakan data yang diperlukan. Dengan demikian agar pelaksanaan kebijakan efektif, maka petugas pelaksana (implementors) harus memahami apa yang harus dilaksanakan dan memiliki informasi mengenai kesesuaian antara peraturan yang ada dengan kegiatan yang dilaksanakan.

c. Wewenang

Penggunaan wewenang yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini menjadi sangat krusial ketika mekanisme pelaksanaan melibatkan berbagai unit pelaksana dan mungkin saja berasal dari berbagai tingkatan organisasi.

d. Fasilitas fisik (prasarana)

Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas ke dalam pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka pelayanan publik. Tersedianya fasilitas fisik yang memadai juga merupakan sumber daya yang sangat penting. Seorang implementor mungkin saja memiliki tenaga yang cukup, memahami hal-hal yang seharusnya dilaksanakan, memiliki kewenangan yang memadai tetapi bila tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kebijakan yang efektif relatif sulit untuk dilaksanakan.

3. Sikap Pelaksana

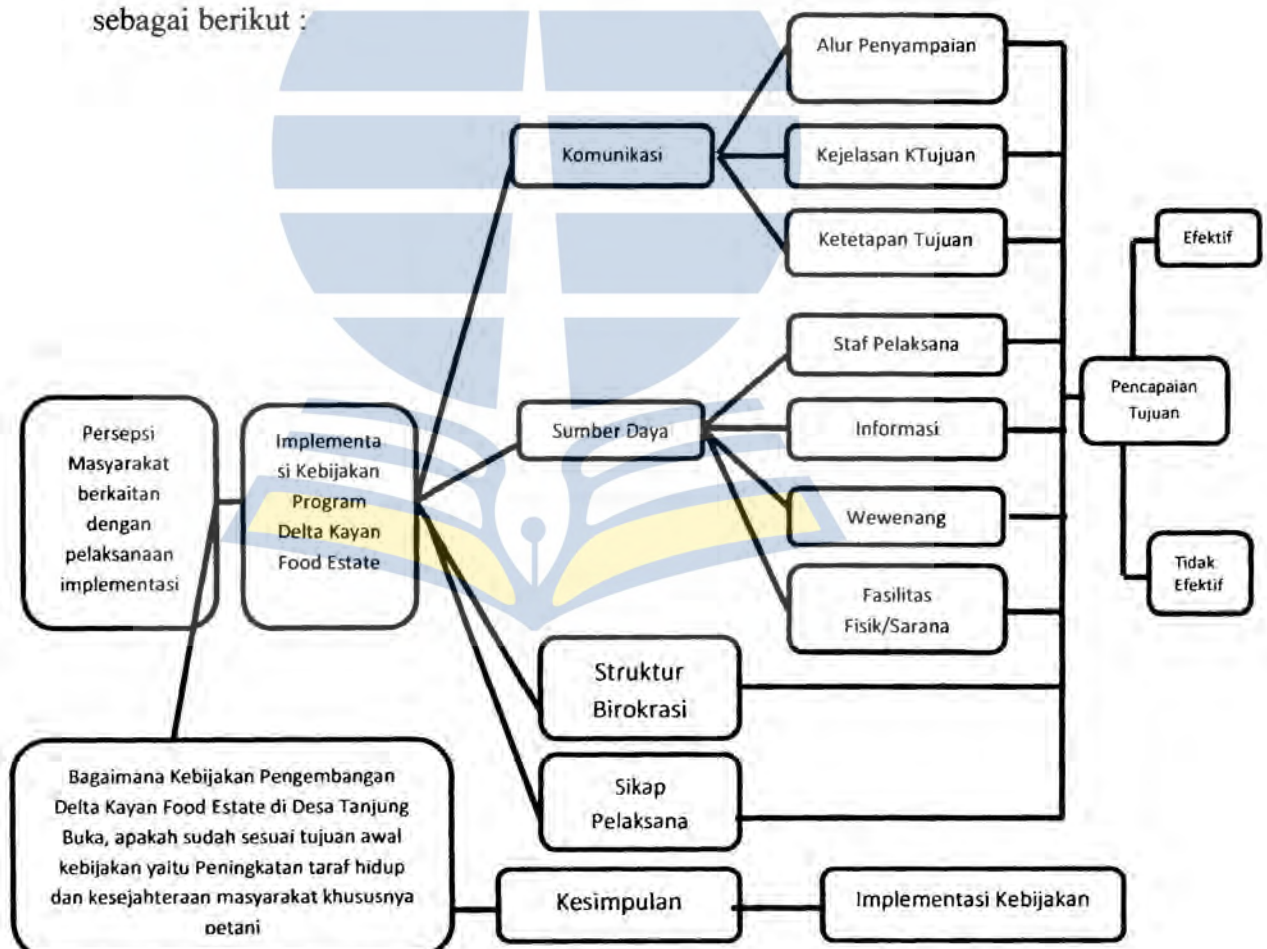
Disamping pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan sebuah kebijakan, diperlukan juga adanya kemauan untuk melaksanakannya. Hal ini dinyatakan oleh Edwards III (1980:11) bahwa "*the desire to carry out policy*". Dalam hal ini diperlukan adanya kesesuaian sikap atau persepsi antara pembuat kebijakan dan aparat pelaksana. Bila sikap dan persepsi implementor berbeda dengan decision maker, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Fragmentasi organisasi dapat menjadi penghalang bagi pelaksanaan kebijakan. Karena itu diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu diperlukan adanya prosedur operasi kerja yang tidak menyulitkan aparat pelaksanaan dan dibuat secara

sederhana, namun tetap tidak mengurangi makna secara keseluruhan agar tercipta mekanisme kerja yang efektif. Selain itu, diperlukan juga adanya penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh.

Sehingga Kerangka teori implementasi kebijakan pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan dapat dijadikan bagan atau secara sederhana kerangka pikir digambarkan sebagai berikut :



Bagan 2.1 : Kerangka berfikir diadopsi dari model implementasi kebijakan, yaitu Edward III sebagai dasar Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan.

Kerangka berfikir ini merupakan adopsi dari model Implementasi Kebijakan sebagaimana tampilan gambar 2.1, dimana berfungsi sebagai alat bantu dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan, dengan demikian dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam Penelitian ini, proses implementasi kebijakan ini mengadopsi model Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. (1) Komunikasi terdiri dari alur penyampaian informasi, kejelasan tujuan dan ketetapan tujuan, sehingga program dapat dipahami dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan; (2) Sumber daya yaitu adanya staf/pelaksana, informasi, wewenang dan fasilitas fisik/sarana, dimana dalam hal ini staf/pelaksana sebagai implementor yang terlibat dalam program, informasi yaitu cara dalam melaksanakan program, wewenang sebagai otoritas implementor dalam melaksanakan program dan fasilitas fisik/sarana (Dana, Sarana dan Prasarana); (3) Sikap Pelaksana atau disposisi yaitu komitmen dari implementor atau aparat pelaksana dalam implementasi kebijakan; dan (4) Struktur Birokrasi yaitu sebagai kinerja struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi sehingga implementor membutuhkan adanya Standar Operating Prosedures (SOP), koordinasi yang saling bersinergi dalam implementasi kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan,

program ini bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat tani. namun kenyataannya kesejahteraan masyarakat petani belum meningkat terkait adanya program pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) ini.

#### E. Operasional Variabel Penelitian

Operasional dalam penelitian ini menggunakan sampel adalah dari unsur masyarakat tani diambil dari GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Wilayah Desa Tanjung Buka dan dari Instansi/SKPD yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Food Estate. Definisi operasional variabel penelitian seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Definisi Operasional Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Parameter	Alat Ukur
1.	- Komunikasi	Komunikasi menurut Kasim (1993: 69) dapat diartikan sebagai "transmisi informasi antara dua orang atau lebih.	Wawancara langsung Purposive Sampling : wawancara dilakukan terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara rinci yang melatarbelakangi kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi food estate di Kab. Bulungan dengan cara dialog atau bercakap cakap secara langsung	Pedoman Wawancara
2.	- Sumber Daya	Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup :  Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, Perintah, Anjuran atasan/pimpinan  Dana untuk membiayai	Wawancara dengan melihat : 1. Status Kerja : Instansi atau Non Instansi 2. Pengalaman atau Lamanya bekerja 3. Tingkat Pendidikan 4. Tingkat Pengetahuan/skill 5. Besarnya anggaran (Rupiah)	Pedoman Wawancara



		<p>operasionalisas implementasi kebijakan tersebut</p> <p>Informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, Sumber daya dalam proses implementasi kebijakan tentang Delta Kayan Food Estate meliputi tenaga pelaksana, informasi, kewenangan dan fasilitas fisik.</p>		
3.	Sikap (Disposition)	<p>Edwards III (1980: 11) bahwa "the desire to carry out policy" Dalam hal ini diperlukan adanya kesesuaian sikap atau persepsi antara pembuat kebijakan dan aparat pelaksana</p> <p>Kesesuaian persepsi komitmen antara pembuat kebijakan dan aparat pelaksana (implementor) untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yang meliputi antara lain sikap dan komitmen.</p>	<p>Melakukan wawancara dengan menanyakan secara langsung kepada masyarakat tani dan instansi pelaksana berkaitan dengan sikap/persepsi Kebijakan Food estate, dengan katcgori :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak sesuai/paham</li> <li>2. Kurang sesuai/Paham</li> <li>3. Paham /Sesuai</li> <li>4. Sangat Paham/sangat sesuai</li> </ol>	<p>Pedoman Wawancara</p>
4.	Struktur Birokrasi	<p>Sistem dan prosedur operasi kerja dalam sebuah hirarki pemerintahan, yang tidak menyulitkan aparat pelaksanaan dan dibuat secara sederhana, namun tetap tidak mengurangi makna secara keseluruhan agar tercipta mekanisme kerja yang efektif</p>	<p>Wawancara dengan alat bantu Pedoman Wawancara, dengan klasifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektif</li> <li>b. Kurang Efektif</li> <li>c. Tidak efektif</li> </ol>	<p>Pedoman Wawancara</p>

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2015

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian ini diuraikan tentang analisis teoritis terkait metode penelitian yang digunakan dalam mempelajari berbagai aspek yang mendorong untuk dilakukan suatu penelitian. Terkait itu dapat di pahami hal-hal sebagai berikut :

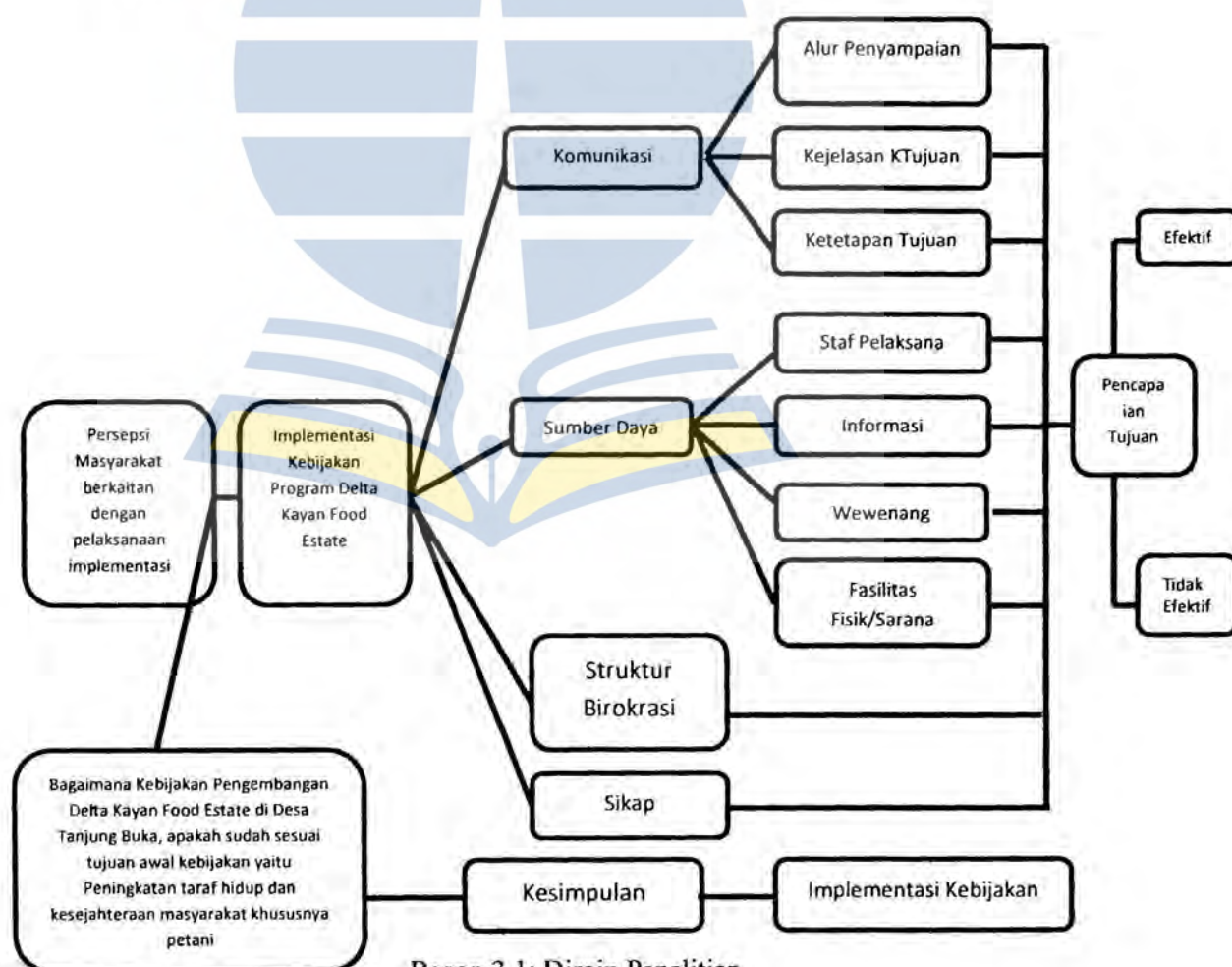
#### A. Disain Penelitian

Disain atau rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian non eksperimen dan deskriptif dengan metode survei. Penelitian ini tidak melakukan suatu percobaan tetapi lebih ke arah pendalaman suatu kasus atau keadaan dan dideskripsikan mendalam (Arikunto, 1996).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian pada pandangan dan sikap aktor stakeholders dalam implementasi kebijakan program Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan, meliputi kesiapan sumber daya, proses implementasi dan lain-lain.

Dalam hal ini akan dilihat mengenai pandangan aktor/stakeholder antara lain yang meliputi aspek persepsi masyarakat dan stake holder terkait terhadap kebijakan pengembangan food estate dengan pendekatan wawancara mendalam (*interdept interview*) pada responden kunci (*key informan*). mulai dari penentu kebijakan (birokrat), petugas lapangan, hingga ke petani diantaranya adalah : a) Masyarakat Petani yang terdiri atas

beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN); b) Petugas Penyuluh Lapangan (PPL); c) Pemerintah terkait (Sekda, Asisten terkait, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan, pejabat Bappeda). Aktor/Stakeholder dimaksudkan adalah yang ada (berkoalisi) dalam kelembagaan pertanian dan organisasi lain yang terkait dalam implementasi kebijakan Program Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan. Disain penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Bagan 3.1: Disain Penelitian

## B. Sumber Informasi dan Teknik Pemilihan Informan

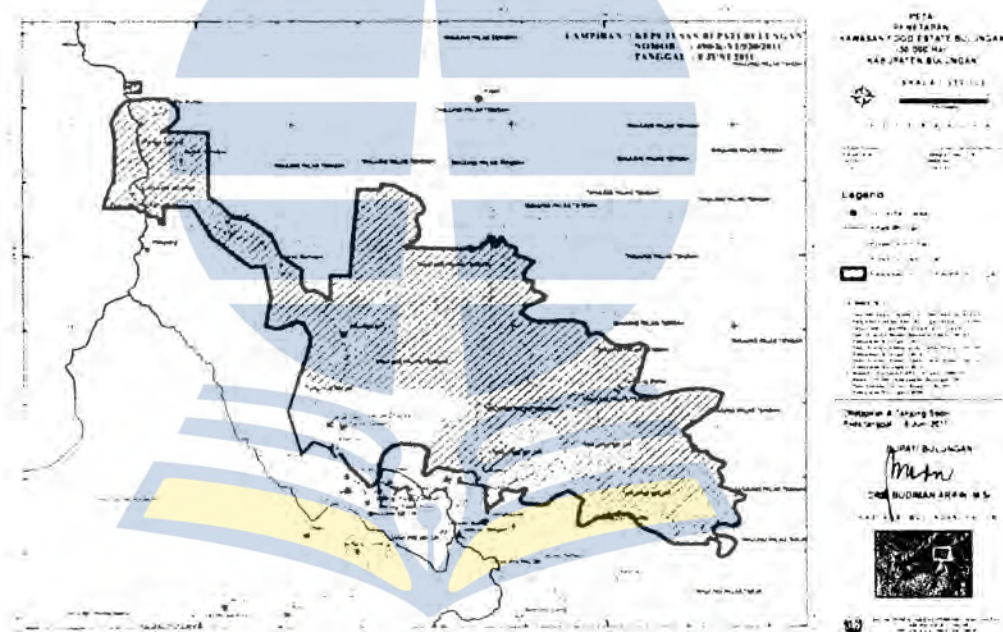
Sumber informasi dan pemilihan informan pada penelitian ini yaitu para masyarakat petani dan PPL di Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) dan para birokrat/aparat yang terkait dengan kebijakan Delta Kayan Food Estate. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data yang bersifat primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro,2003).

Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat petani, untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti, penulis juga melakukan wawancara (*interview*) pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program pengembangan food estate sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data yang berasal dari Bappeda, Dinas Pertanian dan BPS. Populasi dalam penelitian ini adalah petani dengan usaha budidaya padi dan palawija tergabung dalam GAPOKTAN dalam wilayah kewenangan di desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

## C. Ruang Lingkup dan Batasan Wilayah (Fokus dan Lokus Penelitian)

Pengamatan dan Pengambilan data penelitian dilaksanakan diwilayah Kabupaten Bulungan dan hanya terfokus atau dibatasi pada desa Tanjung Buka sebagai kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 490/K-VI/520/2011 yang ditetapkan sebagai kawasan pencadangan areal food estate yaitu seluas 10.000 Ha yaitu lokasi transmigrasi ( SP.1 – SP. 8 ), dan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015 (Tiga bulan). Pemilihan lokasi pada wilayah Delta Kayan Food Estate (DeKaFE), mengingat sejak pelaksanaan kegiatan program pengembangan *food estate* tahun 2011, belum dilakukan analisis tentang tingkat kesejahteraan petani terhadap aplikasi program pengembangan food estate di Kabupaten bulungan.



Gambar 3.1 :Peta Lokasi Food Estate di Desa Tanjung Buka

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis apakah kesejahteraan masyarakat petani meningkat di desa

Tanjung Buka dengan adanya program pengembangan *food estate* di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan. Dengan cara pengumpulan data melalui meliputi :

### **1. Tahap Studi Literatur**

Tahap pertama berupa studi literatur diperlukan guna mendapatkan teori yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain:

- a. Studi literatur mengenai Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) Bulungan;
- b. Studi literatur mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan pembangunan pertanian di Kabupaten Bulungan melalui kajian RPJM, Perda dan lainnya seperti;
  - Perundang-undangan dan data pendukung lainnya dari Bappeda dan Dinas Pertanian;
  - Data Produktivitas pertanian lima tahun terakhir periode 2011 s/d 2014;
  - Data kependudukan dari BPS maupun dari monografi kecamatan dan desa dan Data Pendukung lainnya.
- d. Studi literatur mengenai implementasi dan persepsi masyarakat utamanya di SP.1, SP.2 SP.7 dan SP.8 desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan dan persepsi pelaksana dari SKPD terkait.

### **2. Tahap Survei dan Observasi Lapangan**

Tahap kedua berupa survei dan observasi lapangan perlu dilakukan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain:

- a. Survey institusional untuk mengumpulkan data dari instansi: Instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan, pekerjaan fisik, pendataan dan koordinasi seperti BAPPEDA, BPS dan Dinas Pertanian;
- b. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapat data primer yang berkaitan dengan kondisi pengembangan food estate terutama produksi padi dan palawija dan aktivitas yang ada pada masyarakat di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan.

### 3. Tahap Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal dengan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Berdasarkan golongannya, wawancara terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu wawancara tertutup yang bentuk pertanyaannya sedemikian rupa sehingga jawaban dari narasumber sangat terbatas dan wawancara terbuka yang bentuk pertanyaannya sedemikian rupa sehingga jawaban dari narasumber tidak terbatas dan dapat berupa cerita panjang, (Koentjaraningrat, 1977). Sedangkan menurut prosedurnya, wawancara terbagi menjadi:

- a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab

- pada pokok persoalan dari fokus penelitian dan orang yang diwawancarai;
- b. Wawancara terpimpin, adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti. Ciri pokoknya pewawancara terikat oleh suatu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data yang relevan dengan maksud penelitian yang dipersiapkan, serta ada pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab untuk memudahkan kelancaran wawancara.
  - c. Wawancara bebas terpimpin, adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan narasumber apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

Pada penelitian ini, golongan wawancara yang dipilih adalah wawancara terbuka dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik wawancara. Hal ini mengingat bahwa teknik campuran ini masih memberi kebebasan kepada narasumber dalam batas tertentu, namun juga tidak terlalu memberi ruang bagi penyimpangan masukan narasumber dari topik bahasan. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara.



Pedoman wawancara dimaksud untuk menjangkau narasumber yang jumlahnya relatif banyak, wawancara dilakukan kepada sejumlah narasumber yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Pedoman wawancara yang telah ditentukan digunakan untuk mengarahkan pertanyaan dalam panduan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat. Adapun kegunaan wawancara yang dilakukan antara lain:

- 1) Mendapatkan informasi dan data di tangan pertama (primer);
- 2) Pelengkap teknik pengumpulan lainnya;
- 3) Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa purposive sampling. Moleong (2000) mengidentifikasi ciri-ciri purposive sampling yaitu:

- 1) Pemilihan data secara berurutan dengan tujuan untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya yang hanya dapat dicapai bila pemilihan satuan data sebelumnya sudah dijangkau dan dianalisis. Satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui;

- 2) Penyesuaian berkelanjutan dari data, pada mulanya setiap data dapat sama kegunaannya, namun semakin banyak informasi dan semakin dalam maka data yang dipilih atas dasar fokus penelitian;
- 3) Jika sudah terjadi pengurangan informasi, pemilihan data dihentikan.

Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik purposive sampling adalah:

- 1) Mempermudah mencari narasumber yang representatif pada populasinya dan menguasai objek studi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya;
- 2) Diperoleh narasumber yang memahami permasalahan atau latar belakang proses dan mekanisme kebijakan food estate di Kabupaten Bulungan.
- 3) Pengumpulan dan pengambilan data berupa wawancara dilakukan terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara rinci yang melatarbelakangi kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi food estate di Kabupaten Bulungan dengan cara dialog atau bercakap-cakap secara langsung. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang memahami kondisi terbaru Food Estate (DeKaFE) Bulungan di daerah penelitian;
- 2) Masyarakat yang memahami kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah penelitian;
- 3) Aparatur pemerintah daerah yang ada di wilayah;

4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah yang menangani program pengembangan food estate.

atau secara focus data di bagi dalam beberapa tahapan diantaranya :

1. Komunikasi :

➤ Wawancara mendalam (*interdept Interview*)

2. Sumberdaya :

➤ Para Stake Holder, Petugas Penyuluh Pertanian(PPL) dan Masyarakat Petani (GAPOKTAN);

3. Disposisi :

➤ Respon implementor

➤ Pemahaman terhadap kebijakan

4. Struktur Birokrasi :

➤ Peraturan Pendukung

➤ SOP

➤ Koordinasi antar instansi

5. Data Pendukung lainnya :

➤ Kondisi Sosial ekonomi :

- Jenis / Produksi Pertanian

- Tingkat Pendidikan

- Jumlah Kelompok Tani / Petani

- Tingkat penghasilan petani

➤ Dukungan Publik :

- Persepsi masyarakat petani dan peran lintas sektoral

Berkaitan dengan yang tersebut diatas, dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Prosedur Pengumpulan Data, 2015

No	Kebutuhan Data	Sumber	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Data Primer</b>		
	1. Tingkat Kesejahteraan masyarakat petani	Masyarakat Petani	Wawancara
	2. Implementasi program pengembangan food estate	Aparatur dan Masyarakat Petani	Wawancara
<b>II.</b>	<b>Data Sekunder</b>		
	1. Peraturan perundang-undangan dan data pendukung lainnya	Bappeda dan Dinas Pertanian	Dokumen
	2. Data Produktivitas Pertanian	B P S	Dokumen
	3. Data Kependudukan	B P S	Dokumen
	4. Monografi Kecamatan/Desa	B P S	Dokumen
	5. Data Pendukung lainnya	-	Dokumen

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2015

#### E. Metode Analisis Data

Pengolahan data secara analisa yang dilakukan bersifat evaluatif dengan metode deskriptif yaitu menjelaskan suatu permasalahan yang ada dengan menguraikan data, menggunakan tabel, diagram maupun peta dengan menggunakan analisis diskriptif untuk melihat faktor-faktor apa yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan pengembangan Delta Kayan Food Estate dan secara langsung menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan sejauh mana efektifitas kerjasama dan kordinasi

peran lintas sektoral terkait program pengembangan food estate ini. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan dirancang untuk memahami persepsi masyarakat desa dan aparat terhadap kinerja pelaksanaan Pengembangan DeKaFE. Hasil finalisasi wawancara lapangan di analisis dengan melalui pendekatan *indepth interview* dan dilakukan secara serentak baik pada kelompok masyarakat tani, PPL maupun pengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan DeKaFE.

Pada teknik analisis kualitatif ini data yang disajikan berwujud kata dan bukan rangkaian angka (Miles dan Huberman, 1992). Data itu telah dimunculkan dalam berbagai macam cara yaitu intisari dokumen, observasi dan wawancara yang diproses terlebih dahulu sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan sebelum penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data merupakan bagian analisis yang berupa deret dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dengan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak matriks merupakan

kegiatan analisis yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang dilakukan dalam analisis ini melalui cuplikan kartu sikap yang berisi informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri sebagai satuan data akan ditampilkan dengan menggunakan kode yang menandai kategori data, cara pengumpulan, nomor narasumber dan intisari jawaban.

Data dengan kode KOM.W.04.07, berarti kategori data adalah Kom (Komunikasi), W (wawancara) sebagai cara pengumpulan data, 04 adalah nomor narasumber dan 07 adalah intisari jawaban dari pertanyaan nomor 7. Langkah akhir dari teknik analisis ini dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, analisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin dan alur sebab-akibat. Penelitian kualitatif ini pada dasarnya mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut diatas, namun penggunaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan penelitian. Sehingga proses pelaksanaannya lebih banyak menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

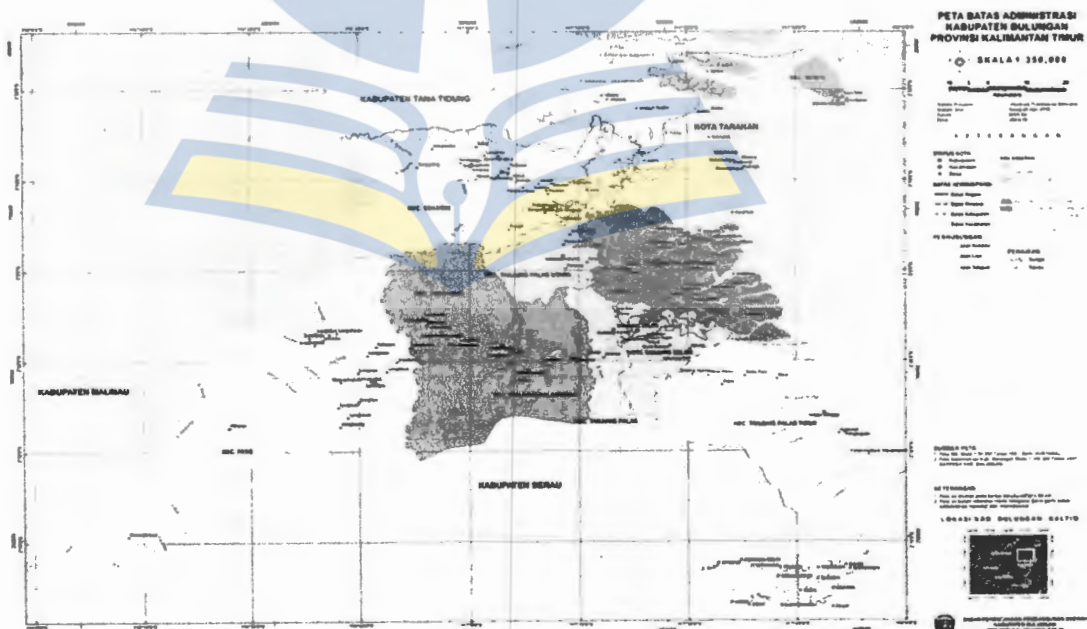
## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi kebijakan pengembangan Delta Kayan Food Estate di desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan, terkait hal itu maka dapat digambarkan sebagai berikut :

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau Kalimantan mempunyai luas 18.010,50 km<sup>2</sup> terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.



Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Bulungan

## 1. Letak Wilayah :

Lintang Utara :  $2^{\circ} 09' 19'' - 3^{\circ} 34' 49''$ Bujur Timur :  $116^{\circ} 04' 41'' - 117^{\circ} 57' 56''$ 

## 2. Batas Wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

3. Luas Wilayah : 13 181,92 km<sup>2</sup>

Tabel 4.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah menurut Kecamatan Tahun 2014

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		DESA
		KM <sup>2</sup>	%	
1.	Peso	3 142,79	23,84	10
2.	Peso Hilir	1 639,71	12,44	6
3.	Tanjung Palas	1 755,54	13,32	9
4.	Tg. Palas Barat	1 064,51	8,08	5
5.	Tg. Palas Utara	806,34	6,12	6
6.	Tg. Palas Timur	677,77	5,14	8
7.	Tanjung Selor	1 277,81	9,69	9
8.	Tanjung Palas Tengah	624,95	4,74	3
9.	Sekatak	1 993,98	15,13	22
10.	Bunyu	198,32	1,50	3
	Jumlah	13 181,92	100,00	81

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan

Bentuk wilayah Kabupaten Bulungan secara umum didominasi oleh bentuk wilayah datar hingga berbukit dengan kemiringan lahan dominan



antara 2 sampai 30 persen. Bentuk wilayah datar dijumpai di sebagian besar wilayah sepanjang garis pantai atau sepanjang daerah aliran sungai atau pada daerah dengan fisiografi dataran alluvial sungai berupa tanggul sungai dan rawa, dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen.

Pengembangan tanaman pangan sangat berpotensi dilakukan pada daerah dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen, terutama padi dan palawija. Kendala yang ada pada daerah dengan kemiringan lahan di bawah 2 persen adalah luasannya yang relatif terbatas, meskipun kemungkinan erosi yang terjadi sangat terbatas. Sedangkan pada daerah rawa yang tergenang permanen perlu adanya masukan teknologi relatif tinggi, seperti pembuatan kanal atau saluran-saluran drainase, serta pengendalian keasaman tanah.

Berikutnya, pada daerah dengan kemiringan lahan 3 sampai 15 persen adalah kawasan yang potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan perkebunan dengan masukan teknologi rendah sampai sedang, seperti pembuatan teras gulud atau teras bangku. Sedangkan daerah dengan kemiringan lahan 15 – 30 persen pemanfaatannya terbatas hanya untuk tanaman perkebunan dengan masukan teknologi berupa konservasi kesuburan tanah.

Berdasarkan kondisi geografis yang tercipta secara alami, wilayah Kabupaten Bulungan memiliki 7 (tujuh) aliran sungai induk, yaitu: (1) Kayan, (2) Bandan, (3) Sesayap, (4) Pimping, (5) Sekatak, (6) Jelarai, (7) Linuang Kayan. Potensi hidrologi di wilayah Kabupaten Bulungan sangat

besar, terutama oleh adanya aliran Sungai Kayan beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Kayan yang lebar dan panjang memberikan pengaruh yang besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai kayan dan anak-anak sungai kayan ini merupakan dampak positif dari wilayah Kabupaten Bulungan yang merupakan kawasan hutan. Hutan di wilayah ini berpotensi besar untuk menyerap (infiltrasi) air hujan, selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Air Sungai Kayan hingga saat ini telah dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk sepanjang wilayah yang dilaluinya. Selain itu, dimanfaatkan juga sebagai prasarana lalu lintas transportasi air yang menghubungkan beberapa kecamatan secara lokal (transportasi lokal) maupun antar wilayah (transportasi regional).

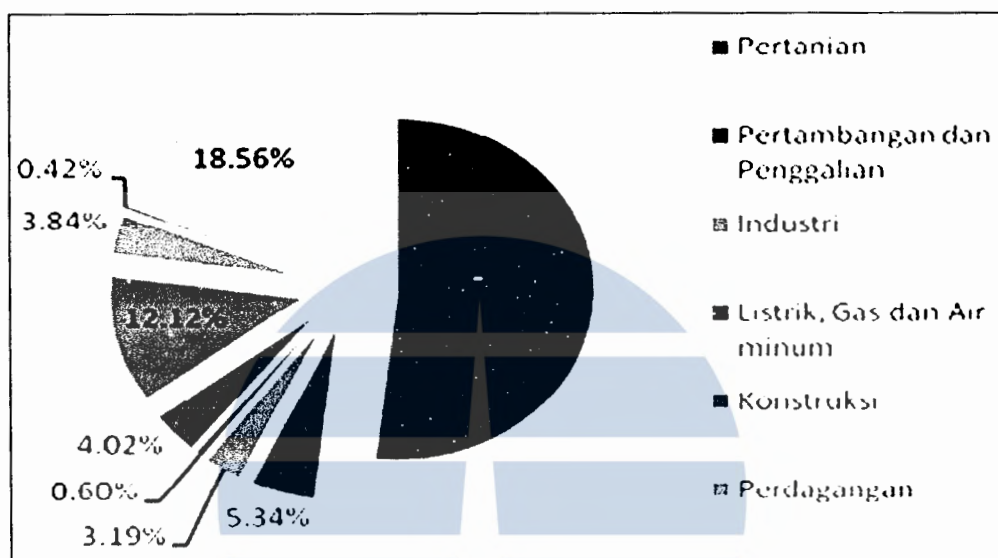
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2014 Kabupaten Bulungan pada umumnya, mengalami musim hujan sepanjang tahun. Iklim Climate Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2015 (Bulungan Regency In Figures 2015) dengan curah hujan 2654,6 mm/tahun atau 217 hari hujan/tahun. Untuk penyinaran matahari rata-rata 59 persen/bulan. Secara umum Kabupaten Bulungan beriklim sedang, dengan rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2014 berkisar antara  $21,3^{\circ}\text{C}$  –  $36,4^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan curah hujan selama tahun 2014 di Kabupaten Bulungan pada umumnya berkisar antara 0 sampai dengan 101,2 mm/bulan. Kelembaban udara Kabupaten Bulungantercatat relatif tinggi

berkisar antara 44 persen sampai dengan 100 persen dengan rata-rata selama tahun 2014 adalah 84 persen.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2014 tercatat sebesar 162.563 jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya adalah berkisar antara 1,56 jiwa/km<sup>2</sup> (Kecamatan Peso) sampai 73,69 jiwa/km<sup>2</sup> (Kec. Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 12,33 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Sekatak. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 116,89 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 117 laki-laki.

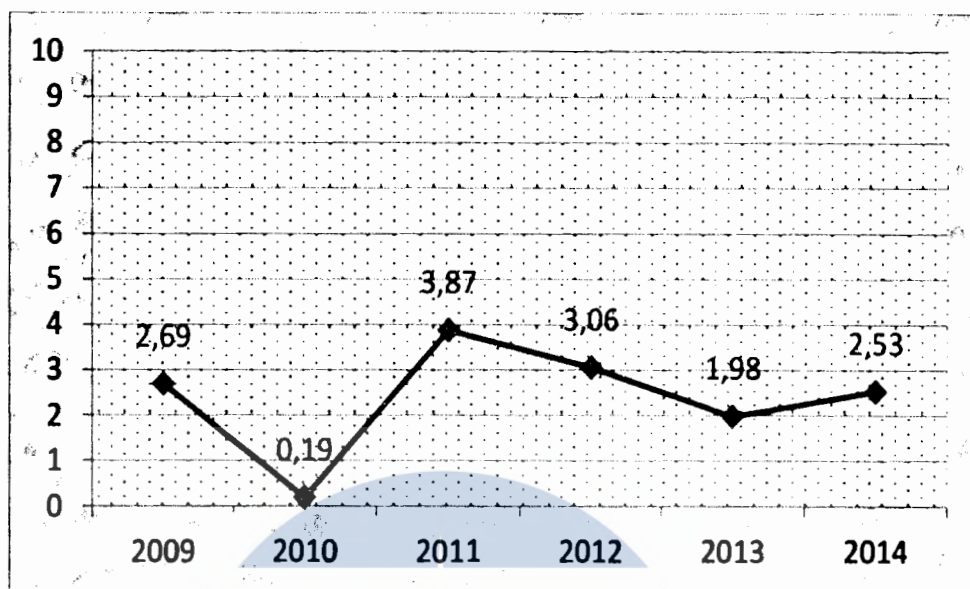
Lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain penduduk yang berusaha di bidang, terbagi menjadi sembilan sektor lapangan pekerjaan yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik Gas dan Air; Konstruksi; Perdagangan; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa. Dari kesembilan sektor tersebut, pada tahun 2014 sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Bulungan sebesar 38 persen. Kemudian disusul sektor jasa sebesar 19 persen dan sektor Penduduk &

Angkatan Kerja perdagangan 12 persen. Sedangkan sektor yang persentasenya terkecil adalah sektor listrik, gas dan air minum yaitu kurang dari satu persen.



Gambar 4.2 : Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2014 (%)

Kabupaten Bulungan memiliki keanekaragaman penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang. Pertumbuhan penduduk di daerah ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas migrasi. Sebagai contoh pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 2,69%, tetapi terus menurun secara linier dan pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 hanya mencapai 2,53%.



Gambar 4.3 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2009 – 2014

Sejak menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara, pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulungan cukup tinggi, yakni untuk tahun 2014 tercatat sebesar 126.096 Jiwa di bandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah 122.985 Jiwa. Secara lengkap perkembangan penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di kabupaten bulungan seperti tercantum pada Tabel 4.2 :

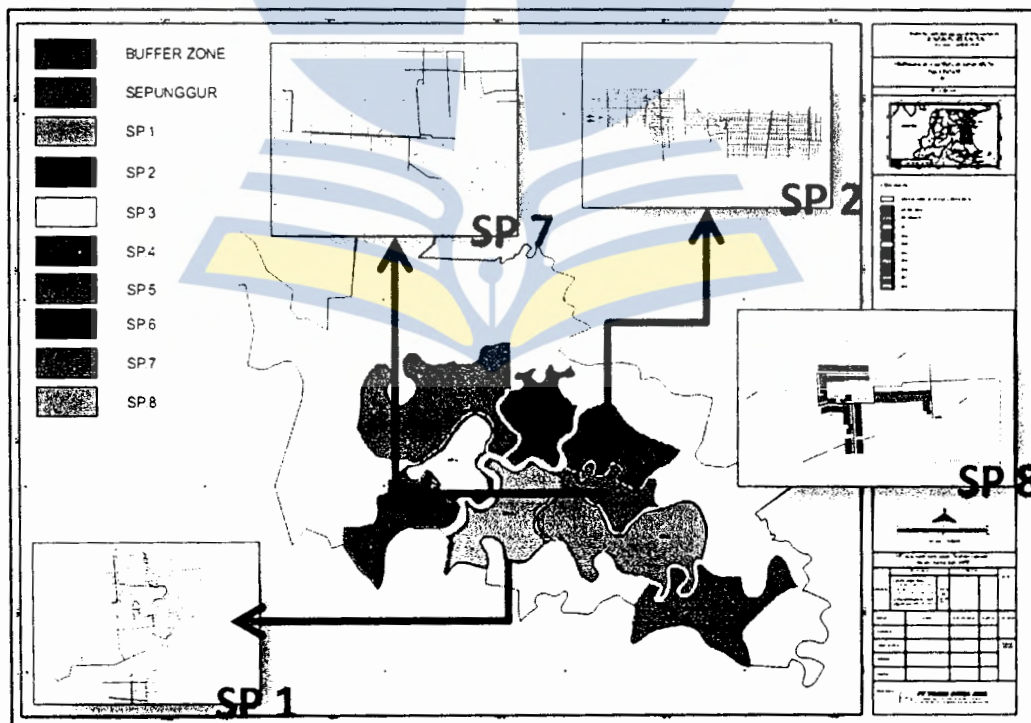
Tabel 4.2  
Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 2012-2014

Jenis Kelamin	Tahun		
	2012	2013	2014
Laki-laki	64.529	65.579	67.312
Perempuan	56.071	57.406	58.784
Total	120.600	122.985	126.096

Sumber : BPS Kab. Bulungan

## 2. Gambaran Umum Desa Tanjung Buka

Desa Tanjung Buka terletak di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah adalah 624,95 KM<sup>2</sup> atau 4,74 % dari luas wilayah kabupaten bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdiri dari 3 (Tiga) Desa yaitu Desa Salimbatu, Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Daerah kawasan food estate adalah Desa Tanjung Buka yaitu di SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8 dimana letak lokasinya sangat strategis berdekatan dengan Kota Tanjung Selor, Kota Tarakan dan Kota Berau sebagai area pusat pemasaran untuk menjual hasil produk pertanian. Lokasi SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8 dapat kita lihat pada gambar peta dibawah ini :



Gambar 4.4 : Peta Lokasi Kawasan Food Estate di SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8

Berdasarkan Topografi, Hidrologi dan Klimatologi, Wilayah SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8 Desa Tanjung Buka merupakan daerah rawa pantai, rawa sungai, dataran pantai dan dataran alluvial dan merupakan paduan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai). Iklim pada kawasan food estate di desa tanjung buka merupakan faktor yang sangat penting karena curah hujan sangat berpengaruh pada debit air sungai sebagai lahan pasang surut dimana apabila pasang maka air bisa mengalir areal persawahan dan apabila surut maka air tidak bisa mengalir areal sawah sehingga diperlukan pintu air untuk mengendalikan air pasang dan surut. Untuk lahan tipe A dan B sangat tergantung pada pasang surut air, lahan-lahan ini harus memiliki tata air mikro yang baik. Karena air menjadi kendala dalam usaha taninya. Tata air mikro yang dimaksud adalah pembuatan saluran drainase yang baik dan pembuatan tanggul-tanggul pematang serta pintu air untuk mengatur dan menahan air pada saat pasang besar. Untuk lahan dengan tipe C dan D saat ini sangat terbantu dengan tinggi curah hujan yang tinggi. Lahan dengan tipe ini sulit tidak dipengaruhi oleh pasang surut, perolehan air hanya berharap pada hujan dan irigasi pompa. Hujan yang turun pada periode oktober dan februari dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi, pada bulan-bulan ini curah hujan sangat mencukupi kebutuhan tanaman akan air. Terkait dengan hal tersebut, juga mempengaruhi dengan irigasi lahan pertanian dan transportasi, karena desa Tanjung Buka akses jalan belum tersentuh semenisasi atau pengaspalan jalan, apabila hujan akses transportasi jalan dalam keadaan becek sehingga kendaraan tidak dapat

melintas secara cepat hingga dapat menghambat untuk memasarkan produk pertanian ke kota terdekat. Untuk itu dibutuhkan regulasi lintas sektoral yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan terkait pengadaan sarana dan prasarana berupa akses transportasi yaitu Pengaspalan, Semenisasi Jalan dan Jembatan Penghubung yang permanen antara masing-masing Satuan Pedesaan (SP) dan Jembatan Penghubung ke Kota Tanjung Selor.

Penetapan Luas Kawasan Delta Kayan Food Estate adalah seluas 50.000 Ha, dimana sebagian besar areal  $\pm$  30.000 Ha dan seluas 10.000 Ha dicadangkan untuk Lahan Transmigrasi (SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8 ) yang merupakan lahan pasang surut dengan jenis tanah alluvial yang sangat subur. Kawasan Delta Kayan Food Estate mempunyai beberapa keunggulan yaitu 1).Klimatologis sesuai untuk pangan 2). Irigasi Pasang Surut sehingga tidak terpengaruh anomaly iklim serta bias untuk lahan basah maupun lahan kering 3).Selain sebagai irigasi, sungai juga berfungsi sebagai sarana transportasi 4).Geologi lahan yang berupa tanah Aluvial yang relative subur 5).Lokasi Strategis dan mudah dijangkau 6).Tersedianya SDM yang cukup 7).Luas lahan sawah yang telah berfungsi.

Terkait Aspek Demografi, Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan setiap tahun semakin bertambah, hal ini di pengaruhi oleh fertilitas atau angka kelahiran, mortalitas atau kematian, serta migrasi perpindahan penduduk hal ini dikenal sebagai perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain dalam jangka waktu tertentu. Kecamatan Tanjung



Palas Tengah memiliki luas wilayah daratan sekitar 642,95 km<sup>2</sup>, maka setiap km<sup>2</sup> dihuni/ditempati penduduk sebanyak 16 sampai 17 orang pada tahun 2014.

Tabel 4.3  
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk  
Menurut Desa Tahun 2014

DESA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	PENDUDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
Salimbatu	325,93	4 800	14,73
Silva Rahayu	99,67	1 137	11,41
Tanjung Buka	199,35	4 088	20,51
Jumlah	624,95	10 025	16,04

SumberData : BPS Kabupaten Bulungan

Tabel 4.4  
Jumlah Penduduk dan Rasionya Menurut Jenis Kelamin  
Menurut Desa Tahun 2014

DESA	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Salimbatu	2 476	2 324	4 800	106,54
Silva Rahayu	583	554	1 137	105,23
Tanjung Buka	2 189	1 899	4 088	115,27
Jumlah	5 048	4 777	10 025	105,67

Sumber Data : BPS Kabupaten Bulungan

Pada akhir tahun 2014 di desa Tanjung Buka tercatat jumlah penduduk 4.088 Jiwa dengan kepadatan penduduk 16,04 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Awalnya penduduk desa tanjung buka tidak sepadat sekarang, hal ini diakibatkan banyaknya penduduk dari luar daerah yang bertransmigrasi ke desa tanjung buka dengan tujuan bisa merubah nasib hidup mereka. Hal ini mereka lakukan karena melihat perkembangan hasil dari pertanian

khususnya untuk tanaman padi dominan dari desa tersebut, sehingga membuat mereka yakin untuk bertransmigrasi ke desa tanjung buka. Dengan adanya program pengembangan food estate, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan mendatangkan setiap tahunnya tenaga kerja dari luar daerah yaitu jawa timur dan jawa tengah untuk di tempatkan di wilayah SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8 desa tanjung buka yang merupakan daerah transmigrasi untuk mengelola lahan pertanian dalam mengembangkan kawasan food estate yang notabene wilayah tersebut belum berkembang pembangunannya.

Tabel 4.5  
Banyaknya Transmigrasi Di Desa Tanjung Buka  
Kondisi Tahun 2014

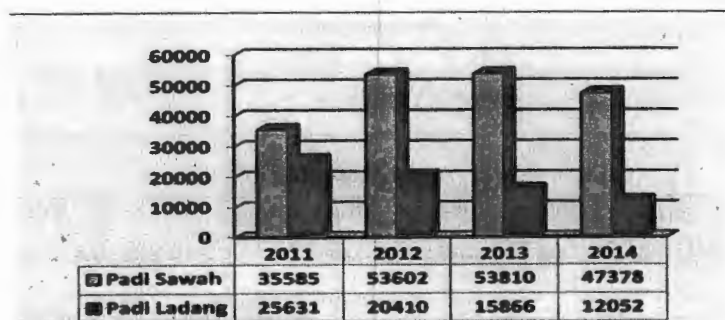
DESA	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Daerah Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanjung Buka	9	26	Jawa Timur
	165	484	Jawa Tengah
	26	141	Bulungan
Jumlah	200	651	

SumberData : BPS Kabupaten Bulungan

Hal ini menyebabkan ada beberapa masyarakat transmigrasi yang merupakan masyarakat petani yang tidak betah untuk menetap didaerah tersebut karena situasi dan kondisi diwilayah tersebut masih kurang dalam akses transportasi, penerangan listrik dimalam hari, air bersih, kesehatan dan pendidikan. Maka perlu dibutuhkan adanya sinergi antara SKPD terkait hal ini guna meningkatkan pembangunan didaerah tersebut.

### 3. Aspek Pertanian

Secara riil luas panen padi pada tahun 2014 sebesar 16.640 hektar yang terdiri dari 11.213 hektar padi sawah dan 5.427 hektar padi ladang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 15,93 persen dibandingkan tahun 2013. Penurunan luas panen ini diikuti pula oleh penurunan jumlah produksi padi. Pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan dari 69.676 ton pada tahun 2013 menjadi 59.430 ton pada tahun 2014. Untuk komoditas tanaman sayur-sayuran yang diproduksi di Kabupaten Bulungan antara lain: bawang daun, kubis, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung, dan bayam. Pada tahun 2014 ini, produksi sayuran terbesar adalah produksi tanaman kacang panjang sebesar 553,5 ton, diikuti tanaman terung sebesar 428,1 ton, tanaman cabe rawit kecil sebesar 375,2 ton, dan tanaman kangkung sebesar 371,5 ton. Pada tahun 2014 ini, produksi tanaman buah-buahan di Kabupaten Bulungan didominasi oleh tanaman pisang sebanyak 6.173 ton dengan jumlah pohon yang dipanen 51.099 pohon. Untuk tanaman rambutan menghasilkan 7.691,9 ton buah dengan jumlah pohon yang dipanen sebanyak 34.259 pohon.



Gambar 4.5 : Perkembangan Produksi Padi Tahun 2011 - 2014

Tabel 4.6

**PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA MENURUT KECAMATAN  
TAHUN 2014  
(Ton)**

Kecamatan (1)	Padi Sawah (2)	Padi Ladang (3)	Jagung (4)	Kedelai (5)
1. P e s o	449	2 366	20	-
2. Peso Hilir	529	3 420	-	-
3. Tanjung Palas	8 005	827	37	2
4. Tg Palas Barat	963	341	17	2
5. Tg Palas Utara	8 432	-	89	26
6. Tg Palas Timur	5 120	864	12	12
7. Tanjung Selor	12 359	3 152	66	14
8. Tg Palas Tengah	11 631	242	380	12
9. Sekatak	359	665	14	-
10. Bunyu	-	-	10	-
Jumlah 2014	47 378	12 052	672	75
2013	53 810	15 866	461	49
2012	53 602	20 410	2 317	257
2011	36 119	25 631	562	562

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Bulungan

Kecamatan Tanjung Palas Tengah, sektor pertanian tanaman pangan masih menduduki peringkat teratas sebagai mata pencaharian dan sumber penghasilan utama walaupun telah beroperasinya perusahaan-perusahaan kehutanan. Mayoritas penduduk di kecamatan Tanjung Palas Tengah mengusahakan tanaman pertanian padi sawah. Hal ini dikarenakan struktur tanah yang terdapat dikecamatan tanjung palas tengah terbilang berkualitas baik, akan tetapi tidak jarang para petani sering mengalami rugi dikarenakan terkadang padi mereka terserang hama atau penyakit merah. Pada tahun 2014 luas panen padi sawah mencapai hingga 2.428 Ha dengan produksi padi sebesar 11.631 ton.

Selain padi sawah hasil dari pertanian kecamatan tanjung palas

tengah ini adalah produksi sayuran. Pada tahun 2014 ini, produksi sayuran terbesar adalah produksi tanaman kacang panjang sebesar 377,2 ton, diikuti dengan produksi terung sebesar 303,8 ton, produksi tanaman cabai sebesar 254,1 ton, produksi tanaman bayam sebesar 186,9 ton, produksi tanaman kangkung sebesar 181,5 ton, produksi tanaman petsai/sawi sebesar 172,1 ton, dan produksi tanaman yang paling terkecil yaitu buncis sebesar 18,1 ton.

#### **4. Aspek Kesejahteraan masyarakat**

Secara umum kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan masih perlu ditingkatkan, kondisi demikian dapat menggunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Lampiran I Permendagri Nomor 54 tahun 2010). Berdasarkan aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena, sebagian besar penduduk di daerah ini menekuni bidang usaha sektor pertanian (51,9%) yang belum mendapat dukungan infrastruktur yang kuat dari aspek produksi hingga pemasaran produknya. Selain itu, masih banyak tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal yang sangat beresiko kehilangan pekerjaan dan penghasilannya.

Ditinjau berdasarkan aspek kesejahteraan sosial, berkaitan dengan aspek pemerataan ekonomi seperti dikemukakan di atas, berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat, sehingga masih sekitar 12,03% penduduk daerah ini tergolong keluarga miskin (BPS Kab. Bulungan). Berkaitan dengan fakta dan kenyataan demikian, upaya-upaya strategis harus

dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah, agar secara bertahap dan pasti kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat ditingkatkan, bilamana mungkin dilakukan percepatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pengembangan seni budaya dan olah raga juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Potensi seni dan budaya di daerah ini sangat besar, tetapi kegiatan pelestarian dan pengembangannya belum optimal, untuk itu upaya-upaya strategis secara sinergis dengan seluruh sektor pembangunan harus terus dilakukan. Demikian pula dengan upaya-upaya pembangunan prasarana dan sarana olah raga serta kegiatan pembinaannya harus terus dilakukan untuk mencapai prestasi yang tertinggi.

#### **5. Aspek Pelayanan Umum**

Pelaksanaan kinerja pembangunan oleh pemerintah daerah merupakan pelayanan umum kepada masyarakat, yang dibedakan menjadi dua urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan semua urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan. Secara kuantitas seluruh urusan wajib telah dilakukan oleh pemerintah daerah, hanya secara kualitas pelayanan kepada masyarakat masih sangat perlu terus ditingkatkan, diawali dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan menuju standar pelayanan prima (SPP).

Sektor pertanian merupakan urusan pilihan yang mendapat perhatian besar pemerintah daerah. Hal ini, berkaitan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat daerah ini kegiatan ekonominya bergantung

pada sektor ini. Namun dukungan infrastruktur untuk sektor pertanian juga belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, baik infrastruktur fisik maupun kelembagaan serta regulasi.

## **6. Aspek Daya Saing Daerah**

Andalan daya saing daerah untuk Kabupaten Bulungan adalah sumber daya alam, baik yang tak terbarukan (unrenewable) maupun yang terbarukan (renewable). Namun untuk pengembangan budidaya, daerah ini menghadapi kendala belum ditetapkannya RTRW provinsi dan kabupaten. Sehingga, upaya promosi untuk menarik investor mengalami hambatan.

Ditinjau dari aspek dukungan infrastruktur dan sumberdaya manusia, daya saing daerah Kabupaten Bulungan relatif masih lemah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memanfaatkan sumberdaya alam secara maksimal sebagai keunggulan daya saing daerah, dengan mengembangkan konsep-konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## **7. Luas dan Legalitas Kepastian Kawasan Food Estate Delta Kayan**

Luas kawasan Delta Kayan Food Estate adalah Seluas 50.000 Ha yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 490/K-VI/520/2011 tentang Penetapan Kawasan Food Estate Bulungan seluas 50.000 Ha. Dimana sebagian besar areal  $\pm$  30.000 Ha merupakan lahan pasang surut dengan jenis tanah aluvial yang sangat subur.

Seluas 10.000 Ha dicadangkan untuk Lahan Transmigrasi (SP-1 s.d. SP-8) berdasarkan SK Gubernur Kaltim No. 39/BPN-16/UM-39/III-1998. Telah ditempatkan transmigran sebanyak  $\pm$  1.165 KK pada SP-1, SP-

2, SP-7 dan SP-8 yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Banten, Lampung, Jawa Barat dan penduduk lokal setempat. Pada awal Tahun 2013 Telah di tempatkan transmigran baru di SP-5 sejumlah 400 KK. Pada awal Tahun 2014 juga telah ditempatkan transmigran baru di SP-5 A salimbatu dan SP 9 sepunggur. Luas lahan sawah yang telah dicetak dan sudah berproduksi seluas 1.024 Ha. Direncanakan untuk lokasi SP-3 dan SP-6 seluas  $\pm$  3.000 Ha direncanakan pengelolaannya kepada PT. Sang Hyang Sri. Air sungai kayan membawa unsur hara Ca (6,6 mg/l), Mg (10 mg/l), K (4,5 mg/l) dan Na (20 mg/l), air sungai kayan dengan pH 6. Tak ada senyawa kimia beracun pada air Sungai Kayan Luas areal Land Unit-I di SP-3 dan SP-4 : 2.935,69 ha. dan SP-5 dan SP-6: 2.377 ha atau totalnya: 5.312,69 ha. Untuk Land Unit IV luasnya di SP-3 dan SP-4 adalah: 553.44 ha dan yang berada di SP-5 dan SP-6 seluas 1.863 ha atau totalnya : 2.416,44

#### **8. Pola Kelembagaan Kemitraan Agribisnis Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)**

Secara operasional, bentuk kelembagaan agribisnis pengembangan sektor unggulan kawasan food estate merupakan suatu terobosan struktural yang tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, otonomi, sinergis dan jejaring antar stakeholder tetapi lebih dari itu kelembagaan itu ingin mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan power sharing. Strategi pengembangan komoditas unggulan kawasan food estate ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha,



nilai dan mutu produk serta pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan teknologi pertanian di era globalisasi, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bulungan kedepan mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan sistem kerjasama dengan pihak swasta;
- b) Meningkatkan produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan didalam negeri, dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional serta memanfaatkan peluang pasar;
- c) Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha yang efisien melalui pengembangan sistem dan perusahaan agrobisnis;
- d) Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan food estate yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Pengembangan Food Estate yang dilakukan di Delta Kayan Food Estate saat ini telah dilakukan PT. Miwon dengan pola kemitraan dengan warga transmigran di Tanjung Buka untuk penanaman sejumlah komoditi, yakni Padi, Jagung, Kedelai dan lainnya. Sedangkan PT. NAM/Solaria Group menampilkan ujicoba pola pertanian terpadu (integrated farming system). Pada areal petak persawahan 18 x 600 meter ditanami padi, sementara di areal yang sama di persawahan itu dibuat kolam mengitari padi, dan di sana ditebar benih ikan patin dan nila. Selain memberikan hasil panen tambahan dari ternak ikan yang ditebar, ikan-ikan tersebut juga

dapat memakan kuman-kuman penyakit yang mungkin datang menyerang tanaman padi sehingga produksi padi diharapkan bisa meningkat.

## 9. Upaya Modernisasi Pertanian dalam Pengembangan Food Estate

Pertanian masa depan, lebih bersifat modernisasi pertanian dan bukanlah profesi yang selalu berkonotasi dengan cangkul dan kotor. Generasi muda bisa menjadi petani sukses di masa depan. Pengembangan pertanian kedepan, bukan hanya dibatasi akan memproduksi produk mentah (raw material) saja, tetapi akan menjadi pusat agroindustri yang akan mengarah pada industrialisasi dan modernisasi pertanian, manufacturing dan nilai tambah produk. Secara berkelanjutan ini akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan petani. pengembangan sektor pertanian akan menjadi primadona para investor apabila dikelola dengan baik. Gejala ketertarikan untuk melakukan investasi dan pengembangan food estate itu mulai terlihat. Sejumlah investor melihat potensi besar di sana. PT. Sang Hyang Seri (SHS), salah satu BUMN, PT. Miwon dan PT. Nusa Agro Mandiri (NAM) - Solaria Group adalah diantara perusahaan yang tertarik. Kawasan yang diminati adalah kawasan Delta Kayan Food Estate, di Bulungan. Estimasi lahan yang bisa digunakan di kawasan ini adalah sekitar 30.000 hektare. Terdiri dari sebelah utara Tanjung Buka (8.000 hektare), Tanjung Buka (10.000 hektare) dan sebelah selatan Tanjung Buka (12.000 hektare). Ujicoba penanaman padi, jagung, kedelai dan tanaman lainnya sudah dilakukan

dan menunjukkan hasil yang baik. Kesuburan tanah cukup baik dan ketersediaan air cukup. Konsep pengembangan Food Estate secara langsung akan memberikan keuntungan kepada petani antara lain mendapatkan kepastian pasokan, sarana produksi (pupuk, benih dan obat-obatan), kepastian permodalan dan terjaminnya pemasaran hasil produksi. Program ini akan memacu kemampuan petani dengan peningkatan pengetahuan, teknologi dan sekaligus mengubah pandangan petani sebagai profesi yang prestisius. Dan jika program DeKaFE berjalan dengan baik yang didukung dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, sebab ketahanan pangan sudah terbangun baik di Kalimantan Utara dengan program Food Estate.

#### **10. Kawasan Food Estate sebagai Penopang Ketahanan Pangan Nasional**

Pertanian yang cerah akan menjadi institusi negara. Hal itulah yang paling berharga dibandingkan dengan yang lain. Pertanian yang cerah akan membawa kita bersama mendapatkan banyak hal dan sebagai penolong yang lebih baik dari pada yang lain.” (Abraham Lincoln, Presiden USA 1861-1865). Dalam rangka mengupayakan ketahanan pangan Indonesia untuk jangka panjang, Departemen Pertanian merencanakan program Food Estate di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu dan Propinsi Kalimantan Utara sekarang. Dalam program ini, Kementrian Pertanian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan akan memberdayakan lahan-lahan potensial di Kabupaten Bulungan yang belum

tergarap untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan. Agribisnis yang akan dikembangkan diantaranya padi, jagung, kedelai.

Program ini diharapkan tetap memperhatikan petani kecil sehingga kekhawatiran munculnya feodalisme dapat dihindari. Sudah dapat diprediksi bahwa ke depan kebutuhan pangan untuk penduduk dunia terus meningkat sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. di lain pihak, kapasitas memproduksi pangan mengalami perlambatan disebabkan faktor-faktor bersifat global antara lain perubahan iklim dan degradasi lahan. Kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan pangan, baik pada level nasional, regional maupun internasional apabila tidak diantisipasi secara dini dapat memunculkan kerawanan pangan yang pada gilirannya dapat menimbulkan gejolak sosial. Alih fungsi lahan pertanian telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lahan pertanian pangan khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Untuk mengimbangnya, tentu perlu terus dilakukan perluasan areal pertanian di luar Pulau Jawa khususnya ke Indonesia Bagian Timur. Salah satu alternatif lokasi yang sangat potensial untuk perluasan areal pangan adalah kawasan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Bulungan seluas 18.010,50 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 162.563 jiwa (BPS Kab.Bulungan), memiliki sejumlah keunggulan, baik ditinjau dari aspek geoekonomi maupun geostrategi yang mempunyai nilai ekonomi dan daya saing internasional cukup tinggi khususnya sebagai sentra nasional bahkan internasional produksi pangan

dan energi terbarukan. Untuk masa depan cadangan pangan dan energi bangsa, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Salah satu kabupaten yang akan dikembangkan menjadi lumbung padi adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota provinsi dengan luas 18.010,50 km<sup>2</sup> memiliki beberapa daerah yang berpotensi dikembangkan sebagai daerah irigasi. Dengan curah hujan 2654,6 mm/tahun dan kesuburan tanah tinggi dapat diprediksi bahwa Bulungan akan menjadi sentra pangan provinsi Kalimantan Utara. Ironi sebagai negara agraris mendorong Pemerintah menargetkan berswasembada beras di Tahun 2017. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan program Food Estate. Dan diharapkan dapat menjadi pioner Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang pangan dan energi alternative. Perencanaan Food Estate merupakan salah satu bentuk perencanaan tata ruang wilayah untuk sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah produksi dari sektor pertanian yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, perlu dikembangkan komoditas pertanian unggulan dan komoditas penunjangnya, yang diusahakan dalam suatu Sentra Produksi dan didukung pula oleh sentra pengolahan dan sentra perdagangannya, mulai dari yang berskala kecil (mikro) hingga berskala besar (makro), sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta pemerataan kegiatan ekonomi wilayah. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya wilayah secara optimal dan lestari.

Prasyarat penunjang kegiatan perencanaan Food Estate adalah tersedianya informasi tentang penataan ruang dan kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian serta perencanaan pengembangan prioritas kawasan Food Estate di Kabupaten Bulungan. Informasi tentang potensi tenaga kerja siap pakai di wilayah, tidak hanya terampil tetapi memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berusaha agribisnis. Areal produksi dan pengolahan hasil produksi dalam rangka mendukung peningkatan usaha agribisnisnya. Tersedianya informasi tentang kemudahan dan fasilitas bagi investor dalam pengembangan Food Estate. Sarana jasa pelayanan lembaga keuangan dan sistem informasinya mengenai kendala dan persoalan dalam upaya pemberdayaan kegiatan usaha agribisnis. Tersedianya sistem informasi pasar dalam meningkatkan daya jual hasil-hasil produksi komoditi dengan harga yang layak. Sistem transportasi dan pola aliran barang dari sentra produksi ke penyimpanan sementara, ke tempat distribusi barang hingga sampai ke tempat tujuan, maupun pasar sebagai konsumen akhir. Untuk mengelola kawasan Food Estate sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat diperlukan masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Bulungan, pendekatan wilayah yang dilakukan dalam pengembangan lahan pertanian adalah melalui penetapan Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP) dalam rangka efisiensi pemanfaatan lahan maupun pelayanan sarana dan prasarana.

Pengembangan Food Estate di Kabupaten Bulungan mempunyai peran penting dalam meningkatkan peluang lokasi investasi bagi swasta dalam mencapai efisiensi, efektivitas dan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan. Sejalan dengan pendapat Presiden Abraham Lincoln diatas bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara berkembang termasuk Indonesia. Penyediaan pangan yang dapat diakses oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau sangat penting bagi terciptanya ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

#### **11. Reorientasi Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate**

Terdapat tiga sisi yang perlu dibenahi untuk percepatan DeKaFE yaitu investor, pemerintah dan masyarakat. Dari sisi investor, masih terdapat perbedaan pandangan dengan Pemerintah, dimana sebagian besar meminta Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar. Sebaliknya, Pemerintah mengharapkan investor membangun infrastruktur dasar seperti pelabuhan, sedangkan jalan dan jembatan dialokasikan dari anggaran negara. Perbedaan inilah yang menyebabkan sebagian investor menunda investasinya. Selain menghadapi kendala infrastruktur, investor masih berhadapan dengan birokrasi perijinan yang panjang, koordinasi program, dan persoalan lahan yang rumit.

UU 18/2012 tentang Pangan memberikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pangan. Sejalan dengan regulasi tersebut Pemerintah pusat perlu membentuk Badan Otorita Food Estate

(BOFE) untuk mempercepat pembenahan di sisi investor dan juga pemerintah. Dasar hukumnya adalah UU no 25/2007 tentang penanaman modal, UU 39/2009 Regulasi lintas sektoral terkait legalitas lahan, perijinan, dan jaminan keberlangsungan usaha, lebih mudah ditangani. Selain itu, insentif percepatan investasi yang diberikan kepada swasta berupa insentif fiskal, keringanan bea masuk, dan pengurangan pajak menjadi lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Pembenahan mendesak perlu disegerakan pada sisi masyarakat agar lebih siap menerima.

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Implementasi Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE)**

Implementasi kebijakan merujuk kepada Tangkilisan (2003) yang menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 490/K-VI/520/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penetapan Kawasan



Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kabupaten Bulungan seluas 50.000 Ha dimana sebagian besar areal  $\pm$  30.000 Ha merupakan lahan pasang surut dengan jenis tanah aluvial yang sangat subur dan seluas 10.000 Ha dicadangkan untuk Lahan Transmigrasi (SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8). terkait dengan penetapan kawasan tersebut maka untuk regulasi, menyusun perencanaan dan pelaksanaan program food estate serta membangun infrastruktur maka perlu di tetapkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 431/K-VII/050/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang pembentukan Kelompok Kerja Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, dengan pertanyaan tentang sejauhmana Implementasi kebijakan food estate menemui kendala terutama terkait efektifnya kinerja stakeholder yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan, seperti yang dikatakan informan yaitu bapak Drs. Muhammad Isnaini, sebagai berikut :

“Kuncinya kembali ke kita, apabila kita kurang greget dan kurang serius maka food estate dalam hal ini tidak akan bisa jalan. lima tahun terakhir katakanlah kita belum optimal, tetapi bukan berarti tidak ada apa-apanya cuma masih banyak yang belum dan mesti dilengkapi.” (wawancara tanggal, 30 Oktober 2015 - SD.W.03.01)

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, seperti yang dikatakan informan yaitu bapak Ir. H. Muhammad Iqbal, M.Si, sebagai berikut :

“Stake holder tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kecuali pihak investor dalam menanamkan investasinya ke lahan transmigrasi, untuk memudahkan akses transportasi dari Dinas Perhubungan masih mencari tempat untuk memasarkan hasil pertaniannya sehingga membutuhkan pelabuhan atau jembatan”. (wawancaratanggal, 13 Oktober 2015 – SD.W.04.01).

Dari paparan tersebut diatas, bahwa implementasi pengembangan Delta Kayan Food Estate telah dilakukan di desa Tanjung Buka dengan penetapan kawasan seluas 10.000 Ha khususnya di SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8. Dengan adanya pola kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat petani, Pemerintah Daerah menawarkan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidang pangan yaitu padi, kedelai dan jagung. Akan tetapi, guna mendukung dan untuk memudahkan proses dalam memasarkan produk pertanian dibutuhkan regulasi dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk akses transportasi seperti semenisasi atau pengaspalan jalan, pelabuhan atau jembatan penghubung ke kota terdekat, seperti yang diketahui desa Tanjung Buka di kelilingi oleh sungai-sungai kecil dan hal itu belum terwujud hingga sekarang. Selama lima tahun terakhir ini program yang dilaksanakan belum optimal terkait pengembangan food estate, dikarenakan belum maksimalnya stakeholder yang terkait dalam Pokja untuk berpartisipasi mensukseskan program pengembangan food estate.

Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang

bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Terkait uraian tersebut, peneliti ingin mengkaji tentang Implementasi kebijakan Pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini, sejauh ini apakah sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien), baik dilihat dari sikap dan kemauan Instansi atau SKPD maupun dari Masyarakat Petani di desa Tanjung Buka. Sebagaimana komentar Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan bapak Drs. Syafril menyatakan bahwa :

“Menurut saya sudah sesuai, walaupun perhatian pemerintah agak menurun terhadap hal ini, maka kedepannya perlu di gerakkan, di tingkatkan dan dikembangkan lagi.”(Wawancara, tanggal 21 Oktober 2015-SP.W.01.03).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan, bapak Drs. Muhammad Isnaini memaparkan, sebagai berikut :

“belum memenuhi harapan tetapi selama saya di bappeda saya akan coba dan mengajak serta komit dengan pembangunan daerah terutama sektor pertanian, karena ini merupakan nyawa kita dan harus sinkron dengan pembangunan provinsi. Kita tidak akan pernah mendapatkan bantuan APBN kalo program kita tidak selaras dengan program nasional, ini lah peluang sudah menetapkan program food estate secara nasional, kalo kita menyusun ini dalam suatu program yang terencana baik, tentu kita akan menawarkan ke pusat, pusat akan menyclaraskan apa yang akan kita buat terkait program food estate, hal itu yang belum kita fikirkan. maka kita perlu rapat terpadu dengan moment kepala daerah yang baru dan bappeda akan menyiapkan hal-hal yang baru dengan subsidi dari APBN dan APBD. Kondisi ideal food estate harus terbangun dengan baik.” (Wawancara tanggal, 30 Oktober 2015 – SP.W.03.03)

Dari paparan tersebut diatas, bahwa implementasi pengembangan food estate yang dilaksanakan selama ini belum memenuhi harapan, hal ini disebabkan perhatian pemerintah agak menurun sehingga kedepannya perlu perlakuan khusus dalam membangun kawasan food estate ini agar lebih fokus guna mewujudkan kawasan agro bisnis, agro industry dan agro wisata. Untuk mewujudkannya, program food estate ini harus selaras dengan program nasional untuk mendukung keberhasilan swasembada pangan, maka stakeholder harus berinovasi dalam merencanakan hal-hal yang baru, bekerja sama dengan pusat untuk memperoleh subsidi dari APBN dan memperlihatkan aksi kinerja yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya, dengan pertanyaan sejauhmana komunikasi intensif antara tim POKJA Food Estate dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan food estate kepada petani terutama yang berada di desa Tanjung Buka. Berkaitan dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, bapak Drs. Syafiril, menyatakan bahwa :

“Belum banyak saya ketahui tentang program ini, tetapi secara garis besarnya apabila food estate ini telah dilakukan dan berjalan berarti perlu adanya komunikasi yang intensif antara Tim Pokja dan PPL walaupun belum maksimal.”(Wawancara, tanggal 21 Oktober 2015-KOM.W.01.03).

Asisten I Setda Kabupaten Bulungan, bapak Ir.H.Muhammad

Idehan,M.Si, menjawab :

“PPL sudah tau kalau kita melakukan kegiatan masing-masing dengan lokus dan fokus yang sama, berarti komunikasi sudah dikembangkan”. (Wawancara, tanggal 19 Oktober 2015-KOM.W.02.03)

Kemudian bapak Ir.H.Muhammad Iqbal,M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Bulungan, berpendapat bahwa :

“Seharusnya ada kegiatan rutinitas sekali sebulan sekaligus mengevaluasi apa yang ingin dibuat, bagaimana pendapat masyarakat, harapan-harapan investor sehingga perlu ada informasi-informasi guna mengembangkan food estate ini.” (Wawancara, tanggal 13 Oktober 2015 – KOM.W.04.03).

Dari beberapa paparan informan, jelas bahwa untuk terlaksananya pembangunan, pengembangan food estate di desa tanjung buka perlu adanya pertemuan untuk melakukan komunikasi yang intensif dalam mengevaluasi kinerja, sejauh mana hasil pelaksanaan di lapangan dan untuk mengetahui harapan-harapan masyarakat petani agar mencapai manfaat.

Hasil wawancara terkait pertanyaan tentang struktur birokrasi yang ada, telah efektifkah bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate. Menurut Drs.Muhammad Isnaini selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan, berpendapat yaitu :

“Kembali ke pokja, perlu adanya pengkajian evaluasi tentang kinerja pokja lintas sektoral untuk mengetahui kinerja yang mana yang belum optimal, bisa disusun melalui dinas pertanian, karena ada bagian-bagian yang secara program di evaluasi terkait yang

mana yang belum maksimal, yang mana yang sudah dan mana yang belum pasti akan kelihatan. sehingga akan terevaluasi dengan sendirinya, siapa yang kerja dan siapa yang belum.” (Wawancara, tanggal 30 Oktober 2015-SB.W.03.01).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Bapak Ir.H.Muhammad Iqbal,M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, yaitu :

“Cukup efektif karena masyarakat sebagai penerima kebijakan sudah merasakan dan skpd sebagai pembuat kebijakan sudah melaksanakan.”(Wawancara, tanggal 13 Oktober 2015-SB.W.04.01).

Dari paparan informan dapat dijelaskan bahwa struktur birokrasi yang ada sudah efektif karena masyarakat sebagai penerima kebijakan sudah merasakan dan SKPD pembuat kebijakan sudah melaksanakan. Akan tetapi, hal ini perlu evaluasi pengkajian kinerja terkait hasil pelaksanaan dilapangan. Apakah sudah memberikan manfaat dan kontribusi bagi pemerintah daerah, apakah sudah berhasil pembangunan pengembangan food estatanya di desa tanjung buka.

## **2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengembangan Delta Kayan Food Estate.**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan terpenting dari suatu kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah. Implementasi kebijakan adalah merupakan proses dimana suatu kebijakan dilaksanakan melalui program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang menentukan dalam implementasi kebijakan pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFe) di Kabupaten Bulungan adalah meliputi dari

komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Untuk jelasnya faktor-faktor ini dideskripsikan melalui uraian berikut :

**(a). Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor pertama dan utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang dilaksanakan (Edwards III, 1984).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap aparat/birokrat penentu dan pelaksana kebijakan Food Estate Delta Kayan diperoleh hasil bahwa wadah komunikasi yang disediakan berupa kelembagaan POKJA Food Estate Delta Kayan yang ada dan merupakan wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Food Estate Delta Kayan yang mendukung berjalannya implementasi, berjalan kurang efektif sehingga perlu diadakannya perubahan dan modifikasi pola-pola komunikasi antar pengambil kebijakan yang tergabung dalam POKJA Food Estate Delta Kayan hingga ketingkat implementator (PPL/THL-TB) terutama tentang sosialisasi, tindak lanjut dan kejelasan program Food Estate Delta Kayan, yang disebabkan perubahan dan pemindahan

personil yang ada dalam POKJA. Sesuai dengan hasil wawancara diperoleh bahwa :

“Efektifitas dan efisiensi komunikasi POKJA Food Estate perlu diadakan modifikasi dan perubahan, ada kecenderungan berjalan stagnan dan belum adanya kebijakan yang mengikat setiap SKPD yang tergabung dalam POKJA untuk berperan aktif dan kontinyu melakukan sosialisasi dan kejelasan dan penajaman program sesuai dengan perencanaan awal ketingkat implementator/petugas lapangan.”(SD.W.05.02).

Disamping komunikasi yang terjadi di tingkat aparat pelaksana, komunikasi terjadi pula pada tingkat kelompok tani yang tergabung dalam GAPOKTAN. Dari hasil wawancara mendalam pada ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) diperoleh hasil bahwa aspek komunikasi yang dijalankan oleh GAPOKTAN sebagai koordinator dan penanggungjawab kelompok dituntut untuk mampu menyampaikan aturan dan petunjuk teknis yang telah diterimanya dari petugas teknis (PPL/THLTB), kepada seluruh anggota kelompoknya berjalan dengan baik dan masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal intensitas dan frekwensi komunikasi, baik secara formil dan non formil. Dalam hal ini pada GAPOKTAN telah terjadi komunikasi dua arah yaitu komunikasi antara ketua kelompok tani dengan anggota kelompoknya dan sebaliknya. Apabila terjadi persoalan yang menyangkut pengajuan proposal bantuan, serangan hama dan masalah lainnya di dalam kelompok tani, maka peran seorang ketua kelompok sangat menentukan berhasilnya implementasi kebijakan Food Estate di Bulungan.



Komunikasi lainnya yang harus lebih ditingkatkan lagi meskipun telah dilakukan komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan. Realitas empirik menunjukkan bahwa, Dinas Pertanian dan BPPKP di tingkat kabupaten senantiasa melakukan komunikasi dengan aparat pelaksana di tingkat lapangan. Komunikasi ini biasanya terjadi pada saat ada kegiatan pengembangan bantuan berupa CPCL, pertemuan rutin setiap bulan, evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh aparat pelaksana selama satu bulan. Kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dapat membantu pencapaian tujuan kebijakan publik khususnya kebijakan Food Estate Bulungan. Komunikasi yang terjadi antara ketua Gapoktan dan anggota kelompok Tani di wilayah Delta kayan Food Estate utamanya pada wilayah pemukiman transmigrasi, SP.1, SP.2 dan SP.7 menurut hasil wawancara peneliti lebih baik bila dibandingkan dengan komunikasi yang terjadi di Wilayah SP-8. Setelah diamati lebih mendalam, ternyata ketua GAPOKTAN pada wilayah SP.1, SP.2, dan SP.7 dianggap oleh masyarakat tani di wilayahnya mampu memberikan pola komunikasi yang lebih efektif, bersahabat dan siaga. namun hal ini juga didukung oleh pengurus dan anggota kelompok tani selalu mempunyai keinginan dan kepedulian terhadap kemajuan kelompok tani. Disamping itu tingkat pendidikan dan responsivitas masyarakat lebih baik, sehingga mendorong terjadinya komunikasi yang lebih baik. Bahkan kelompok tani selalu mengadakan inisiatif untuk mengadakan komunikasi dengan

aparatus pelaksana di tingkat Kabupaten, terutama dalam pertemuan rutin kelompok tani meskipun aparat pelaksana kebijakan belum menemukan pola berkomunikasi yang efektif dengan pengurus dan anggota kelompok tani yang ada di SP.2 dan SP.7, sesuai dengan hasil wawancara bahwa:

“Komunikasi ditingkat Gabungan Kelompok Tani, PPL dan Dinas Pertanian berjalan efektif, namun masih tetap terus ditingkatkan lagi harus saling sinergis, sosialisasi tentang Food Estate harus jelas.”(KOM.W.03.02).

Kondisi sebaliknya terjadi dalam komunikasi kelompok tani yang ada di wilayah pemukiman SP-8. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi menyebabkan pengurus kelompok tani enggan bahkan tidak mengadakan komunikasi dengan aparat pelaksana kebijakan ditingkat kabupaten. Namun berdasarkan pengamatan lapangan wilayah SP-8 merupakan wilayah baru transmigrasi dan aparat pelaksana kebijakan (PPL) yang ada juga masih baru dan dalam tahap intensif anjungsana, namun hal ini kemungkinan juga disebabkan luasan wilayah SP-8 yang begitu besar dan tingkat mobilisasi aparat terbatas karena seorang wanita. Hal ini mempengaruhi aktivitas kelompok tani, sehingga informasi yang seharusnya diketahui oleh pengurus dan anggota kelompok tani tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya perkembangan kelompok tani menjadi kurang baik. Dengan demikian, masih perlu diadakan pembinaan kepada kelompok tani di dua wilayah pemukiman tersebut, sehingga lebih termotivasi untuk melakukan

komunikasi dan senantiasa mengembangkan kelompok taninya. Perkembangan kelompok tani ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan petani penerima bantuan ternak dan masyarakat pada umumnya.

#### **(b) Sumber Daya**

Sumberdaya adalah ketersediaan sumber daya manusia berupa aparat pelaksana kebijakan dan sumberdaya lainnya yang dapat menunjang implementasi kebijakan publik. Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara terhadap Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) terkait aspek sumber daya diketahui bahwa, sumberdaya yang terdiri dari staf atau aparat pelaksana baik petugas teknis, (PPL/THL-TB, Kelompok Tani, Wanita Tani dan Petani swakarya) yang telah melaksanakan tugasnya tetapi masih belum optimal, masih dibutuhkan adanya upaya peningkatan sarana dan prasana pendukung berjalannya kegiatan Food Estate Delta Kayan, yang mendukung implementator berjalan secara efektif seperti tersedianya Akses transportasi jaringan jalan, listrik Desa, lembaga keuangan desa dan pasar desa. Namun sumber daya lainnya berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat pelaksana juga sangat berperan dan menunjang dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha tani utamanya Food Estate di Bulungan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, menunjukkan bahwa perbedaan tingkat keberhasilan dalam pengembangan usaha tani sangat terkait dengan peran pengurus kelompok tani. Dari empat wilayah pemukiman transmigrasi (SP-1,2,7 dan SP-8) yang menjadi sasaran kegiatan Delta Kayan Food Estate ternyata pengurus kelompoknya mempunyai karakteristik yang berbeda. Rata-rata pengurus kelompok tani yang berhasil adalah yang berasal dari kelompok tani di SP-1 dan SP-2, dan SP-7. Pengurus kelompok tani di Kecamatan ini terdiri dari petani baik laki-laki maupun perempuan yang sebagian besar merupakan petani yang sudah berpengalaman dalam berusaha tani dan memelihara ternak secara kecil-kecilan dan sudah terbiasa dari pulau Jawa, sebelum petani tersebut ikut program transmigrasi ke Kalimantan Utara. Disamping itu, pengurus kelompok tani di Wilayah tersebut cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

“Kami sudah bertani sejak kecil atau kurang lebih 25 tahun dan kami memiliki kelompok tani dengan struktur organisasi yang baik dengan program kerja, pelaksanaan tanaman pangan masa tanam 1 dan masa tanam 2, penanaman masa bero pangan dan hortik.” (SD.W.03.01).

Beberapa pengurus kelompok tani yang mengalami tingkat keberhasilan adalah lebih didominasi oleh anggota perempuan dan laki-laki usia produktif. Dari hasil wawancara mendalam peneliti, ternyata perempuan cenderung lebih sabar dan lebih fokus dalam mengembangkan usaha tani dan hasil olahannya sedangkan pemuda

usia produktif lebih terbuka dalam menerima masukan inovasi teknologi. Hal ini sangat nampak pada kegiatan kelompok tani berupa pertemuan rutin yang diadakan setiap bulan sekali. Pertemuan rutin menjadi wadah untuk menampung permasalahan yang terjadi pada anggota kelompok, disamping juga dapat mengembangkan inovasi kelompok dalam menangani masalah yang terjadi.

Kondisi yang berbeda terjadi di Wilayah SP-8 yang merupakan daerah pemukiman yang baru dibuka dengan intensitas aparat pelaksana (PPL) yang terbatas dan kebanyakan terdiri dari petani lokal. Pengurus kelompok tani kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan kelompok taninya. Ilmu dan teknik pertanian yang biasanya dipakai adalah warisan dari orang tua petani, sehingga tidak dapat menunjang pengembangan usaha tani. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari pengurus kelompok tani terutama dalam memotivasi anggota kelompok agar lebih aktif dalam kegiatan kelompok. Sesuai dengan hasil wawancara :

“Tingkat pendidikan masyarakat SP-8 masih cukup memprihatinkan, sebagian besarnya tamat SD dan tidak tamat SD, selebihnya lulusan sekolah menengah dan sebagian kecil dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.”(SD.W.04.01).

Dari kegiatan kelompok inilah diharapkan dapat ditemukan inovasi baru yang dapat dikembangkan oleh petani untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan usaha tani.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap aparat/birokrat penentu dan pelaksana kebijakan Delta Kayan Food Estate terhadap parameter sumber daya yang menentukan implementasi kebijakan DeKaFE dalam hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah pada prinsipnya mendukung penuh program Delta Kayan Food Estate, namun perlu adanya ketegasan tentang program yang akan mendukung penuh seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya Informasi.

**(c). Disposisi (sikap pelaksana);**

Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik. Menurut Metter dan Horn (1975) sikap penerimaan atau penolakan dari aparat pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan perlu dijalankan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan dengan cara mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Untuk itu dalam perekrutan aparat pelaksana kebijakan harus merekrut aparat yang memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan

untuk bekerja keras, sehingga tantangan yang ditemui dilapangan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian tujuan. Dari hasil wawancara mendalam, ternyata dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha tani, aparat pelaksana memiliki komitmen untuk betul-betul melaksanakan kebijakan dengan baik. Aparat pelaksana diberikan sejumlah hak berupa insentif, sarana pendukung lainnya (motor dinas) serta dan biaya perjalanan untuk melaksanakan tugas diseluruh wilayah Delta Kayan Food Estate (DeKaFE). Walaupun kondisi lokasi pengembangan usaha tani berada di wilayah yang tersebar dan cukup jauh dengan ditempuh perjalanan darat dan air serta sarana jalan untuk mencapai lokasi sangat sulit, namun aparat pelaksana tetap berusaha menjangkau lokasi tersebut untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Dari hasil wawancara mendalam, dapat menunjukan bahwa disposisi atau sikap dari aparat pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan usaha tani. Pengangkatan aparat pelaksana kebijakan haruslah aparat yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Disamping itu, disposisi bisa timbul dalam diri aparat pelaksana apabila dalam menjalankan tugasnya diberikan atau ditunjang dengan insentif sesuai dengan tugas yang dikerjakannya. Ketersediaan dana penunjang bagi aparat pelaksana untuk melaksanakan tugas mendorong aparat pelaksana untuk senantiasa aktif dan mempunyai

komitmen untuk betul-betul menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sesuai dengan hasil wawancara maka disposisi petani terhadap program DeKaFE

”Sikap sudah bagus, sudah dipahami, menyadari dan dimengerti bahwa kaltara merupakan baru dan SDM yang kurang akibat terpisahnya PPL ke BP2KP.”( SP.W.03.01)

**(d). Struktur Birokrasi;**

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi. Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka akan menghambat jalannya kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Edwards III (1984) mengemukakan dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi kearah yang lebih baik yaitu melakukan Standar Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan aparat pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran



tanggungjawab kegiatan atau aktivitas aparat pelaksana di antara beberapa unit kerja. Dari hasil pengamatan dan observasi lapangan menunjukkan bahwa, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) telah menyebarkan seluruh aparat pelaksana (PPL/THLTB) sesuai fungsi masing-masing diseluruh wilayah hamparan lokasi pengembangan usaha tani yang ada di Delta Kayan Food Estate (DeKaFE). Pembagian tugas kepada seluruh aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan proyek Putkati.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa, dukungan struktur organisasi yang tepat terutama Dinas Pertanian dan BP2KP sebagai leading sektor dalam menjalankan kebijakan publik sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan hasil wawancara :

”Khusus Dinas Pertanian sangat baik kecuali dinas lain, karena dinas pertanian semua diakomodir dan ditindak lanjuti benar2 sesuai dgn manfaat dan kebutuhan petani, PPL sebagai fasilitator dan sangat aktif walau tiap hari tidak masuk tapi sering komunikasi.”( SB.W.03.01) .

Walaupun tersedia sumberdaya yang diperlukan dengan komitmen untuk menjalankan kebijakan publik yang telah ditetapkan, namun kelemahan dalam struktur organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang begitu kompleks membutuhkan kerjasama antara para aparat pelaksana dan struktur

organisasi yang kondusif untuk menjalankan setiap tahapan kebijakan. Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan mengadakan koordinasi dengan baik.

Dukungan dari aparat birokrasi pemerintah dalam hal ini diwakili oleh tim POKJA Delta Kayan Food Estae (DeKaFE) dalam menjalankan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan usaha tani. Disamping itu, telah dilakukan fragmentasi yaitu pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh aparat pelaksana. Pendelegasian wewenang dibarengi dengan tanggungjawab dari aparat pelaksana kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan pengembangan Delta Kayan Food Estae (DeKaFE).

“Kinerjanya sudah baik, selaku gapoktan memberikan laporan ke PPL kadang bersama PPL dalam rembuk tani, diharapkan prosedur pelaporan juga lebih di tingkatkan lagi” (SB.W.02.02)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur organisasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan sudah tertata dengan baik, namun masih harus terus di optimalkan terutama efektifitas struktur organisasi POKJA DeKaFE, meskipun kemungkinan dibentuknya sebuah Badan/Lembaga/Unit Pelayanan Teknis Daerah

(UPTD) Delta Kayan Food Estate yang ada di wilayah pengembangan layak dipertimbangkan kedepan sehingga diharapkan implementasi kebijakan pengembangan menjadi lebih baik. Walaupun realitas empirik menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat keberhasilan pengembangan usaha tani di empat wilayah pemukiman SP1 sampai dengan SP8 sebagai salah satu lokasi pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE), namun hal ini tidak ditentukan oleh peran struktur organisasi formil yang ada. Hal ini secara umum lebih banyak disebabkan oleh masih belum aktifnya kelompok tani dalam menggerakkan pertemuan-pertemuan kelompok tani. Seharusnya pengurus dan anggota kelompok tani lebih aktif lagi menggerakkan kegiatan kelompok tani, sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan sesuai tujuan dari proyek Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani.

### **3. Model Strategi Pengembangan Delta Kayan Food Estate di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan**

Model Strategi yang dapat digunakan agar pengembangan Food Estate di Desa Tanjung Buka dapat terimplementasi dengan baik jika dilakukan beberapa langkah strategis diantaranya :

1. **Komunikasi**, bahwa untuk mencapai tujuan program pembangunan pengembangan kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) harus mempunyai kejelasan pencapaian tujuan yaitu penajaman program atau reorientasi pada program, rencana aksi, anggaran, sumber daya manusia

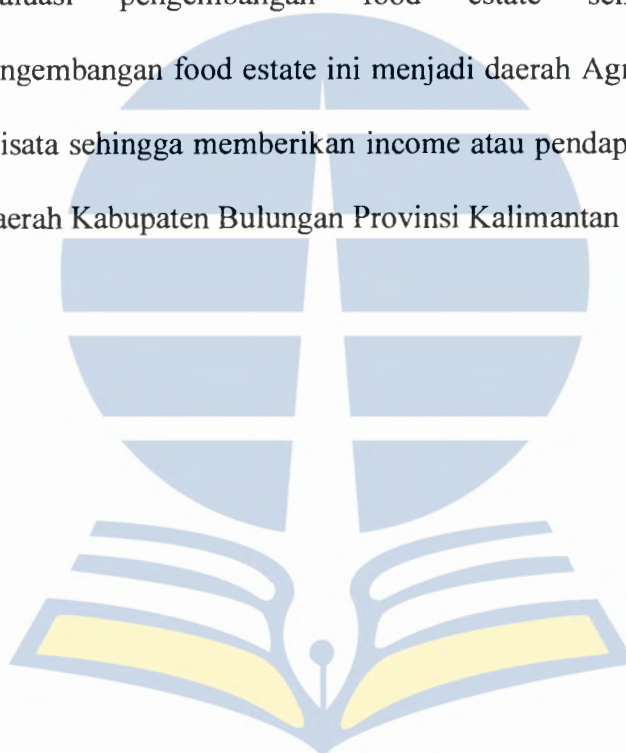
dan organisasi/Lembaga yang mempunyai Otoritas khusus yang menangani program dimaksud. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah penyusunan bersama sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pada alur penyampaian informasi terkait pengembangan food estate ini terutama pada aspek intensitas dan frekuensi komunikasi, pola pelaporan dan komunikasi serta sosialisasi kebijakan food estate baik dari Instansi Lintas Sektoral, Petugas Penyuluh Lapang (PPL) ke Masyarakat Petani. Penyampaian informasi ke masyarakat petani yang merasakan dampak langsung kebijakan food estate. Penyampaian informasi ke masyarakat petani di butuhkan dukungan dan kerjasama dua arah yang intens minimal 1 (satu) bulan sekali diadakan pelatihan, sosialisasi, rembuk tani, panen raya, penyuluhan dan Instansi Lintas Sektoral yang terkait di dalam program pengembangan kawasan food estate ini kiranya intens melakukan pertemuan Forum Lintas SKPD guna mengatur perencanaan, penganggaran, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan food estate, menyaring aspirasi masyarakat petani dan harapan-harapan investor guna mendukung keberhasilan pembangunan kawasan food estate di desa tanjung buka kabupaten bulungan;

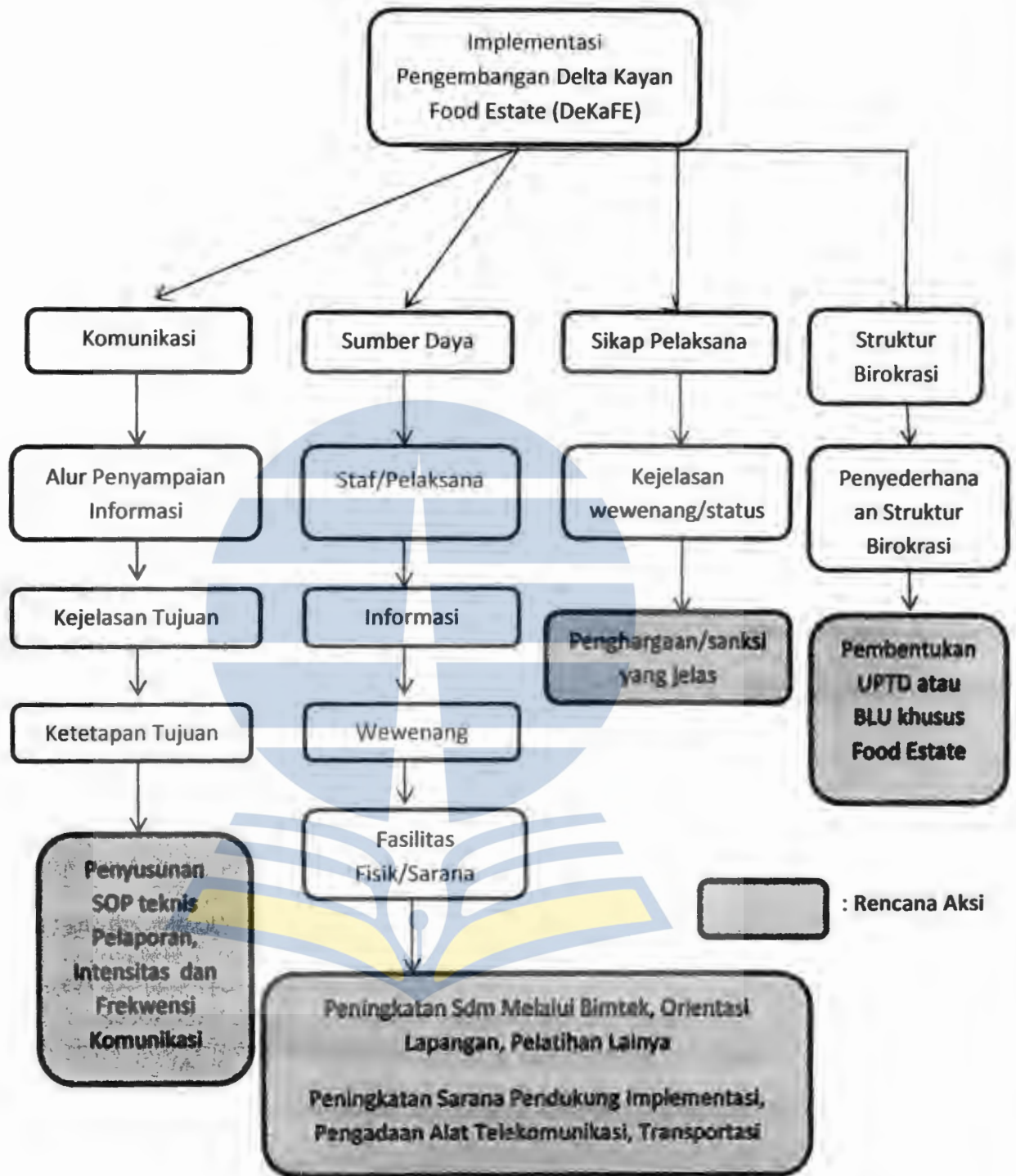
2. **Sumber Daya**, hal ini penting sekali guna mendukung tercapainya pembangunan kawasan food estate. Sumber Daya terkait pelaksana yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) nya, yang terdiri dari Pejabat Instansi Pemerintah yang terkait pembangunan pengembangan food estate, Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dan Masyarakat Petani.

Ketiganya harus saling bersinergi, berkoordinasi, konsisten, berkerjasama guna mensukseskan program ini. Harus saling memberikan informasi timbal balik terkait keinginan dan kebutuhan masyarakat petani. Kewenangan harus berjalan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Stake holder agar masyarakat petani dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya tepat sasaran dan bermanfaat terkait fasilitas fisik dan sarana dan prasarana sehingga diperlukan intensitas peninjauan di lapangan bagi SKPD terkait, pola-pola peningkatan SDM juga perlu dilakukan terutama peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang nilai tambah dan keuntungan food estate guna peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya petani setempat.

3. ***Sikap Pelaksana***, sikap, kemampuan dan kemauan yang teguh dari pelaksana baik itu SKPD, PPL dan Masyarakat Petani guna mensukseskan pembangunan pengembangan kawasan food estate ini, maka diharapkan ketegasan, dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah agar focus terhadap program ini, dengan pola nyata seperti adanya sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang jelas terhadap para implementor sehingga dapat lebih memacu memotivasi dalam melihat situasi dan kondisi kondisi sebenarnya seperti apa di lokasi pengembangan food estate yaitu di SP-1, SP-2, SP-7 dan SP-8, apa yang mesti dilakukan guna mewujudkan pembangunan kawasan food estate tersebut.

4. **Struktur Birokrasi**, perlu di bentuknya suatu organisasi/lembaga khusus guna mewujudkan pembangunan kawasan food estate ini misalnya Badan Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DekaFE), membuat Alur Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), Mengkaji secara khusus terkait Rencana Aksi Daerah (RAD), Anggaran Khusus, mempunyai otoritas dan membentuk tim khusus terkait evaluasi pengembangan food estate sehingga pengelolaan pengembangan food estate ini menjadi daerah Agro Industry atau Agro Wisata sehingga memberikan income atau pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.





Gambar 4.6 : Model Strategi Implementasi Pengembangan Food Estate Bulungan, 2015

### C. PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai inti atau pokok dari hasil penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya Implementasi Pembangunan Pengembangan Delta Kayan Food Estate di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 490/K-VI/520/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kabupaten Bulungan, dimana penetapan kawasan pengembangan food estate ini bertujuan untuk : 1). Mempermudah upaya koordinasi antar instansi lintas sektoral terkait dalam memfokuskan pembangunan dan pengembangan Food Estate di Kabupaten Bulungan 2). Mempermudah upaya pemantauan pemanfaatan ruang bidang pangan, sehingga mencegah terjadinya overlapping pemanfaatan ruang 3). Menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan investasi di bidang pangan dan menjadi katalisator mewujudkan kabupaten bulungan sebagai pusat Agroindustri yang maju.

Hasil Penelitian dalam tesis ini, didukung oleh data-data yang ditampilkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Data tersebut merupakan data yang diolah dari berbagai sumber, grafik, peta, tabel, maupun gambar. Penyajian data tersebut dapat didiskripsikan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan dapat menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan penelitian dan pembatasan masalah.



Berdasarkan Program Pemerintah Daerah guna mendukung program nasional yaitu swasembada ketahanan pangan maka terkait penetapan kawasan pembangunan dan pengembangan food estate kabupaten bulungan, maka diterbitkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 431/K-VII/050/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang pembentukan Kelompok Kerja Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan, dimana didalam nya terkait regulasi Lintas Sektoral kerjasama antar SKPD yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Bappeda Kabupaten Bulungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan dan instansi lainnya yang terkait.

Peran Pemerintah yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) begitu penting guna mendukung dan mensukseskan pembangunan pertanian di kawasan pengembangan food estate sebagai kawasan agroindustry. Berdasarkan pendapat Pejabat Pemerintah/SKPD yang terkait Kelompok Kerja (Pokja), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) tentang Kondisi Realisasi Empirik di Lapangan, ada beberapa variabel yaitu :

**a. Komunikasi**

1. KOM.W.01.03 : Sesuai tetapi belum optimal/maksimal,tetapi secara garis besarnya apabila food estate ini telah dilakukan dan berjalan berarti perlu adanya komunikasi yang

intensif antara Tim Pokja dan PPL walaupun belum maksimal (Sumber POKJA);

2. KOM.W.01.02 : Tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan, diharapkan apabila kegiatan menjadi suatu manfaat, seharusnya dimulai dari bawah terlebih dahulu, dilihat dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan, agar tepat sasaran dan diharapkan yang didengar adalah keinginan petani (Sumber PPL);

3. KOM.W.04.01 : Sesuai tapi belum optimal/maksimal, pelaksanaan pelatihan/sosialisasi tidak rutin, pelatihan yang telah dilaksanakan tentang pasca panen, pengolahan lahan, pembuatan pupuk organik, pestisida organik, sosialisasi ternak sapi/CPCL dan pelatihan dilaksanakan di balai/Aula dan Praktek di Lapangan (Sumber GAPOKTAN);

Dari data tersebut diatas, menunjukkan bahwa kondisi realisasi empirik di lapangan terkait komunikasi dengan informandari Pokja, PPL dan Ketua Gapoktan yaitu komunikasi harus secara intensif dilakukan antara Tim Pokja, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Masyarakat Petani guna mensukseskan pembangunan pengembangan kawasan food estate di desa tanjung buka kabupaten bulungan. Komunikasi harus dimulai dari bawah terlebih dahulu, guna untuk melihat dan menyesuaikan dengan keinginan, kebutuhan dan keadaan petani di lapangan, agar dapat menjadi manfaat

dan tepat sasaran. Diharapkan komunikasi yang intens dilakukan seperti pelatihan dan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja masyarakat petani terkait pembangunan pengembangan food estate di desa tanjung buka.

Komunikasi ini dianggap sangat penting, karena dalam setiap proses pelaksanaan suatu kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan saling berkaitan, sebagai berikut :

#### **b. Sumber Daya**

1. SD.W.04.01 : Sesuai tetapi belum optimal/maksimal, Stake holder tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kecuali pihak investor dalam menanamkan investasinya ke lahan transmigrasi, untuk memudahkan akses transportasi dari Dinas Perhubungan masih mencari tempat untuk memasarkan hasil pertaniannya sehingga membutuhkan pelabuhan atau jembatan (Sumber POKJA);
2. SD.W.03.05 : Sesuai tetapi belum optimal, Kesejahteraan petani ada peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan, sulit sekali bertahan hidup atau meningkatkan kesejahteraan dengan cara bercocok tanam dengan pangan apalagi dengan bukaan baru dan daerah pasang surut. Padi merupakan bahan baku pangan

dihitung untung tetapi melihat hasil jauh dari hal tersebut (Sumber PPL);

3. SD.W.04.09 : Tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan, organisasi gapoktan dan kelompok tani belum sejahtera, perlu fasilitasi dari pemerintah berupa insentif, secara umum kesejahteraan petani masih rendah (Sumber GAPOKTAN).

Dari data tersebut diatas, menunjukkan bahwa kondisi realisasi empirik di lapangan terkait sumber daya dengan informan dari Pokja, PPL dan Ketua Gapoktan yaitu perlu adanya akses transportasi dari Dinas Perhubungan berupa pelabuhan dan jembatan guna memasarkan hasil pertaniannya, untuk kesejahteraan masyarakat petani ada peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan, sulit sekali bertahan hidup atau meningkatkan kesejahteraan dengan cara bercocok tanam dengan pangan apalagi dengan lahan bukaan baru dan daerah pasang surut. Padi merupakan bahan baku pangan dihitung untung tetapi melihat hasil jauh dari hal tersebut. Perlu fasilitasi dari Pemerintah Daerah berupa insentif guna memberikan semangat atau motivasi dalam meningkatkan kinerja masyarakat petani guna pembangunan pengembangan food estate.

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan tidak terlepas dari sikap pelaksana, sebagai berikut :

### c. Sikap Pelaksana

1. SP.W.04.03 : Sesuai tetapi belum optimal/maksimal, sudah memenuhi harapan, hasil produksi sayur-sayuran sudah mulai bagus dan pemasaran sudah mencapai di daerah sekitarnya tetapi belum bisa bersaing dengan harga karena terkait ongkos angkut, kalau terkait SKPD belum memenuhi harapan sepenuhnya (Sumber POKJA);

2. SP.W.03.01 : Sesuai tetapi belum optimal/maksimal, Sikap cukup, dalam pelaksanaan belum maksimal, kemauan seharusnya mendengarkan dari bawah ke atas, selama ini dari atas ke bawah (Sumber PPL) ;

3. SP.W.04.01 : Sesuai tetapi belum optimal/maksimal, sikap dinas pertanian dan ppl kurang maksimal dalam melakukan pendampingan (Sumber GAPOKTAN).

Dari data tersebut diatas, menunjukkan bahwa kondisi realisasi empirik di lapangan terkait sikap pelaksana dengan informan dari Pokja, PPL dan Ketua Gapoktan yaitu sikap pelaksana di Dinas Pertanian, PPL dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sudah memenuhi harapan, ini dilihat dari hasil produksi sayur-sayuran sudah mulai bagus dan pemasaran sudah mencapai di daerah sekitarnya tetapi belum bisa bersaing dengan harga karena terkait ongkos angkut, kalau terkait SKPD/Pokjalainnya belum memenuhi harapan sepenuhnya. Sikap sudah sesuai tetapi dalam

pelaksanaannya belum maksimal, kemauan seharusnya mendengarkan dari bawah ke atas, selama ini dari atas ke bawah. Pendampingan Dinas Pertanian dan PPL ke Masyarakat Petani perlu ditingkatkan lagi.

Sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, harus saling bersinergis dalam suatu struktur birokrasi yang memberikan manfaat, sebagai berikut :

#### **d. Struktur Birokrasi**

1. SB.W.03.01 : Sesuai tetapi belum optimal/maksimal, untuk itu perlu pengkajian evaluasi tentang kinerja pokja lintas sektor untuk mengetahui kinerja yang mana yang belum optimal (Sumber POKJA);
2. SB.W.03.01 : Sudah sesuai tetapi belum optimal/maksimal, Pokja tidak tahu, sejauh ini yang sering berkoordinasi yaitu dinas pertanian, food estate seperti apa, programnya seperti apa PPL tidak pernah dilibatkan sama sekali, SD dan SMP yaitu dinas pendidikan, dinas pu dalam hal pembuatan kanal saluran primer dan skunder, pertanian tersier, Dinas Transmigrasi dengan menempatkan orang di tempat yang tidak nyaman, lahan belum siap, fasilitas tidak lengkap, harus siap menanam, dan mengakibatkan 20 kk sudah pergi karena akses jalan dan transportasi tidak bagus,

penerangan tidak ada, air bersih tidak ada (Sumber PPL);

3. SB.W.03.01 : Berjalan/sesuai dengan tujuan program, khusus dinas pertanian sangat baik kecuali dinas lain, karena dinas pertanian semua diakomodir dan ditindak lanjuti benar-benar sesuai dgn manfaat dan kebutuhan petani, PPL sebagai fasilitator dan sangat aktif walau tiap hari tidak masuk tapi sering komunikasi (Sumber GAPOKTAN).

Dari data tersebut diatas, menunjukkan bahwa kondisi realisasi empirik di lapangan terkait struktur birokrasi dengan informan dari Pokja, PPL dan Ketua Gapoktan yaitu bahwa perlu pengkajian evaluasi tentang kinerja pokja lintas sektoral untuk mengetahui kinerja yang mana yang belum optimal, sejauh ini yang sering berkoordinasi yaitu dinas pertanian, terkait food estate seperti apa, programnya seperti apa PPL tdk pernah dilibatkan sama sekali, yang pasti Dinas Pendidikan telah membangun SD dan SMP, Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pembuatan kanal saluran primer dan skunder, Dinas Pertanian saluran tersier, Dinas Transmigrasi dengan menempatkan orang di tempat yang tidak nyaman, lahan belum siap, fasilitas tidak lengkap, harus siap menanam, dan mengakibatkan 20 kk sudah pergi karena akses jalan dan transportasi tidak bagus, penerangan tidak ada, air bersih tidak ada. khusus dinas pertanian sudah melaksanakan dengan baik kecuali dinas lain, karena dinas pertanian semua diakomodir dan ditindak lanjuti benar-benar

sesuai dgn manfaat dan kebutuhan petani, PPL sebagai fasilitator dan sangat aktif walau tiap hari tidak masuk tapi sering komunikasi.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan hasil-hasil penelitian, berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian ini. Kesimpulan dan Saran yang dapat di berikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Implementasi pengembangan Food Estate di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan sudah di laksanakan masing-masing SKPD yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Delta Kayan Food Estate khususnya di SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8, guna mewujudkan program nasional yaitu meningkatkan sektor pertanian dalam hal swasembada pangan. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu menyusun kawasan pengembangan food estate dan membangun infrastruktur dimana telah tercantum dalam Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 490/K-VI/520/2011 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kabupaten Bulungan dan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 431/K-VII/050/2012 tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) pengembangan kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) Kabupaten Bulungan. Program Pengembangan Food Estate ini merupakan Kerjasama Lintas Sektoral yaitu saling bersinergi antar instansi, terkait terdiri dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang telah

mendatangkan masyarakat transmigrasi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk mengelola lahan pertanian dan pemukiman, Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan memberikan bantuan sarana produksi, pembinaan bidang pertanian, Cetak Sawah atau perluasan areal sawah, Optimalisasi Lahan, GP-PTT, Pengembangan Jaringan Irigasi, Dinas Pertambangan Kabupaten Bulungan membangun PLTD, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan membangun Infrastruktur Jalan dan Sungai, Pintu Air, Jalan Usaha Tani, dll, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan yaitu jembatan, Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Bulungan terkait pemasaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan telah membangun Sekolah Dasar dan SLTP, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan yaitu pembangunan Puskesmas Pembantu, semua sudah dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat petani. Implementasi pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini sudah memenuhi harapan baik bagi instansi maupun masyarakat petani tetapi belum maksimal, karena di lihat secara umum pengembangan food estate ini terkesan lambat walaupun arahnya untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan awal yaitu pembangunan pengembangan food estate. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar lintas sektoral, PPL dan Masyarakat Petani sehingga perlu aksi yang nyata, anggaran yang cukup, Sumber Daya Manusianya yang siap melaksanakan program dan penajaman program terkait pengembangan food estate.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan Food Estate di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan yaitu upaya mempertahankan eksistensi kegiatan Food Estate dan peningkatan pendapatan petani (serta pengentasan kemiskinan) dan hal ini di dukung dan diperkuat oleh 4 (empat) hal dalam teori Edward terkait implementasi kebijakan pada beberapa kegiatan dan program Delta Kayan Food Estate tersebut masih di hadapkan pada beberapa fakta diantaranya yaitu (1). Komunikasi yang berjalan belum efektif, dibutuhkan adanya peningkatan pada intensitas dan frekwensi komunikasi yang disepakati bersama dan terjadwal baik diantara tim POKJA, PPL, GAPOKTAN dan Kecamatan/Desa untuk mereview ulang kejelasan tujuan, ketetapan tujuan, alur komunikasi dalam sebuah standar operasi yang baku; (2). Sumber daya yang ada baik di tingkat POKJA, PPL, GAPOKTAN dan Kecamatan/Desa telah berjalan namun masih perlu ditingkatkan terutama pada sarana dan prasarana pendukung operasional implementator lapangan (PPL dan GAPOKTAN), perluasan kewenangan implementator, rasio perbandingan luasan wilayah dan implementator lapangan, peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi implementator; (3). Sikap Pelaksana yang terjadi pada program Food estate Bulungan, menunjukkan respon yang baik namun masih kurang antusias dalam mendukung terwujudnya Food Estate Bulungan; (4). Struktur birokrasi yang ada dalam mendukung kegiatan Food Estate seperti POKJA Food Estate masih berjalan kurang efektif, lebih

cenderung kaya struktur namun miskin fungsi, perlu dilakukan modifikasi dan reorientasi struktur birokrasi yang menunjang kegiatan Food Estate.

Model strategi Implementasi Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka, Reorientasi kebijakan pengembangannya Delta Kayan Food Estate hendaknya kembali diarahkan dan dipertegas dengan sebuah aturan yang baku, mulai dari level Standar Operasi Prosedur (SOP), PERDA atau Keputusan Bupati yang dimulai dengan pembuatan SOP pada aspek komunikasi, mempertegas kewenangan, sistem intensif/penghargaan dan sanksi bagi petugas/implementator pada aspek sikap, meningkatkan pola-pola pelatihan, bimtek, dan kelengkapan sarana pendukung pada aspek sumber daya, dan merampingkan struktur birokrasi yang menangani food estate, serta membantu semacam UPTD atau BLU yang khusus menangani Food Estate sehingga dengan demikian harapan meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan petani, memantapkan ketahanan pangan nasional, dan memacu gerak perekonomian desa dapat terwujud dalam waktu dekat.

#### B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan, berkaitan dengan Implementasi Pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan, dapat disampaikan dibawah ini.

Berkaitan dengan Komunikasi, bahwa komunikasi yang terjalin selama ini kurang efektif karena belum adanya sinergi antara SKPD selaku Pokja, PPL dan Masyarakat Petani, sehingga perlu adanya perubahan dan

modifikasi pola-pola komunikasi antar pengambil kebijakan yang tergabung dalam POKJA Pengembangan Delta Kaya Food Estate hingga ke tingkat implementator yaitu PPL dan Masyarakat Petani terutama tentang sosialisasi, tindak lanjut dan kejelasan program pengembangan Delta Kaya Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka. PPL dan Masyarakat Petani mengharapkan kepada SKPD selaku POKJA agar sering melakukan kunjungan ke lokasi dan berkomunikasi langsung kepada masyarakat petani yang berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan petani serta bagaimana kondisi di lapangan terkait pengembangan food estate di desa tanjung buka agar kebutuhan tepat sasaran dan target program dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan;

Berkaitan dengan Sumber Daya, Implementasi pengembangan Delta Kaya Food Estate (DeKaFE) di Desa Tanjung Buka bahwa kewenangannya sudah berjalan secara bertahap tetapi belum maksimal intinya masih belum efektif, hal ini di karenakan koordinasi antar pembuat kebijakan (SKPD/POKJA) dan penerima kebijakan (PPL dan Masyarakat Petani) belum saling sinergi. Sehingga perlu suatu aksi yang nyata dari stakeholder guna memberdayakan masyarakat petani terkait pengembangan food estate yaitu misalnya untuk Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan harus menyediakan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sesuai kebutuhan agar dapat membantu dan mempermudah petani dalam mengolah lahan pertanian agar efektif dan efisien, Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten

Bulungan memfasilitasi petani dalam hal pelatihan dan kemasan produk serta proses pemasaran hasil pertanian, dll.

Berkaitan dengan Disposisi (Sikap Pelaksana), hal ini belum efektif karena walaupun Stakeholder/SKPD/Pokja, PPL dan Masyarakat Petani sudah melaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing, tetapi laju dan lambatnya perkembangan food estate ini harus didukung oleh sikap dan kemauan untuk mengembangkan pembangunan food estate di desa Tanjung Buka dengan didukung anggaran yang tersedia. Masyarakat Petani mengharapkan kepada Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan agar dapat menyediakan atau memberikan insentif agar dapat memberikan semangat atau motivasi guna mensukseskan program pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka.

Berkaitan dengan Struktur Birokrasi, struktur organisasinya sudah berjalan tetapi belum efektif, dengan melihat pertimbangan di lapangan bahwa pembangunan pengembangan food estate ini harus di tingkatkan lagi dengan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) dan perlu kajian lebih khusus lagi terkait pengembangan food estate ini sehingga perlu di bentuk suatu wadah atau lembaga/badan khusus terkait pengembangan food estate dengan Otoritas, kewenangan dan anggaran yang dapat dikelola sendiri dan terevaluasi oleh badan pengembangan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anderson James E, 1999, *The Mercantilist Index of Trade Policy*," NBER Working Papers 6870, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Arifin, Bustanul. 2005. *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Charles.O.Jones,1991, *Pengantar Kebijakan Publik*, Alih Bahasa Dwi Joko Supriyono, Rajawali Press, Jakarta.
- Dye, Thomas R, 1996, *Understanding Public Policy*, New Jersey, Printice Hall.
- George.C.Edward,1980,*Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.
- Islamy, M Irfal,1997,*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*, Bumi Aksara, Jakarta
- M. Irfan Islamy 1997,*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mubyarto,1995,*Pengantar Ekonomi Pertanian*,PT. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI,Jakarta.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*,PT Elex Media Komputindo,Jakarta
- Partowijoto, 2003.*Peningkatan Produksi Sebagai Salah Satu Faktor Ketahanan Pangan*. Majalah Dunia Insiyur Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.
- PT. Trans Intra Asia, *Perencanaan Master Plan Delta Kayan Food Estate*, 2011, Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
- Roekasah Adiratma, 2004, *Memikirkan kondisi petani padi indonesia dan upaya meningkatkan kesejahteraannya*, Penebar Swadaya, Jakarta

- Rusastra I.W. B. R, dan S. Friyatno. 2004. Efisiensi dan Daya Saing Usahatani Palawija dalam Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Available from URL: <http://ditjenbun.deptan.go.id> di akses 4 September 2015.
- Samudra Wibowo, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siswanto, 2011, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta . Bumi Aksara.
- Subarsono.AG, 2011, *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, 2013, *Cara mudah menyusun skripsi, tesis dan disertasi*, Alfabeta, Bandung
- Tangkilisan.Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta
- Wahab, A.S, 1998, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW, Malang
- Winarno.Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta

### **Laporan-Laporan**

- Bupati Bulungan, 2012, *Laporan Program Inovasi Daerah Program Pengembangan sistem pertanian terpadu Delta Kayan Food Estate*, Kabupaten Bulungan
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Bulungan Dalam Angka Tahun 2015*, Kabupaten Bulungan



## **Jurnal**

Sukowati, Nurhayatin, Phasky (2013), *Jurnal Administrasi Publik : Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Darmawi, Edi, 2013, *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik : Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu

## **Website**

<http://m.merdeka.com/warta-negara/mewujudkan-ketahanan-pangan-dan-meningkatkan-kesejahteraan-tani-meningkatkan-kesejahteraan.html>, 2012, Kalimantan Timur

[http://www.bps.go.id/brs\\_file/leaflet-ntp-23okt02.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/leaflet-ntp-23okt02.pdf)

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010, Usaha Budidaya Tanaman.

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 490/K-VI/520/2011 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kabupaten Bulungan

Keputusan Bupati Bulungan Nomor 431/K-VII/050/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan Tahun 2012

## Lampiran I

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : NURMAWATI  
NIM : 500025084  
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)  
Tempat / Tanggal Lahir : Baratan / 03 November 1979

Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SDN 029 Tanjung Selor pada tahun 1991;
2. Lulus SLTP Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 1994;
3. Lulus SMU Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 1997;
4. Lulus Diploma Tiga (D3), Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia (ASMI) Tanjung Selor pada tahun 2001;
5. Lulus Strata Satu (S1), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjung Selor pada tahun 2005.

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 1998 s/d 2001 sebagai PTT di Kantor Perpustakaan Umum;
2. Tahun 2001 s/d 2013 sebagai Staf Pelaksana di Bagian Kesejahteraan Setda Kab. Bulungan;
3. Tahun 2013 s/d 2015 sebagai Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan di Dinas Pertanian Kab. Bulungan.

Riwayat Organisasi :

1. Tahun 2011 s/d 2013 sebagai Bendahara Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Bulungan;
2. Tahun 2010 s/d 2015 sebagai Bendahara GOPTKI Kabupaten Bulungan;
3. Tahun 2011 s/d 2016 sebagai Bendahara PPTI Kabupaten Bulungan;
4. Tahun 2011 s/d 2016 sebagai Bendahara Badan Hisab dan Rukyat Kabupaten Bulungan;
5. Tahun 2011 s/d 2016 sebagai Bendahara PC. Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulungan;

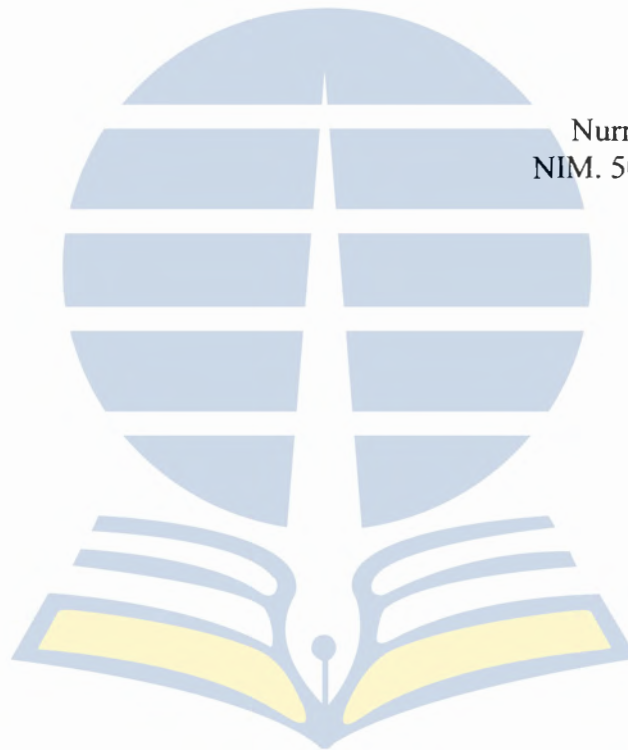
6. Tahun 2015 s/d 2020 sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan Wanita, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulungan.

Alamat Tetap : Perumahan Korpri Blok B2 No. 9 Jalan Jelarai Raya  
Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi  
Kalimantan Utara

No. Telp / HP : 085391944672

Samarinda, 04 Desember 2015

Nurmawati  
NIM. 500025084



## Lampiran II

**KONDISI REALISASI EMPIRIK DI LAPANGAN****A. SKPD yang terkait dalam Pokja**

Hasil Wawancara Kepala SKPD yang terkait dalam Pokja, 2015

NO	NARASUMBER	KOMUNIKASI			SUMBER DAYA							SIKAP PELAKSANA			STRUKTUR BIROKRASI		
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	2	3
1	Drs. Syafril																
	Sekretaris Daerah Kab. Bulungan	(+)	+	(+)	+	-	(+)	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	+	(+)	+
2	Ir. H. Muhammad Ideham, M.Si																
	Asisten I Setda Kab. Bulungan	+	+	+	+	(+)	+	(+)	+	+	+	(+)	+	+	+	+	+
3	Drs. Muhammad Isnaini																
	Kepala Bappeda Kab. Bulungan	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
4	Ir. H. Muhammad Iqbal, M.Si																
	Kepala Dinas Pertanian Kab. Bulungan	(+)	(+)	-	(+)	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	+	(+)	+	(+)	+
5	Ir. Subuh Saptomo																
	Kabid Bina Tanaman Pangan	(+)	(+)	+	(+)	+	(+)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Keterangan :

+ = Berjalan/sesuai dengan tujuan program

- = Tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan

(+) = Sesuai tetapi belum optimal/maksimal

## B. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8

Hasil Wawancara kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8 Desa Tanjung Buka, 2015

NO	NARASUMBER	KOMUNIKASI		SUMBER DAYA									SIKAP PELAKSANA		STRUKTUR BIROKRASI		
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	1	2	
1	Suriani Bongga Paiman																
	PPL SP.1	(+)	-	+	(+)	+	+	-	(+)	(+)	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
2	Royan Agustinus Siburian																
	PPL SP. 2	-	-	+	(+)	+	+	-	-	(+)	(+)	+	(+)	-	-	-	-
3	Dedy Muharram, SP																
	PPL SP.7	-	-	+	+	+	+	(+)	-	(+)	(+)	-	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
4	Kartira																
	PPL SP. 8	-	-	+	+	+	(+)	(+)	-	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

Keterangan :

+ = Berjalan/sesuai dengan tujuan program

- = Tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan

(+) = Sesuai tetapi belum optimal/maksimal

### C. Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8

Hasil Wawancara kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) SP.1, SP.2, SP.7 dan SP.8 Desa Tanjung Buka, 2015

NO	NARASUMBER	KOMUNIKASI				SUMBER DAYA									SIKAP PELAKSANA				STRUKTUR BIROKRASI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	
1	Wahid																					
	Ketua Gapoktan SP.1	(+)	+	(+)	+	+	(+)	+	-	+	+	(+)	+	-	+	(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	
2	Zaenal Abidin																					
	Ketua Gapoktan SP. 2	+	+	(+)	+	+	(+)	+	-	+	+	(+)	+	-	+	(+)	(+)	+	+	+	(+)	
3	Sukanto																					
	Ketua Gapoktan SP.7	+	+	(+)	+	+	(+)	+	+	+	+	(+)	+	-	+	+	(+)	(+)	+	(+)	-	
4	Sabar																					
	Ketua Gapoktan SP. 8	(+)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	(+)	+	-	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	

Keterangan :

+ = Berjalan/sesuai dengan tujuan program

- = Tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan

(+) = Sesuai tetapi belum optimal/maksimal

## Lampiran III

<b>BAPPEDA KABUPATEN BULUNGAN</b>
---------------------------------------

**PANDUAN  
WAWANCARA MENDALAM  
( *In-depth Interview* )**

Jabatan Narasumber : .....

Tgl/bln/thn Wawancara : .....

Nama Narasumber : .....

No. HP : .....

Tanda Tangan Narasumber : ( ..... )

**Waktu**

Hari : .....

Tanggal : .....

Mulai : ..... ( WITA )

Selesai : ..... ( WITA )

**A. SUMBER DAYA**

1. Bagaimana pendapat anda, tentang implementasi kebijakan food estate, apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja stakeholder yang tergabung dalam pokja ?
2. Bagaimana pendapat anda, apakah Stakeholder/SKPD yang telah ditetapkan dalam Tim Pokja pada Pengembangan Food Estate, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan) sesuai TUPOKSI masing-masing stake holder,

dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim POKJA food estate ?

3. Bagaimana pendapat anda, Seberapa jauh konsistensi Anggaran program Pengembangan Food Estate setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan food estate ?
4. Bagaimana pendapat anda, apakah stakeholder yang terkait dalam pengembangan food estate di desa Tanjung Buka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?
5. Bagaimana pendapat anda, apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim Pokja hingga pada level pelaksana dilapangan? Apakah kewenangan masing stakeholder/SKPD tersebut saling sinergis dan konsisten, berkurang atau bertambah , dengan adanya pengaruh perubahan struktur pemerintahan baru dari Kaltim menjadi Kaltara ?
6. Bagaimana pendapat anda, apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate di desa TanjungBuka ?
7. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan food estate, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur tim pokja, sarana dan fasilitas pendukung ?

## **B. STRUKTUR BIROKRASI**

1. Bagaimana pendapat anda, apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan & penerima kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate ?



2. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur ) atau tentang Pedoman pengelolaan Food estate, yang menjadi acuan para stakeholder/SKPD ?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan kawasan pengembangan food estate, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola kawasan food estate ?

### C. KOMUNIKASI

1. Bagaimana pendapat anda, apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim POKJA Food Estate sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan (masyarakat petani) ?
2. Bagaimana pendapat anda, apakah dalam pelaksanaan kebijakan food estate sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim POKJA/SKPD, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan food estate?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim POKJA Food Estate dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan food estate kepada petani terutama yang berada di desa Tanjung Buka ?

### D. DISPOSISI (SIKAP)

1. Bagaimana pendapat anda, tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para stakeholder sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan food estate ?
2. Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala SKPD dll terhadap perubahan sikap pelaku para stake holder dalam kebijakan food estate?

3. Bagaimanapendapatanda, apakahImplementasiPengembangan Food Estate yang dilaksanakanselamainisudahsesuaidanmemenuhiharapan (efektif dan efisien) ?baikdilihat dari sikap dan kemauan Instansi atau SKPD maupun dari Masyarakat Petani di Desa Tanjung Buka?



**PETUGAS PENYULUH  
LAPANGAN LOKASI  
SP. I DESA TG. BUKA**

**PEDOMAN  
WAWANCARA MENDALAM  
( *In-depth Interview* )**

Jabatan Narasumber : .....

Tgl/bln/thn Wawancara : .....

Nama Narasumber : .....

No. HP : .....

TandaTangan Narasumber : ( ..... )

**Waktu**

Hari : .....

Tanggal : .....

Mulai : ..... ( WITA )

Selesai : ..... ( WITA )

**A. SUMBER DAYA**

1. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi dan Program Kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Lokasi SP. I Desa Tanjung Buka ?
2. Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat petani ?
3. Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, jelaskan ?

4. Apakah PPL intens dalam melakukan/memberikan penyuluhan ke masyarakat petani tentang cara pengolahan dan pengelolaan pertanian, berapa kali dalam sebulan ?
5. Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani di SP. I Desa Tanjung Buka ?
6. Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani dalam mengelola lahan pertanian ?
7. Apakah Sarana dan Prasarana Pertanian yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai bagi masyarakat petani ?
8. Apakah Dinas Pertanian Kab. Bulungan sudah efektif dalam memberikan pelayanan, bantuan dan pendampingan ke masyarakat petani di SP. I Desa Tanjung Buka ?
9. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kab. Bulungan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani?

#### **B. STRUKTUR BIROKRASI**

1. Apakah sudah efektif kerjasama antara SKPD /Pokja, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP I Desa Tanjung Buka ?
2. Bagaimanakah Kinerja SKPD/Pokja dalam implementasi Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. I Desa Tanjung Buka ?

#### **C. KOMUNIKASI**

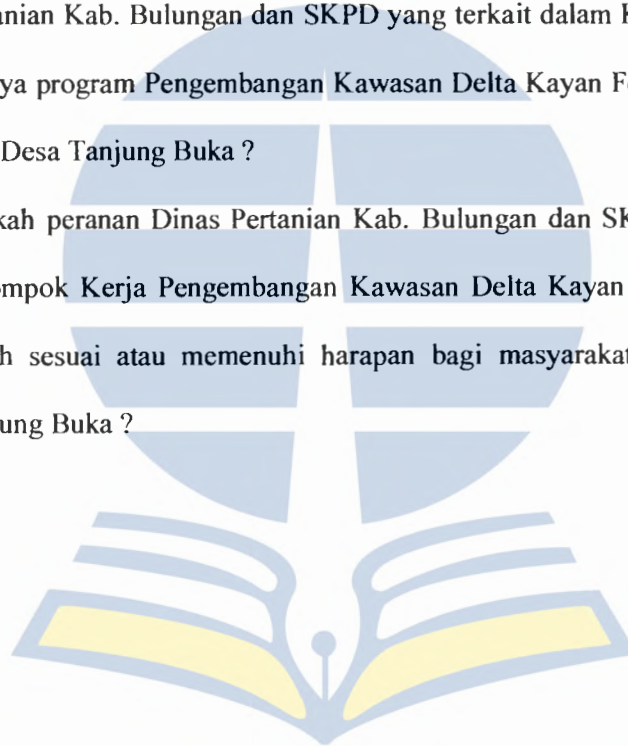
1. Menurut anda, Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui SKPD/Pokja yaitu Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. I Desa

Tanjung Buka telah tersosialisasi dengan baik bagi PPL/Masyarakat Petani (Gapoktan) ?

2. Menurut anda bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara SKPD / Pokja, PPL dan Masyarakat Petani/Gapoktan ?

#### **D. DISPOSISI (SIKAP)**

1. Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja tentang adanya program Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP.I Desa Tanjung Buka ?
2. Apakah peranan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. I Desa Tanjung Buka ?



**GAPOKTAN SP. I  
DESA TG. BUKA**

**PEDOMAN  
WAWANCARA MENDALAM  
( *In-depth Interview* )**

Jabatan Narasumber : .....

Tgl/bln/thn Wawancara : .....

Nama Narasumber : .....

No. HP : .....

TandaTangan Narasumber : ( ..... )

**Waktu**

Hari : .....

Tanggal : .....

Mulai : ..... ( WITA )

Selesai : ..... ( WITA )

**A. SUMBER DAYA**

1. Berapa Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di SP. I Desa Tanjung Buka dan apa nama GAPOKTAN nya, Jelaskan ?
2. Apakah Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) SP. I Desa Tanjung Buka memiliki Struktur Organisasi dan Program Kerjanya apa saja ?
3. Apakah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani memiliki pekerjaan sampingan selain bertani, jelaskan ?

4. Jenis Komoditas Pertanian apa saja yang di tanam oleh Kelompok Tani dan komoditas apa yang lebih unggul dan menghasilkan?
5. Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani GAPOKTAN SP. I di Desa Tanjung Buka ?
6. Apa saja hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Kelompok Tani dalam mengelola lahan pertanian ?
7. Bagaimana cara masyarakat GAPOKTAN SP. I Desa Tanjung Buka dalam menjual hasil pertaniannya dan kemana saja menjualnya ?
8. Bagaimanakah Tingkat Pendidikan masyarakat GAPOKTAN SP. I Desa Tanjung Buka ?
9. Apa saja keuntungan dan kerugian yang di peroleh masyarakat petani setelah panen ?

#### **B. STRUKTUR BIROKRASI**

1. Apakah sudah efektif kerjasama antara Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP I Desa Tanjung Buka ?
2. Bagaimanakah Kinerja Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan di SP I Desa Tanjung Buka?

#### **C. KOMUNIKASI**

1. Apakah Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) rutin melaksanakan Pelatihan / Sosialisasi bagi Petani di SP. I Desa Tanjung Buka, pelatihan apa saja dan dilaksanakan dimana ?
2. Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dan mudah di pahami oleh masyarakat petani?
3. Menurut anda berapa kali dalam sebulan Dinas Pertanian / PPL harus melakukan Pelatihan / Sosialisasi tentang pertanian?

#### **D. DISPOSISI (SIKAP)**

1. Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap seharusnya Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam melakukan pendampingan ke masyarakat petani ?
2. Apakah peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan PPL sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. I Desa Tanjung Buka ?





#### Lampiran IV

Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara mendalam di lokasi penelitian, SP. 1 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 1. Wawancara tanggal 12 Oktober 2015, dengan Petugas Penyuluh Lapangan SP.1 Desa Tanjung Buka, Atas Nama ibu Suriani Bongga Pariman



Gambar 2. Wawancara tanggal 12 Oktober 2015, dengan Ketua GAPOKTAN SP.1 Desa Tanjung Buka, Atas Nama Bapak Wahid

Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara mendalam di lokasi penelitian, SP. 2 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 3. Wawancara tanggal 12 Oktober 2015, dengan Petugas Penyuluh Lapangan SP.2 Desa Tanjung Buka, Atas Nama Bapak Royan Agustinus Siburian



Gambar 4. Wawancara tanggal 12 Oktober 2015, dengan Ketua Gapoktan SP.2 Desa Tanjung Buka, Atas Nama Bapak Zaenal Abidin

Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara mendalam di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan di Desa Tanjung Buka Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

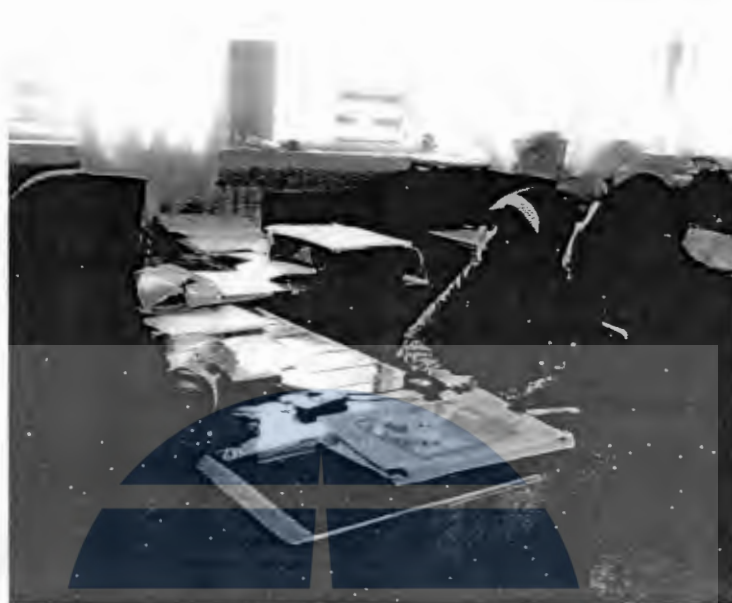


Gambar 5. Wawancara tanggal 20 Oktober 2015, dengan Petugas Penyuluh Lapangan SP.7 Desa Tanjung Buka, Atas Nama Bapak Dedy Muharram. SP



Gambar 6. Wawancara tanggal 12 Oktober 2015, dengan Ketua Gapoktan SP.7 Di Lokasi Desa Tanjung Buka, Atas Nama Bapak Sukanto

Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara mendalam di Kantor Dinas  
Pertanian Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 7. Wawancara tanggal 21 Oktober 2015, dengan Petugas Penyuluh Lapangan  
SP.8 Desa Tanjung Buka, Atas Nama Ibu Kartira



Gambar 8. Wawancara tanggal 15 Oktober 2015, dengan Ketua Gapoktan SP.8  
Desa Tanjung Buka, Atas Nama Bapak Sabar

Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara mendalam di Lokasi Penelitian Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 9. Wawancara tanggal 13 Oktober 2015, dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Atas Nama Bapak Ir. H. Muhammad Iqbal, M.Si



Gambar 10. Wawancara tanggal 19 Oktober 2015, dengan Bapak Asisten Sekretariat Daerah Kab. Bulungan Atas Nama Bapak Ir. H. Achmad Ideham, M.Si di Ruang Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara mendalam di Lokasi Penelitian Kantor Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 11. Wawancara tanggal 21 Oktober 2015, dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Atas Nama Bapak Drs. Syafril



Gambar 12. Wawancara tanggal 21 Oktober 2015, dengan Kabid Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Atas Nama Bapak Ir. Subuh Saptomo

Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara mendalam di Lokasi Penelitian Kantor Bappeda Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



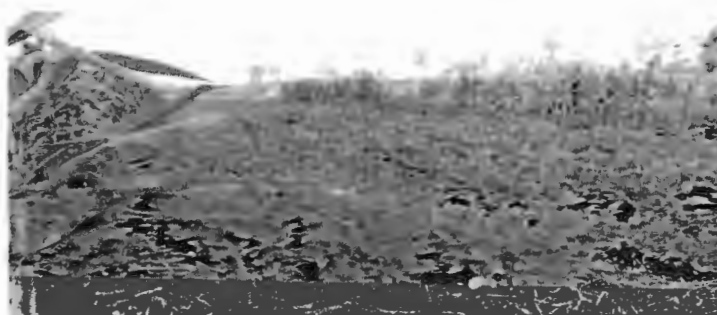
Gambar 13. Wawancara tanggal 30 Oktober 2015, dengan Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan Atas Nama Bapak Drs. Muhammad Isnaini

## Lampiran V

## Dokumentasi di Desa Tanjung Buka






Dokumentasi Launching Delta Kayan Food Estate oleh Bapak Menteri Pertanian, 2011



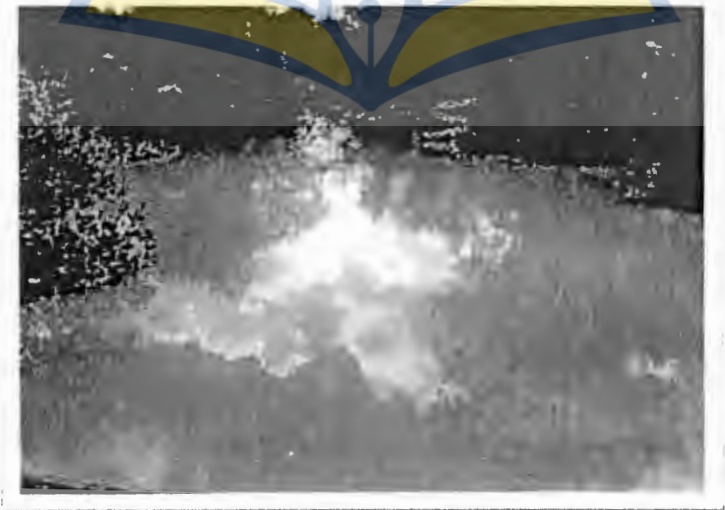


Dokumentasi Integrasi Jagung, Padi dan Kedelai



## DOKUMENTASI DI DESA TANJUNG BUKA

	<p>Gambar Jembatan Penghubung antar Desa, Tanjung Buka, 2015</p>
	<p>Gambar Daerah Aliran Sungai (DAS), Tanjung Buka, 2015</p>
	<p>Gambar Jembatan Penghubung antar Desa, Tanjung Buka, 2015</p>

	<p>Gambar Akses Jalan yang belum tersentuh semenisasi atau pengaspalan, Tanjung Buka, 2015</p>
	<p>Gambar Rumah Penduduk di Desa Tanjung Buka, 2015</p>
	<p>Gambar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengelilingi Desa Tanjung Buka, berwarna dan tidak jernih, 2015</p>

Nama : Drs. Syafril

Jabatan : Sekretaris Daerah

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	Implementasi kebijakan food estate, apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja stakeholder yang tergabung dalam pokja ?	: Implementasinya sudah bagus setau saya, karena arahnya untuk masyarakat agar kehidupan petani lebih sejahtera. Maunya kita begitu, karena food estate ini bekerjasama juga dengan pihak swasta. Food estate ini ditetapkan 50.000 Ha untuk desa Tanjung Buka 10.000 Ha
2	Apakah Stakeholder/SKPD yang telah ditetapkan dalam Tim Pokja pada Pengembangan Food Estate, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan) sesuai TUPOKSI masing-masing stake holder, dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim POKJA food estate ?	: Perlu dilakukan Modifikasi Tim Pokja, karena terjadinya perpindahan pengurus sehingga perlu segera dilakukan rapat tim pokja
3	Seberapa jauh konsistensi Anggaran program Pengembangan Food Estate setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan food estate ?	: Tetap Konsisten dengan Anggaran Program Pengembangan Food Estate di Kab. Bulungan walaupun anggaran mengalami penurunan, karena program ini berkelanjutan dan selama 5 (lima) tahun ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal jadi diharapkan program ini terus berlanjut
4	Apakah stakeholder yang terkait dalam pengembangan food estate di desa Tanjung Buka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?	: Sudah, walaupun belum maksimal, hal ini perlu di gerakkan dan ditingkatkan kembali
5	apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim Pokja hingga pada level pelaksana dilapangan? Apakah kewenangan masing stakeholder/SKPD tersebut saling sinergis dan konsisten, berkurang atau bertambah , dengan adanya pengaruh perubahan struktur pemerintahan baru dari Kaltim menjadi Kaltara	: Kewenangan berjalan, walaupun belum maksimal, tetapi di Bappeda tetap menggaungkan program pengembangan Food Estate ini dalam forum-forum tertentu

6	Apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate di desa TanjungBuka ?	: yang pasti fasilitas yang digunakan untuk mengoperasionalkan kebijakan sudah memberikan pelayanan dalam program ini dan perlu di kembangkan lagi
7	Apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan food estate, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur tim pokja, sarana dan fasilitas pendukung ?	: Pasti, perlu di evaluasi, diharapkan stake holder terkait tim pokja perlu memberikan laporan hasil pelaksanaan program pengembangan food estate
<b>B STRUKTUR BIROKRASI</b>		
1	Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate ?	: Efektif saja, terkait pembuat keputusan dan penerima kebijakan perlu di tingkatkan lagi
2	Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur ) atau tentang Pedoman pengelolaan Food estate, yang menjadi acuan para stakeholder/SKPD ?	: SOP harus ada dan perlu Study Banding dan Kajian terkait lebih dalam lagi
3	Apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan kawasan pengembangan food estate, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola kawasan food estate?	: Tidak perlu, yang penting koordinasi, rapat dan tindak lanjut yang berlebih
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	Apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim POKJA Food Estate sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan (masyarakat petani) ?	: Kebijakan tidak terlalu banyak yang saya ketahui, tetapi kebijakan ini perlu di pertajam lagi
2	Apakah dalam pelaksanaan kebijakan food estate sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim POKJA/SKPD, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan food estate?	: Saya fikir komunikasinya sudah efektif, terkait program dan anggaran

3	Apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim POKJA Food Estate dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan food estate kepada petani terutama yang berada di desa Tanjung Buka ?	: Belum banyak saya ketahui tentang program ini, tetapi secara garis besarnya apabila food estate ini telah dilakukan dan berjalan berarti perlu adanya komunikasi yang intensif antara Tim Pokja dan PPL walaupun belum maksimal
<b>D</b>	<b>DISPOSISI</b>	
1	Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para stakeholder sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan food estate ?	: terkait sikap, kemampuan dan kemauan dari stakeholder sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan ini tetapi belum maksimal sehingga perlu di tingkatkan lagi
2	Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala SKPD dll terhadap perubahan sikap pelaku para stake holder dalam kebijakan food estate?	: yang pasti ada, guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani
3	Apakah Implementasi Pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan Instansi atau SKPD maupun dari Masyarakat Petani di Desa Tanjung Buka?	: menurut saya sudah sesuai, walaupun perhatian pemerintah agak menurun terhadap hal ini, maka kedepannya perlu di gerakkan, di tingkatkan dan dikembangkan lagi

Nama : Drs. Muhammad Isnaini

Jabatan : Kepala Bappeda Kab. Bulungan

NO	PERTANYAAN	
A. 1	<p><b>SUMBER DAYA</b></p> <p>Implementasi kebijakan food estate, apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja stakeholder yang tergabung dalam pokja ?</p>	<p>: Pola food estate ada tiga yaitu kemitraan, ada unsur pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Dalam perjalanannya, setelah ditetapkan kawasan 50.000 Ha tentu menawarkan investasi kepada pihak swasta, dalam hal ini ada beberapa pihak swasta yang telah masuk disana, kemudian juga dilaksanakan program transmigrasi masyarakat, transmigrasi ada dua sistem yaitu 50:50 ( 50% warga lokal dan 50% warga dari Jawa timur). kawasan 50.000 Ha tidak satu kawasan tetapi terpisah ada empat kecamatan. 7000 sekian transmigrasi lokal dan dari luar. settingnya peran pemerintah yaitu regulasi, menyusun perencanaan kawasan food estate, membangun infrastruktur dan peran swasta diharapkan rencana awal yaitu membuka lahan, kegiatan investasi di bidang pangan (jagung,padi,kedelai,dsb), peran masyarakat selaku pekerja. dalam perjalanannya ada peran-peran yang belum sebagaimana yang direncanakan dalam lima tahun, antara lain pihak swasta dimana orientasinya provit, dalam perjalanannya untuk mencari keuntungan secara ekonomi tentang perdagangan dengan modal, perhitungan untung dan rugi, biaya produksi, minimal BEP (Break Event Point) pada titik keseimbangan antara biaya produksi dengan harga. jual 1000 minimal harga 1000 agar seimbang, tetapi perusahaan dalam kondisi sekarang dalam lima tahun terakhir tidak untung sehingga ada beberapa perusahaan yang mundur, mundurnya perusahaan merupakan suatu masalah dan berarti program food estate belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan.</p>

2	<p>Apakah Stakeholder/SKPD yang telah ditetapkan dalam Tim Pokja pada Pengembangan Food Estate, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan) sesuai TUPOKSI masing-masing stake holder, dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim POKJA food estate ?</p>	<p>: Koordinasi belum jalan, karena leading sektor nya siapa dan SKPD teknisnya tidak berjalan, Pokjanya harus sering bertemu agar permasalahan di lapangan dapat diidentifikasi, Dinas Pertanian sudah berjalan harus sering berkoordinasi dengan PPL di bawah BP2KP, pertemuan dengan bulungan cassava sering bertemu terkait dengan perusahaan dan pemerintah tetapi disperindagkop belum berperan. Pokja itu idealnya harus sering bertemu agar permasalahan dilapangan bisa terdeksi dan dicarol solusinya. gambaran leading sektor yaitu dinas pertanian, lalu bagaimana dengan dinas yang lain, kita mempunyai lembaga badan ketahanan pangan, pelaksana PPL, harusnya selalu saling koordinasi. badan ketahanan pangan, dinas pertanian dan disperindagkop harus mengadakan rapat, karena terkait produksi pangan. produksi pangan cenderung meningkatnya produksi sepanjang pasarnya memang tersedia. sehingga peran disperindagkop harus sinergis, sehingga pokja harus ada pertemuan.</p>
3	<p>Seberapa jauh konsistensi Anggaran program Pengembangan Food Estate setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan food estate ?</p>	<p>: Tim Anggaran memberikan secara optimal tapi kembali ke program, sebelum musrenbang sudah di sampaikan tentang keterkaitan anggaran, karena ini program nasional SKPD teknis sudah mengusulkan ke APBN terkait food estate. Food estate itu tidak secara parsial. jadi food estate itu harus difikirkan, bagaimana sarana transportasinya untuk dinas perhubungan, jadi jangan secara parsial hanya mengurus ininya saja, sebelum musrenbang sudah dipelopori tetang program food estate, supaya apabila diusulkan hal ini saling berhubungan, programnya saling sinkron, seperti dinas pertanian, ketahanan pangan, disperindagkop, kerjanya kan keroyokan, secara parsial perhubungan membangun dermaga tetapi tidak pernah muncul sehingga skpd hanya berbicara tentang rutinitas apa yang dilakukan. food estate harus diperlakukan khusus. program tidak hanya APBD tetapi bisa APBN.</p>
4	<p>Apakah stakeholder yang terkait dalam pengembangan food estate di desa Tanjung Buka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?</p>	<p>:</p>

5	apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim Pokja hingga pada level pelaksana dilapangan? Apakah kewenangan masing stakeholder/SKPD tersebut saling sinergis dan konsisten, berkurang atau bertambah , dengan adanya pengaruh perubahan struktur pemerintahan baru dari Kaltim menjadi Kaltara	: Kewenangan terkait pembagian tugas, kita tetap berhubungan dengan provinsi dan pusat, tetapi ada batasan tetapi tidak berpengaruh. Kita harus ada pertemuan khusus untuk menginventaris kebutuhan khusus anggaran bisa mengikuti. Seharusnya kita semakin kuat karena suppotnya sudah datang dari pusat. pusat tidak akan melakukan apa-apa, jika kita tidak melakukan apa-apa. jangan beban APBD terus sedangkan ini merupakan program nasional. APBD tidak mampu membiayai food estate ini.
6	Apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate di desa TanjungBuka ?	:
7	Apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan food estate, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur tim pokja, sarana dan fasilitas pendukung ?	: ada bagian-bagian tertentu yang di evaluasi tidak rinci satu program, karena bappeda merupakan perencanaan secara keseluruhan, evaluasi harus dilakukan oleh teknis skpd, instansi harus saling berkoordinasi, sehingga sudah sejauhmana hal itu yang ingin diketahui, mana yang kurang, mana yang sudah dan apa yang belum. evaluasi dinas transmigrasi jangan mendatangkan warga transmigrasi terus tetapi sinkronkan dengan dinas pertanian apakah lahannya subur, dinas transmigrasi tidak mau tau sukses atau tidak, produksinya baik atau tidak tetapi mendatangkan terus hal ini menjadi aneh. sedangkan antara skpd dalam pokja saling berhubungan, jangan sampai kita menumpukkan orang di sana tetapi urusannya menjadi urusan pemda sehingga menjadi tanggung pemda. seharusnya kita tidak lagi menangani hal itu.
<b>B</b>	<b>STRUKTUR BIROKRASI</b>	
1	Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate ?	: kembali ke pokja, untuk itu pengkajian evaluasi tentang kinerja, pokja lintas sektor untuk mengetahui kinerja yang mana yang belum optimal, bisa disusun melalui dinas pertanian karena ada bagian-bagian yang secara program di evaluasi yang mana yang belum maksimal, yang mana yang sudah dan mana yang belum akan kelihatan. sehingga akan terevaluasi dengan sendirinya, siapa yang kerja dan siapa yang belum.



2	Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur ) atau tentang Pedoman pengelolaan Food estate, yang menjadi acuan para stakeholder/SKPD ?	: otomatis melekat di SKPD karena ini merupakan fungsi SKPD, seperti SOP pengembangan inventasi bukan pertanian aja tetapi penanaman modal juga dan dalam segala hal. Masing-masing SKPD yang berkepentingan, ada SOP, apa yang dilakukan dari tahapan awal. tidak mungkin satu SKPD menyusun semua, karena ini kerjaan bersama.
3	Apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan kawasan pengembangan food estate, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola kawasan food estate?	: ide yang bagus dan bisa di jadikan lembaga atau badan khusus, tidak setingkat pokja, perlakukan secara khusus, penanganan khusus yang mempunyai otoritas sendiri. Hal ini merupakan inspirasi, hasil kajiannya harus ada lembaga khusus yang dibentuk jadi tidak hanya setingkat Pokja, penanganannya khusus. bupati terpilih yang akan datang, kalo food estate sukses maka dia akan menjadi bupati yang sukses. sebenarnya sudah cukup dengan pokja apabila kinerjanya maksimal, akan tetapi kalo hasil evaluasi kerja pokja ini belum maksimal, maka perlu dibentuk badan khusus bukan struktural tetapi otorita yang fokus tentang food estate.
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	Apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim POKJA Food Estate sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan (masyarakat petani) ?	: boleh dikatakan tidak, leading sektornya siapa, seharusnya pertanian yang memfasilitasi dan menginisiasi bahwa kita harus ada pertemuan, tetapi selama ini tidak dilakukan hal itu.
2	Apakah dalam pelaksanaan kebijakan food estate sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim POKJA/SKPD, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan food estate?	:
3	Apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim POKJA Food Estate dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan food estate kepada petani terutama yang berada di desa Tanjung Buka ?	:

<b>D</b>	<b>DISPOSISI</b>	
1	Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para stakeholder sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan food estate ?	: selalu menyalahkan anggaran, harus berunding dengan skpd terkait food estate, food estate mau dijadikan seperti apa di tahun depan, programnya apa, berapa kebutuhannya, kalo parsial harus bisa dijelaskan. Food estate tidak bisa diperlakukan parsial, harus mendetail terkait pemasaran, hasil produk harus dikemas seperti apa, hal ini harus dibicarakan sehingga kaitannya dengan anggaran tidak jelas juga, food estate ya food estate, pertanian ya pertanian, disperindakop tidak berbicara tentang produksi melainkan pemasaran, pertanian juga tidak boleh memproduksi sebanyak-banyaknya hal ini lah yang harus di sinergiskan.
2	Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala SKPD dll terhadap perubahan sikap pelaku para stake holder dalam kebijakan food estate?	: Kalo unsur politis karena menyangkut manusia tetapi hal ini bisa menjadi komoditas politis juga. SKPD tidak berurusan dengan politis, tidak menutup kemungkinan hal ini hanya sekedar melihat tetapi kinerjanya tidak serius. Kita punya food estate tetapi tidak bisa menjawab secara mendetail.
3	Apakah Implementasi Pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan Instansi atau SKPD maupun dari Masyarakat Petani di Desa Tanjung Buka?	: belum memenuhi harapan tetapi selama saya di bappeda saya akan coba dan mengajak serta komit dengan pembangunan daerah terutama sektor pertanian, karena ini merupakan nyawa kita dan harus sinkron dengan pembangunan provinsi. Kita tidak akan pernah mendapatkan bantuan APBN kalo program kita tidak selaras dengan program nasional, ini lah peluang sudah menetapkan program food estate secara nasional, kalo kita menyusun ini dalam suatu program yang terencana baik, tentu kita akan menawarkan ke pusat, pusat akan menyelaraskan apa yang akan kita buat terkait program food estate, hal itu yang belum kita pikirkan. maka kita perlu rapat terpadu dengan moment kepala daerah yang baru dan bappeda akan menyiapkan hal-hal yang baru dengan subsidi dari APBN dan APBD. Kondisi ideal food estate harus terbangun dengan baik.

Nama : Ir. H. Muhammad Iqbal, M.Si  
 Jabatan : Kadis. Pertanian Kab. Bulungan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	Implementasi kebijakan food estate, apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja stakeholder yang tergabung dalam pokja ?	: Stake holder tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kecuali pihak investor dalam menanamkan inventasinya ke lahan transmigrasi, untuk memudahkan akses transportasi dari Dinas Perhubungan masih mencari tempat untuk memasarkan hasil pertaniannya sehingga membutuhkan pelabuhan atau jembatan
2	Apakah Stakeholder/SKPD yang telah ditetapkan dalam Tim Pokja pada Pengembangan Food Estate, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan) sesuai TUPOKSI masing-masing stake holder, dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim POKJA food estate ?	: Di Lihat SK Tim Pokja sudah lama, perlu di revisi dilihat SKPD yang berkompeten guna mensukseskan food estate ini.
3	Seberapa jauh konsistensi Anggaran program Pengembangan Food Estate setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan food estate ?	: Kalau lahan di daerah transmigrasi yang notebene penduduknya sudah ada anggarannya pasti bertambah, daerah pasang surut kan perlu dikembangkan sehingga anggaran perlu di tambah
4	Apakah stakeholder yang terkait dalam pengembangan food estate di desa Tanjung Buka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?	: secara maksimal belum, tetapi secara bertahap sudah, dari pertambangan sudah memasukkan PLTS, dinas pendidikan membangun sekolah, perhubungan membangun jembatan antara sp, akses yang lebih besar yang belum, disperindagkop juga sudah dalam bentuk pemasaran

5	apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim Pokja hingga pada level pelaksana dilapangan? Apakah kewenangan masing stakeholder/SKPD tersebut saling sinergis dan konsisten, berkurang atau bertambah , dengan adanya pengaruh perubahan struktur pemerintahan baru dari Kaltim menjadi Kaltara	: kewenangan belum berjalan secara maksimal, tidak ada pengaruh terkait perubahan struktur pemerintahan baru, karena lokus dan fokus di kab. Bulungan
6	Apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate di desa TanjungBuka ?	: belum maksimal, harapan masyarakat bisa menikmati akses listrik dan transportasi perlu waktu yang cukup
7	Apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan food estate, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur tim pokja, sarana dan fasilitas pendukung ?	: di level SKPD tupoksi langsung tetap melakukan evaluasi sejauh mana kegiatan food estate dilaksanakan terkait pertanian tapi belum pernah turun secara bersama sama, rapat hanya dalam bentuk pelaksanaan dan kebutuhan masyarakat, rapat evaluasi belum
<b>B STRUKTUR BIROKRASI</b>		
1	Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate ?	: cukup efektif karena masyarakat sebagai penerima kebijakan sudah merasakan dan skpd sebagai pembuat kebijakan sudah melaksanakan
2	Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur ) atau tentang Pedoman pengelolaan Food estate, yang menjadi acuan para stakeholder/SKPD ?	: secara tertulis belum membuat SOP sebagai acuan, dari level skpd secara tertulis juga belum ada tapi petunjuk pelaksanaan dan pedoman umumnya ada
3	Apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan kawasan pengembangan food estate, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola kawasan food estate?	: yang menangani sudah ada SKPD dan PPL artinya belum perlu di bentuk, apabila kedepannya sudah berkembang dan penanganan khusus mgkin perlu, yang di harapkan perlu adanya koperasi
<b>C KOMUNIKASI</b>		

1	Apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim POKJA Food Estate sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan (masyarakat petani) ?	: sebagian kecil sudah karena yang hadir tokoh masyarakat desa, dan masih ada yang belum tau
2	Apakah dalam pelaksanaan kebijakan food estate sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim POKJA/SKPD, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan food estate?	: sudah melakukan forum lintas SKPD khusus membahas program food estate secara bersama, bagaimana mengatur perencanaan dan penganggaran, dari sektor perikanan dan pertanian sudah melaksanakan sepenuhnya tetapi sektor pendidikan, perhubungan, PU masih belum
3	Apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim POKJA Food Estate dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan food estate kepada petani terutama yang berada di desa Tanjung Buka ?	: seharusnya ada kegiatan rutinitas sekali sebulan sekaligus mengevaluasi apa yang ingin dibuat, bagaimana pendapat masyarakat, harapan-harapan investor sehingga perlu ada informasi-informasi guna mengembangkan food estate ini
<b>D DISPOSISI</b>		
1	Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para stakeholder sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan food estate ?	: kemampuan rata-rata cukup tetapi belum tau persis ttg apa yang ingin di buat di food estate sehingga sikapnya belum maksimal, dinas pertanian karena khusus maka pertanian jharus mensukseskan food estate
2	Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala SKPD dll terhadap perubahan sikap pelaku para stake holder dalam kebijakan food estate?	: diharapkan bupati yang selanjutnya konsen terhadap food estate, visi dan misi dinas pertanian mmg harus mensukses kan program ini

3	Apakah Implementasi Pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan Instansi atau SKPD maupun dari Masyarakat Petani di Desa Tanjung Buka?	: sudah memenuhi harapan, hasil produksi sayur-sayuran sudah mulai bagus dan pemasaran sudah mencapai di daerah sekitarnya tetapi belum bisa bersaing dengan harga karena terkait ongkos angkut, kalau terkait SKPD belum memenuhi harapan sepenuhnya
---	--	---



Nama : Ir. H. Muhammad Ideham, M.Si

Jabatan : Asisten I Setda Kab. Bulungan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
<p>A. <b>SUMBER DAYA</b></p> <p>1</p>	<p>Implementasi kebijakan food estate, apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja stakeholder yang tergabung dalam pokja ?</p>	<p>: Seorang inisiator, pemahaman food estate, food estate adalah kawasan pangan untuk skala yang lebih besar. Oleh karena itu, ada SK. Bupati dengan menetapkan kawasan seluas 50.000 Ha untuk menjadi kawasan pangan. Menyangkut beberapa kecamatan yaitu kec. tanjung palas tengah, tg. palas utara, tg.selor dan tanjung palas timur. food estate ini adalah mengembangkan pangan dan non sawit. artinya apa aja bisa dikembangkan di situ kecuali sawit. kalo di persempit, food estate ini pengembangan budidaya padi, jagung dan kedelai. food estate ini ada dasar hukumnya yaitu uu sistem budidaya tanaman pangan, ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri pertanian, dimana untuk pengembangan food estate diberi kewenangan ke bupati/walikota untuk memberi izin apabila ada investasi perusahaan yang ingin mengembangkan tanaman pangan. food estate ini diperuntukkan bagi para investor dan masyarakat, untuk investor kewenangannya bupati sesuai dengan permentan dan pp sebagai lanjutan uu sistem budidaya tanaman pangan. kita kenal den perdagangan dengan modal, perhitungan untung dan rugi, biaya produksi, minimal BEF (Break Event Point) pada titik keseimbangan antara biaya produksi dengan harga. jual 1000 minimal harga 1000 agar seimbang, tetapi perusahaan dalam kondisi sekarang dalam lima tahun terakhir tidak untung sehingga ada beberapa perusahaan yang mundur, mundurnya perusahaan merupakan suatu masalah dan berarti program food</p>
<p>2</p>	<p>Apakah Stakeholder/SKPD yang telah ditetapkan dalam Tim Pokja pada Pengembangan Food Estate, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan) sesuai TUPOKSI masing-masing stake holder, dengan pertimbangan efesiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim POKJA food estate ?</p>	<p>:</p>

3	Seberapa jauh konsistensi Anggaran program Pengembangan Food Estate setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan food estate ?	: Anggaran tidak ada yg khusus, anggaran parsial ini lah kita rakit-rakit guna mendukung program food estate, terkait perusahaan anggarannya lebih besar guna mendukung program food estate ini, sehingga perlu sinergi antara daerah dan pusat dalam memberikan kontribusi anggaran guna mendukung program ini
4	Apakah stakeholder yang terkait dalam pengembangan food estate di desa Tanjung Buka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?	: Koordinasi sudah bagus tetapi perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk aksi yang nyata dan sinergi antara stake holder
5	apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim Pokja hingga pada level pelaksana dilapangan? Apakah kewenangan masing stakeholder/SKPD tersebut saling sinergis dan konsisten, berkurang atau bertambah , dengan adanya pengaruh perubahan struktur pemerintahan baru dari Kaltim menjadi Kaltara	: untuk pelaksanaan dilapangan sudah sinergi, terkait perubahan dari kaltim ke kaltara tidak ada perubahan, karena lokusnya di bulungan, sekarang pembinaan dari kaltara walaupun pemahaman terkait program ini perlu di tingkatkan lagi
6	Apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate di desa TanjungBuka ?	: Sarana yang dibangun sudah dimanfaatkan dan bermanfaat fositive dengan adanya peningkatan produktivitas tidak lepas dari sarana dan prasarana seperti hand traktor, pintu air dll. Dari segi statistik terjadi peningkatan produksi pertanian dan dari segi masyarakat petani sudah lebih baik dilihat dari kehidupannya.
7	Apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan food estate, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur tim pokja, sarana dan fasilitas pendukung ?	: Sudah dilaksanakan rapat berkali2 secara parsial dan secara paripurna
<b>B</b>	<b>STRUKTUR BIROKRASI</b>	
1	Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate ?	: Sudah efektif karena organisasinya berjalan



2	Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur ) atau tentang Pedoman pengelolaan Food estate, yang menjadi acuan para stakeholder/SKPD ?	: Masing-masing kegiatan sudah ada SOP secara parsial, karena anggaran ini di masing-masing SKPD sehingga di rakit guna mendukung food estate ini, tetapi kalau secara konsep tidak ada
3	Apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan kawasan pengembangan food estate, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola kawasan food estate?	: Perlu yaitu ada di Bappeda
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	Apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim POKJA Food Estate sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan (masyarakat petani) ?	: Sosialisasi ke masyarakat petani yang parsial sudah tetapi secara utuh petani sudah memahami adanya food estate
2	Apakah dalam pelaksanaan kebijakan food estate sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim POKJA/SKPD, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan food estate?	: kalau berhasil berarti sudah efektif
3	Apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim POKJA Food Estate dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan food estate kepada petani terutama yang berada di desa Tanjung Buka ?	: PPL sudah tau kalau kita melakukan kegiatan masing-masing dengan lokus dan fokus yang sama, berarti komunikasi sudah dikembangkan
<b>D DISPOSISI</b>		
1	Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para stakeholder sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan food estate ?	: Semua orang sudah mendukung food estate ini di harapkan kedepan berkelanjutan, food estate ini program yang berkelanjutan dan semua stake holder sangat mendukung Cuma belum tau mau berbuat apa

2	Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala SKPD dll terhadap perubahan sikap pelaku para stake holder dalam kebijakan food estate?	: Faktor politis pasti mempengaruhi karena program ini berkelanjutan dan dimasukkan dalam misi pemimpin pemerintahan berikutnya
3	Apakah Implementasi Pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan Instansi atau SKPD maupun dari Masyarakat Petani di Desa Tanjung Buka?	: Sudah efektif karena stakeholder dan masyarakat petani mendukung program ini



Nama : Ir. Subuh Saptomo

Jabatan : Kabid Tanaman Pangan Kab. Bulungan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	Implementasi kebijakan food estate, apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja stakeholder yang tergabung dalam pokja ?	: Efektif atau tidak tergantung dari pelaksanaan di lapangan, perencanaan program dan pokja sudah ada, semua tergantung dari anggaran, yang perlu diketahui food estate adalah kerja bersama antar instansi yang terkait sesuai dgn tupoksi masing-masing, sudah diimplementasikan walaupun terkesan lambat tetapi arah dan tujuan untuk mengembangkan food estate
2	Apakah Stakeholder/SKPD yang telah ditetapkan dalam Tim Pokja pada Pengembangan Food Estate, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan) sesuai TUPOKSI masing-masing stake holder, dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim POKJA food estate ?	: kalau instansi tidak perlu perubahan, mungkin perlu penajaman program sesuai dengan master plan yang disusun sehingga perlu melihat perencanaan awal, master plan sebagai patokan untuk melaksakan pembangunan food estate. Terkait lokasi yang overlape yang perlu di revisi.
3	Seberapa jauh konsistensi Anggaran program Pengembangan Food Estate setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan food estate ?	: untuk pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan SDM, apabila membuka cetak sawah sdh dianggarkan dana yang besar tetapi SDM yang sedikit maka akan sia-sia yang dikerjakan
4	Apakah stakeholder yang terkait dalam pengembangan food estate di desa Tanjung Buka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?	: Sudah berjalan dan bekerja dengan tupoksi masing-masing, karena sudah diikuti dengan pembangunan infrastruktur,

5	apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim Pokja hingga pada level pelaksana dilapangan? Apakah kewenangan masing stakeholder/SKPD tersebut saling sinergis dan konsisten, berkurang atau bertambah , dengan adanya pengaruh perubahan struktur pemerintahan baru dari Kaltim menjadi Kaltara	: setelah menjadi kaltara koordinasi lebih mudah, lebih focus kedepannya walau kontribusi belum keliatan tetapi kedepannya pasti keliatan karena banyak kebijakan2 mendukung program food estate ini dan merupakan satu-satunya sebagai sentra pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan di propinsi dan bisa lebih luas lagi untuk ekspor
6	Apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate di desa TanjungBuka ?	: yang jelas payung hukum, kerjasama antar lintas sektoral, anggarannya cukup, sdm nya siap, perencanaan sudah ada, pembangunan sesuai dengan kemampuan secara bertahap
7	Apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan food estate, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur tim pokja, sarana dan fasilitas pendukung ?	: dari sisi pertanian, setiap tahun mengalami peningkatan dari luas cetak sawah, produksi, sdm, ekonomi masyarakat mengalami peningkatan
<b>B STRUKTUR BIROKRASI</b>		
1	Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan food estate ?	: efektif karena melihat dari pertimbangan di lapangan
2	Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur ) atau tentang Pedoman pengelolaan Food estate, yang menjadi acuan para stakeholder/SKPD ?	: SOP tergantung dari kegiatan masing-masing SKPD secara umum tidak ada, SOP terkait teknis kegiatan di SKPD lebih spesifik ada
3	Apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan kawasan pengembangan food estate, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola kawasan food estate?	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup yang mengatur dan mengkoordinir semua Stake Holder terkait food estate
<b>C KOMUNIKASI</b>		

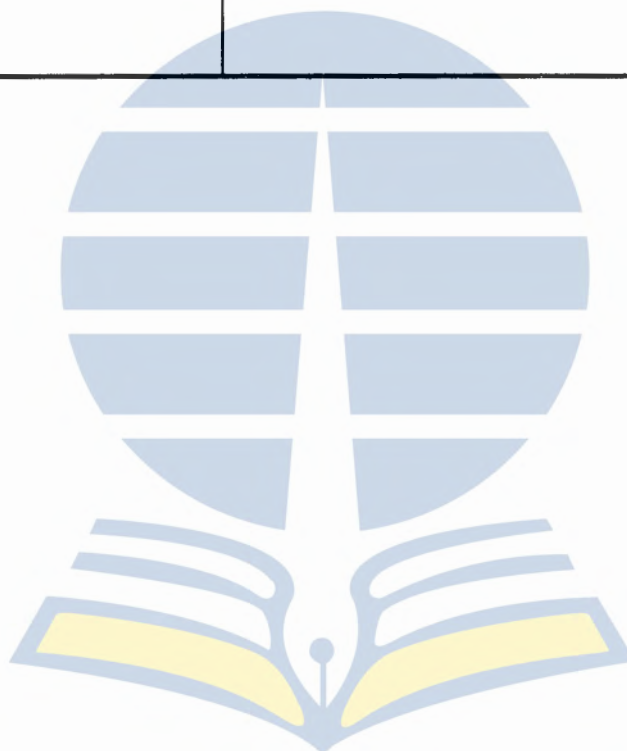
<p>1</p>	<p>Apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim POKJA Food Estate sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan (masyarakat petani)?</p>	<p>: Dari petani banyak yang belum paham tentang food estate, karena daerah transmigrasi dan guna meningkatkan produksi pertanian hanya mengetahui bahwa daerah tersebut daerah food estate</p>
<p>2</p>	<p>Apakah dalam pelaksanaan kebijakan food estate sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim POKJA/SKPD, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan food estate?</p>	<p>: Setiap tahun ada, tetapi tidak intens, di tingkat pusat juga dilaksanakan seminar guna mendapatkan anggaran</p>
<p>3</p>	<p>Apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim POKJA Food Estate dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan food estate kepada petani terutama yang berada di desa Tanjung Buka ?</p>	<p>: Food estate tidak perlu di sosialisasikan, yang penting programnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing</p>
<p><b>D DISPOSISI</b></p>		
<p>1</p>	<p>Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para stakeholder sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan food estate ?</p>	<p>: Sikap SKPD sudah melaksanakan sesuai dengan TUPOKSI, laju dan lambat semua tergantung anggaran, jumlah SDM transmigrasi juga mempengaruhi cetak sawah, kesehatan membuat Postu, dll</p>
<p>2</p>	<p>Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala SKPD dll terhadap perubahan sikap pelaku para stake holder dalam kebijakan food estate?</p>	<p>: Bisa ada peranan faktor politis, tetapi yang pasti action dan aksi yang di butuhkan</p>
<p>3</p>	<p>Apakah Implementasi Pengembangan Food Estate yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan Instansi atau SKPD maupun dari Masyarakat Petani di Desa Tanjung Buka?</p>	<p>: yang pasti sudah sesuai atau efektif tetapi dilihat lagi terkait anggaran</p>

Nama : Suriani Bongga Pariman  
 Jabatan : PPL SP. 1 Desa Tg. Buka

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi dan Program Kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Lokasi SP. 1 Desa Tanjung Buka ?	: Tupoksi sebagai memfasilitasi petani terkait koordinasi ke Dinas Pertanian, secara teknis dalam pengendalian hama, mencari teknologi baru untuk disampaikan ke petani untuk meningkatkan pendapatan petani
2	Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat petani ?	: Kondisi penyebrangan menggunakan perahu dan menggunakan kendaraan bermotor kadang berjalan kaki
3	Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, jelaskan ?	: Ada, sistem kerja di bawah BP2KP Kab. Bulungan dan BPP di Kecamatan dan dibagi penempatan di wibi masing-masing
4	Apakah PPL intens dalam melakukan/memberikan penyuluhan ke masyarakat petani tentang cara pengolahan dan pengelolaan pertanian, berapa kali dalam sebulan ?	: Jam Kerja 4 Kali dalam seminggu ke lokasi, hari jum'at kerja bakti di BP2KP dan rapat kecil dalam menyampaikan keluhan ke masyarakat dan mencari solusi. Melakukan pertemuan di BPP dan menyesuaikan kondisi dan kegiatan juga di lapangan, kalau rutin kegiatan musim tanam kadang bisa tiap hari ke lokasi
5	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani di SP. 1 Desa Tanjung Buka ?	: Kalo secara umum ekonomi masyarakat dikategorikan kesejahteraannya masih di bawah rata-rata dan penghasilan utama hanya bertani
6	Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani dalam mengelola lahan pertanian ?	: Daerah pasang surut musim tanam air tinggi sawah terendam, luas lahan agak banyak, tenaga kerja sedikit, jadi di butuhkan setiap kelompok harus ada powerthresher dan traktor dgn 14 kelompok petani guna membantu petani dalam mengolah lahan pertanian, pintu air belum bagus
7	Apakah Sarana dan Prasarana Pertanian yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai bagi masyarakat petani ?	: Sudah sesuai tapi masing kurang seperti power thresher dan traktor masing-masing kelompok tani masing membutuhkan 2 unit

8	Apakah Dinas Pertanian Kab. Bulungan sudah efektif dalam memberikan pelayanan, bantuan dan pendampingan ke masyarakat petani di SP. I Desa Tanjung Buka ?	Sudah efektif dalam memberikan pelayanan dan bantuan, banyak berperan serta memberikan manfaat ke masyarakat petani
9	Hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kab. Bulungan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani?	Dari pemerintah secara umum guna memperlancar food estate di sediakan sarana dan prasarana seperti jalan dan transportasi yang sudah disemenisasi dan transportasi yang memadai guna memperlancar petani dalam memasarkan hasil pertaniannya serta sarana listrik, kalo untuk dinas pertanian sudah berperan penuh terhadap petani
<b>B STRUKTUR BIROKRASI</b>		
1	Apakah sudah efektif kerjasama antara SKPD /Pokja, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP I Desa Tanjung Buka ?	: Kerjasama sudah bagus dan efektif antara Dinas Pertanian, PPL dan Petani terkait kegiatan dari SKPD lain PU terkait Irigasi, Disperindakop dan Dinas Perhubungan kerjasama masih belum maksimal
2	Bagaimanakah Kinerja SKPD/Pokja dalam implementasi Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. I Desa Tanjung Buka ?	: Kinerja SKPD perlu di tingkatkan lagi
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui SKPD/Pokja yaitu Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. I Desa Tanjung Buka telah tersosialisasi dengan baik bagi PPL/Masyarakat Petani (Gapoktan) ?	: Sudah tersosialisasi, tapi masih banyak masyarakat petani yang belum paham tentang food estate
2	Bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara SKPD / Pokja, PPL dan Masyarakat Petani/Gapoktan ?	: Apabila kegiatan menjadi suatu manfaat, seharusnya dimulai dari bawah terlebih dahulu, dilihat dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan, agar tepat sasaran. Diharapkan yang didengar adalah keinginan petani
<b>D DISPOSISI</b>		

1	Ttentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja tentang adanya program Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. I Desa Tanjung Buka ?	: Sikap dan Kemauan sudah bagus, sasaran ke SP. I karena daerah pasang surut dan penduduk dari Jawa dan kondisi penduduk biasa bertani
2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. I Desa Tanjung Buka ?	: sudah sesuai tapi belum memenuhi harapan bagi masyarakat petani



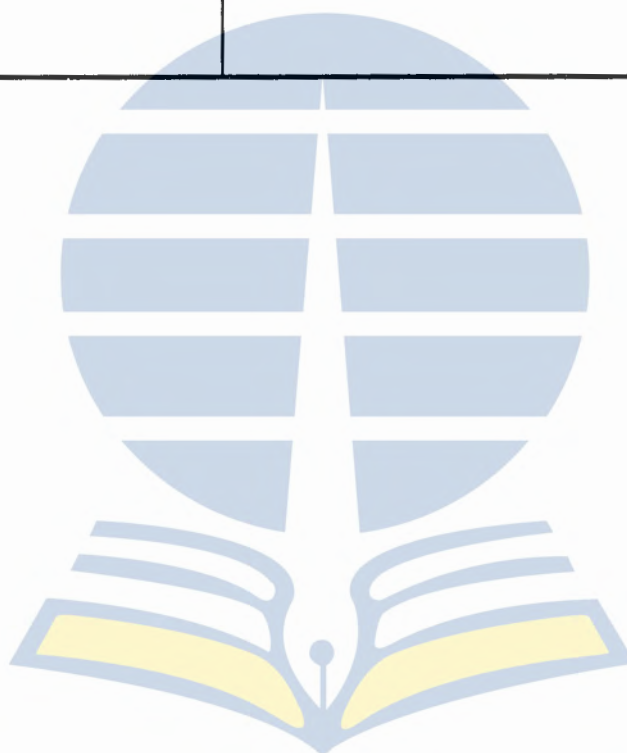


Nama : Royan Agustinus Siburian  
 Jabatan : PPL SP. 2 Desa Tg. Buka

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi dan Program Kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Lokasi SP. 2 Desa Tanjung Buka ?	: SPOK, Perubahan Sifat, perilaku dan Keterampilan untuk Pemberdayaan Petani. Program Kerja yaitu mengikuti program dari SKPD terkait Budidaya, pengetahuan, pengelolaan dan Pengolahan
2	Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat petani ?	: Transportasi menggunakan Perahu, Kendaraan Dinas, Brosur/pamflet, praktek dgn alat bantu, dll dalam memberikan penyuluhan atau informasi tentang pertanian
3	Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, jelaskan ?	: Pengenalan potensi Wilayah, Rembuk Tani, Membuat materi Program Kerja, Rapat dengan mencari solusi
4	Apakah PPL intens dalam melakukan/memberikan penyuluhan ke masyarakat petani tentang cara pengolahan dan pengelolaan pertanian, berapa kali dalam sebulan ?	: Cenderung per musim tanam, di luar musim tanam tidak melakukan penyuluh, tetapi di luar tersebut seperti konsultasi dan koordinasi intens, pertemuan kelompok sebulan sekali
5	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani di SP. 2 Desa Tanjung Buka ?	: Masih rendah, karena dari segi daya hasil, hasil panen kurang, daya beli, dari segi kepemilikan barang elektronik masih kurang
6	Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani dalam mengelola lahan pertanian ?	: yang diharapkan uang, yaitu bagaimana cara memasarkan suatu produk, infrastruktur jalan harus di sediakan, ongkos tinggi maka kendala di pemasaran
7	Apakah Sarana dan Prasarana Pertanian yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai bagi masyarakat petani ?	: Sudah sesuai atau memadai bagi masyarakat petani tapi belum maksimal karena kebutuhan Alsintan masih diperlukan terkait padi dan jagung, alat pengolahan hasil pertanian

8	Apakah Dinas Pertanian Kab. Bulungan sudah efektif dalam memberikan pelayanan, bantuan dan pendampingan ke masyarakat petani di SP. 2 Desa Tanjung Buka ?	Kalau untuk pelayanan dan memberikan bantuan sudah efektif (memberi respon) tapi terkait pendampingan ke lapangan sangat kurang atau belum efektif ( Jarang Turun )
9	Hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kab. Bulungan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani?	CPCL dilaksanakan tepat waktu, Fasilitas untuk pengadaan benih tidak tersedia, Pelayanan untuk pengembangan hortikultura berupa pengetahuan dan pelatihan
<b>B STRUKTUR BIROKRASI</b>		
1	Apakah sudah efektif kerjasama antara SKPD /Pokja, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP 2 Desa Tanjung Buka ?	: Sudah Efektif tapi belum maksimal, PU untuk irigasi pembersihan dan perawatan, koordinasi kurang, antara PPL dan Dinas pertanian ada keg PPL aja belum tau, terkait disperinda
2	Bagaimanakah Kinerja SKPD/Pokja dalam implementasi Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 2 Desa Tanjung Buka ?	: Kurang Koordinasi antar SKPD
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui SKPD/Pokja yaitu Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 2 Desa Tanjung Buka telah tersosialisasi dengan baik bagi PPL/Masyarakat Petani (Gapoktan) ?	: Program DeKaFE belum tersosialisasi dengan baik, diharapkan pemerintah dapat turun terjun langsung dan melihat kondisi di lapangan dan memenuhi serta memfasilitasi kebutuhan petani
2	Bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara SKPD / Pokja, PPL dan Masyarakat Petani/Gapoktan ?	: Pemimpin puncak bupati mengajak stake holder meninjau lokasi, agar mengetahui keinginan masyarakat ( Dari atas ke bawah ), tetapi kalo untuk paket kebijakan untuk pemberian bantuan diharapkan tidak bertahap melainkan utuh dilaksanakan
<b>D DISPOSISI</b>		

1	Tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja tentang adanya program Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 2 Desa Tanjung Buka ?	: Sikap dan Kemauan pasti untuk memajukan, tapi untuk kemampuan masih kurang di lihat dari background masih kurang maksimal
2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. 2 Desa Tanjung Buka ?	: Belum memenuhi harapan, dari segi infrastruktur masih kurang, sering berjanji tapi tidak bisa menepati, food estate ingin dicapai dari atas harus bisa menyiapkan pemasaran untuk menampung hasil pertanian, merencanakan suatu kegiatan harus dikerjakan hingga tuntas



Nama : Dedy Muharram SP  
 Jabatan : PPL SP. 7 Desa Tg. Buka

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi dan Program Kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Lokasi SP. 7 Desa Tanjung Buka ?	: Penyampaian informasi kaitannya dengan sasarannya pelaku utama yaitu petani, informasi terkait dengan sarana produksi yang tersedia, bagaimana penggunaannya, bagaimana cara mendapatkannya, pengaplikasian dalam keg usaha tani, penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pertanian.
2	Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat petani ?	: Metode Penyuluhan dengan menyampaikan informasi dengan pertemuan, diskusi tanya jawab, ceramah sedangkan media informasinya video, pamflet/brosur, slide, buku
3	Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, jelaskan ?	: SOP ada, diatur dalam lingkungan kerja dan juga menggunakan rencana kerja penyuluh, teratur dan terjadwal yang sifatnya fleksibel
4	Apakah PPL intens dalam melakukan/memberikan penyuluhan ke masyarakat petani tentang cara pengolahan dan pengelolaan pertanian, berapa kali dalam sebulan ?	: intens, dan selalu disepakati bersama, setiap bertemu selalu membahas terkait tentang pengolahan tanah, hama penyakit, dibahas di lapangan, terdapat latihan kunjungan perseorangan dgn membahas masalah-masalah yang ada, memberikan informasi yang baru dan membahas informasi lama yang belum diketahui petani
5	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani di SP. I Desa Tanjung Buka ?	: Kesejahteraan petani ada peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan, sulit sekali bertahan hidup atau meningkatkan kesejahteraan dengan cara bercocok tanam denga pangan apalagi dengan bukaan baru dan daerah pasang surut. Padi merupakan bahan baku pangan dihitung untung tetapi melihat hasil jauh dari hal tersebut.
6	Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani dalam mengelola lahan pertanian ?	: Kendala Irigasi kurang maksimal, Koordinasi kurang berjalan dengan baik, Pemasaran kurang efektif dan efesien, pendampingan yang efektif, pembuatan tanggul pematang luar tanah gambut keringnya lambat gambang runtuh dan banyak tanggul yang jebol, jalan usaha tani yang digandeng dengan pematang luar fungsinya tidak ada sama sekali

7	Apakah Sarana dan Prasarana Pertanian yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai bagi masyarakat petani ?	: Belum memadai bagi masyarakat petani
8	Apakah Dinas Pertanian Kab. Bulungan sudah efektif dalam memberikan pelayanan, bantuan dan pendampingan ke masyarakat petani di SP. 7 Desa Tanjung Buka ?	Sudah cukup efektif dalam memberikan pelayanan dan bantuan, tetapi dalam pendampingan ke masyarakat petani di lapangan masih kurang
9	Hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kab. Bulungan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani?	Jaminan dan Kompensasi lahan, secara program pmda untuk menanam padi dan memaksa mereka untuk tinggal di sana, kompensasi gagal panen, jaminan harga jual, dimana menjual, kerjasama dengan bulog,
<b>B STRUKTUR BIROKRASI</b>		
1	Apakah sudah efektif kerjasama antara SKPD /Pokja, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP 7 Desa Tanjung Buka ?	: Pokja tidak tahu, sejauh ini yang sering berkoordinasi yaitu dinas pertanian, food estate seperti apa, programnya seperti apa PPL tdk pernah dilibatkan sama sekali, smp dan smp ada dinas pendidikan, dinas transmigrasi, dinas pu dalam hal pembuatan kanal saluran primer dan skunder, pertanian tersier, menempatkan orang tempat tidak nyaman, lahan belum siap, fasilitas tidak lengkap, harus siap menanam, 20 kk sdh pergi krna jalan tidak bagus, akses transportasi tidak bagus, penerangan tidak ada, air bersih tidak ada
2	Bagaimanakah Kinerja SKPD/Pokja dalam implementasi Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 7 Desa Tanjung Buka ?	:
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui SKPD/Pokja yaitu Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 7 Desa Tanjung Buka telah tersosialisasi dengan baik bagi PPL/Masyarakat Petani (Gapoktan) ?	: Sosialisasi khusus tentang food estate belum ada, gaungnya saja, dan masyarakat petani belum tau food estate itu apa

2	Bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara SKPD / Pokja, PPL dan Masyarakat Petani/Gapoktan ?	: harusnya terjadwal, bebannya tidak hanya ke dinas pertanian dan PPL, tetapi harus saling sinergis antara skpd, belum ada komunikasi yg jelas
<b>D</b>	<b>DISPOSISI</b>	
1	Tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja tentang adanya program Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 7 Desa Tanjung Buka ?	: Sikap cukup, dalam pelaksanaan belum maksimal, kemauan seharusnya mendengarkan dari bawah ke atas, selama ini dari atas ke bawah
2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. 7 Desa Tanjung Buka ?	: Belum memenuhi harapan, kalau di dinas pertanian sdh cukup bagus dan punya tempat lebih baik di hati masyarakat petani

Nama : Kartira  
 Jabatan : PPL SP. 8 Desa Tg. Buka

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi dan Program Kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Lokasi SP. 8 Desa Tanjung Buka ?	: Memberikan penyuluhan terkait pertanian
2	Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat petani ?	: Kendaraan Air dan Kendaraan Roda Dua
3	Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, jelaskan ?	: Sop ada, sistem alur kerjanya diatur dalam lingkungan kerja menggunakan terencana kerja yang fleksibel
4	Apakah PPL intens dalam melakukan/memberikan penyuluhan ke masyarakat petani tentang cara pengolahan dan pengelolaan pertanian, berapa kali dalam sebulan ?	: Karena masih baru, belum terlalu intens masih dalam proses adaptasi dengan kelompok tani dan lingkungan, sebulan bisa 10 Kali pertemuan
5	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani di SP. 8 Desa Tanjung Buka ?	: Kesejahteraannya mulai meningkat, karena sudah ada yang memiliki alat elektronik
6	Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani dalam mengelola lahan pertanian ?	: -
7	Apakah Sarana dan Prasarana Pertanian yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai bagi masyarakat petani ?	: -
8	Apakah Dinas Pertanian Kab. Bulungan sudah efektif dalam memberikan pelayanan, bantuan dan pendampingan ke masyarakat petani di SP. 8 Desa Tanjung Buka ?	-

9	Hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kab. Bulungan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani?	-
<b>B</b>	<b>STRUKTUR BIROKRASI</b>	
1	Apakah sudah efektif kerjasama antara SKPD /Pokja, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP 8 Desa Tanjung Buka ?	: -
2	Bagaimanakah Kinerja SKPD/Pokja dalam implementasi Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 8 Desa Tanjung Buka ?	: -
<b>C</b>	<b>KOMUNIKASI</b>	
1	Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui SKPD/Pokja yaitu Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 8 Desa Tanjung Buka telah tersosialisasi dengan baik bagi PPL/Masyarakat Petani (Gapoktan) ?	: -
2	Bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara SKPD / Pokja, PPL dan Masyarakat Petani/Gapoktan ?	: -
<b>D</b>	<b>DISPOSISI</b>	
1	Ttentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja tentang adanya program Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di SP. 8 Desa Tanjung Buka ?	: -



2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. 8 Desa Tanjung Buka ?	: -
---	--	-----



Nama : Wahid  
 Jabatan : Ketua Gapoktan SP. 1 UPT. Desa Tg. Buka  
 Gapoktan : Tabuk Karya

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<p><b>SUMBER DAYA</b></p> <p>1</p> <p>Dalam satu GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) untuk wilayah, di SP. I Desa Tanjung Buka terdiri atas berapa kelompok tani dan apa nama GAPOKTAN nya, Jelaskan ?</p> <p>a. Dalam satu kelompok tani rata-rata berapa orang?</p> <p>b. Dalam satu Gapoktan rata-rata berapa kelompok tani?</p> <p>c. Sejak Kapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) SP. I Desa Tanjung Buka berdiri /dibentuk, apakah memiliki Struktur Organisasi, dan Program Kerjanya apa saja? Sebutkan</p> <p>2 Menurut Bapak apakah keberadaan penyuluh lapang sudah mencukupi untuk wilayah Tanjung Buka SP.1, apakah perlu ditambah dengan PPL Swakarsa dari petani, atau dibagi secara khusus, seperti PPL tanaman pangan, PPL Hortikultura, ppl peternakan dan lainnya?</p> <p>3 Bagaimanakah Tingkat Pendidikan dan usia Petani yang tergabung pada GAPOKTAN SP. I Desa Tanjung Buka,?</p> <p>4 Selain melakukan kegiatan usaha tani, Apakah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani memiliki pekerjaan diluar pertanian, jelaskan?</p> <p>5 Bagaimanakah peran ibu-ibu dan generasi muda dalam mendukung kegiatan berusaha tani di SP.1 Tg. Buka?</p>	<p>: 25 Orang paling banyak 49 Orang</p> <p>: 14 Kelompok Tani</p> <p>: 2008, memiliki Struktur Organisasi, Program Kerja yaitu Penanaman Padi, Jagung dan Sayuran</p> <p>: Untuk di bidang pertanian tanaman pangan sudah cukup, tetapi kalo untuk perikanan dan peternakan memang perlu</p> <p>: Bervariasi ada SD, SMP dan SMA, usia maksimal sekitar 60 Tahun minimal 19 Tahun kira2 15 orang</p> <p>: Mayoritas Buruh</p> <p>: Alhamdulillah cukup baik, dengan memiliki Wanita Kelompok Tani (KWT) dan Kelompok Remaja (Menanam padi secara bersama-sama)</p>

6	Jenis Komoditas Pertanian apa saja yang di tanamoleh Kelompok Tani dan dan diantara komoditas tersebut apakah yang menjadi unggulan?	: Padi, Jagung dan Kedelai (Pangan), Jeruk dan Semangka (Hortikultura) yang paling unggul padi dan jeruk siam
7	Apakah ada hambatan atau kendala yang di hadapi oleh KelompokTani dan Bagaimana harapan kedepan dalam mengelola lahan pertanian khususnya di wilayah SP1 Tg. Buka? a. Budidaya (jika ada) mulai dari persiapan lahan, Pengairan, Pembibitan, Pemeliharaan, Pemupukan, hingga panen b. Pascapanen (jika ada) c. Pengolahan hasil (jika ada) d. Pemasaran (jika ada) e. Permodalan	: Ada, diharapkan dapat memberikan Alat Mesin Pertanian agar dapat membantu petani  : Kesulitan memilih benih yang bagus, benih tidak pernah berganti petani pengennya benih varietas sama tapi dengan label yang berbeda, persiapan lahan, Pemeliharaan, pemupukan dan pengairan tidak kesulitan  : Kesulitan, kekurangan mesin power threserr yang ada 6 unit dengan 2 unit rusak minimal 1 kelompok 2 unit  : Tidak ada hambatan : Tidak ada hambatan, transportasi mahal dihitung dengan harga jual, istilahnya sudah diperhitungkan sedikit hasil yang penting lancar : Modal juga kesulitan, perlu adanya koperasi
8	Apakah perlu adanya lembaga Koperasi Simpan Pinjam atau cabang Bank Perkreditan Rakyat di wilayah SP.1 Tg, Buka untuk memudahkan bantuan permodalan?	: Sangat Perlu, apabila ada simpan pinjam apabila membutuhkan modal bisa minjam
9	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani GAPOKTANSP. I di DesaTanjung Buka ? apakah juga dipengaruhi dengan adanya kegiatan food estate yang telah berlangsung	: Belum sejahtera, harapan hidup adalah bertani, petani kebanyakan rugi
<b>B</b>	<b>STRUKTUR BIROKRASI</b>	
1	Bagaimanakah Bapak menilai kerjasama antara DinasPertanian, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP I DesaTanjungBuka?	: Untuk kerjasama Dinas Pertanian, PPL dan Petani cukup bagus, petani banyak dibantu oleh Dinas Pertanian

2	<p>Bagaimanakah Kinerja Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan di SP I Desa Tanjung Buka selama ini? Apakah perlu ditingkatkan dengan memangkas prosedur pelaporan dari lapangan ke dinas atau badan,</p>	<p>: Bagus, menjalin Komunikasi dengan baik, Prosedur Pelaporan perlu di tingkatkan karena prinsipnya dari bawah ke atas laporan dari petani petani mencatat, PPL yang melapor ke dinas</p>
3	<p>Bagaimanakah pelibatan aparat Desa, mulai dari Kades, Kepala UPT, dan Camat dalam setiap kegiatan Petanian.</p>	<p>Kades (Tidak ada) dan Ka. UPT (sudah dilepas), alhamdulillah camat selalu intens mengikuti keg pertanian</p>
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	<p>Apakah Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) rutin melaksanakan Pelatihan / Sosialisasi bagi Petani di SP. I Desa Tanjung Buka, pelatihan apa saja dan dilaksanakan dimana?</p>	<p>: Rutin tidak tapi pernah, pelatihan tanam, pelatihan Sekolah Lapang GP-PTT dan dilaksanakan di Balai dan Praktek di lapangan</p>
2	<p>Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan harapan petani dan kondisi lapangan dengan metode yang mudah di pahami oleh masyarakat petani?</p>	<p>: Sudah sesuai harapan dan mudah di pahami oleh masyarakat petani, dengan praktek langsung di lapangan</p>
3	<p>Menurut anda berapa kali dalam sebulan Dinas Pertanian / PPL harus melakukan Pelatihan / Sosialisasi tentang pertanian?</p>	<p>Keinginan petani minimal sebulan sekali untk pertanian, kalo untk PPL kalo bisa seminggu sekali, PPL tidak terjadwal dan perhatiannya penuh</p>
4	<p>Apakah saluran komunikasi juga dipakai petani dalam melakukan kordinasi dengan PPL seperti pemakaian HP, HT atau lainnya, jika tidak ada bagaimanakan prosedur pelaporan suatu kegiatan secara cepat dan tangap.</p>	<p>Komunikasi Langsung, apabila kebutuhan mendadak memerlukan HP, prosedur pelaporan dari petani ke PPL terjun ke lapangan secara bersama-sama dan mencatat pelaporan</p>
<b>D DISPOSISI</b>		
1	<p>Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam melakukan pendampingan kemasyarakat petani?</p>	<p>: Baik, melayani dengan sungguh-sungguh istilahnya berkomunikasi dengan baik</p>

2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan PPL sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. I Desa Tanjung Buka?	: Sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi
3	Bagaimana sikap Bapak jika petugas lapangan juga membantu bapak mencarikan peluang pasar/agent, tidak hanya memberikan teknologi budidaya	: Berterima kasih apabila PPL bisa mencari agent pemasaran tapi upaya belum ada dari PPL karena masih baru
4	Bagaimanakah menurut Bapak, peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan PPL yang sudah ada, apakah sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. I Desa Tanjung Buka?	: Sudah memenuhi harapan, apabila minta bantuan ke dinas pertanian selalu di bantu
5	Saran dan Harapan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Dinas Pertanian lebih di tingkatkan lagi, untuk alsintan harus di pilah2 dengan mengikuti kebutuhan petani</li> <li>: PPL, agar lebih intens melakukan pertemuan dengan petani di lapangan</li> <li>: Dinas Perhubungan, agar terjun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi dilapangan untuk memberikan berupa perahu atau terkait transportasi</li> <li>: Disperindagkop, agar bisa masuk ke SP I untuk memberikan pelatihan atau sosialisasi tentang pemasaran dan membentuk koperasi</li> <li>: PU, yaitu semenisasi halaman</li> </ul>

Nama : Zaenal Abidin  
 Jabatan : Ketua Gapoktan SP. 2 UPT. Desa Tg. Buka  
 Gapoktan : Jadi Mulya

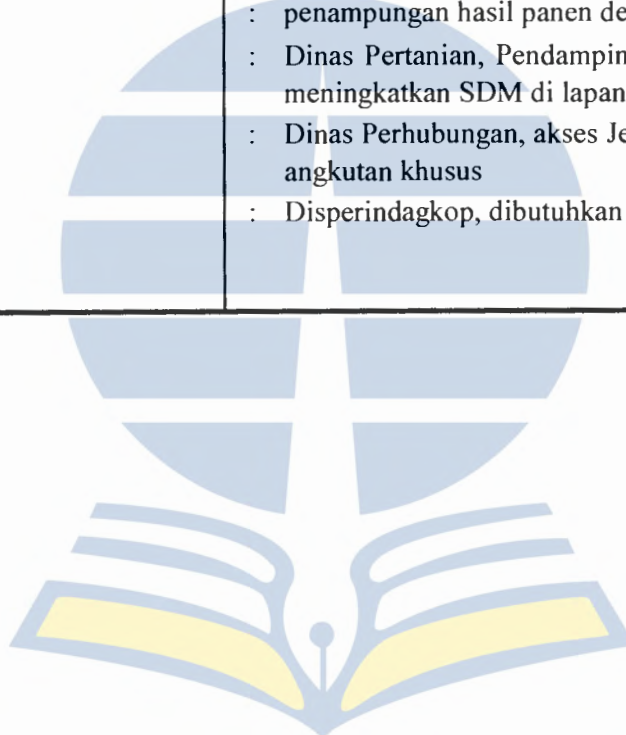
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	<p>Dalam satu GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) untuk wilayah, di SP. 2 Desa Tanjung Buka terdiri atas berapa kelompok tani dan apa nama GAPOKTAN nya, Jelaskan ?</p> <p>a. Dalam satu kelompok tani rata-rata berapa orang?</p> <p>b. Dalam satu Gapoktan rata-rata berapa kelompok tani?</p> <p>c. Sejak Kapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) SP. 2 Desa Tanjung Buka berdiri /dibentuk, apakah memiliki Struktur Organisasi, dan Program Kerjanya apa saja? Sebutkan</p>	<p>:</p> <p>: Rata - rata 18 Orang, tetapi ada yang 20 Orang dan 25 Orang ( tiap rt 1 Kelompok )</p> <p>: 13 Kelompok Tani</p> <p>: Tahun 2008, ada struktur organisasi, program kerja yaitu mengadakan musim tanam 1 dan 2 (P2P) padi palawija bukan tanam serempak tetapi panen serempak, hortikultura fokus tanam sayur di pekarangan, tanam jeruk dan lengkung,</p>
2	Menurut Bapak apakah keberadaan penyuluh lapang sudah mencukupi untuk wilayah Tanjung Buka SP.2, apakah perlu ditambah dengan PPL Swakarsa dari petani, atau dibagi secara khusus, seperti PPL tanaman pangan, PPL Hortikultura, ppl peternakan dan lainnya?	: 1 cukup, tetapi kalo bisa ada PPL pendamping yaitu PPL peternakan
3	Bagaimanakah Tingkat Pendidikan dan usia Petani yang tergabung pada GAPOKTAN SP. 2 Desa Tanjung Buka,?	: SD, SMP, SLTA dan usia petani 35 - 50 an tahun
4	Selain melakukan kegiatan usaha tani, Apakah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani memiliki pekerjaan diluar pertanian, jelaskan?	: nelayan dan buruh bangunan
5	Bagaimanakah peran ibu-ibu dan generasi muda dalam mendukung kegiatan berusaha tani di SP.2 Tg. Buka?	: kelompok wanita tani mendukung dalam tanam sayur-sayuran

6	Jenis Komoditas Pertanian apa saja yang di tanam oleh Kelompok Tani dan dan diantara komoditas tersebut apakah yang menjadi unggulan?	: Padi, Jagung, Kedelai (Pangan), Sayur-sayuran terong, kacang panjang, ketimun, lombok (Hortikultura) yang unggulan adalah padi dan jeruk
7	Apakah ada hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Kelompok Tani dan Bagaimana harapan kedepan dalam mengelola lahan pertanian khususnya di wilayah SP 2 Tg. Buka? a. Budidaya (jika ada) mulai dari persiapan lahan, Pengairan, Pembibitan, Pemeliharaan, Pemupukan, hingga panen b. Pascapanen (jika ada) c. Pengolahan hasil (jika ada) d. Pemasaran (jika ada) e. Permodalan	: Ada, harapan kedepan perlu di fasilitasi alat mesin pertanian  : Alsintan masih kurang, handtraktor dibutuhkan 6 unit, power thresher 10 unit, alkon untuk pompa air 1 kel 2 unit karena areal pasang surut, mesin tanam 14 unit, mini tiller 5 unit untuk mencukupi kebutuhan secara keseluruhan dan benih pangan, hortik dan perkebunan juga di butuhkan  : Tenaga Kerja Kurang hingga membutuhkan mesin pasca panen  : Tidak ada kendala  : Pemasaran di bulog karena membeli agak rendah dan di harapkan ada subsidi dari pemerintah daerah  : Butuh sekali, dari tahun 2008 PUAP belum terakomodir, koperasi bisa untuk simpan pinjam
8	Apakah perlu adanya lembaga Koperasi Simpan Pinjam atau cabang Bank Perkreditan Rakyat di wilayah SP.2 Tg, Buka untuk memudahkan bantuan permodalan?	: Perlu, karena petani ingin pinjaman yang lunak dari pihak BPR bisa membina agar usaha ini bisa berjalan dengan baik
9	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani GAPOKTAN SP. 2 di DesaTanjung Buka ? apakah juga dipengaruhi dengan adanya kegiatan food estate yang telah berlangsung	: belum sejahtera dan masih rendah, terkait pendapatan masyarakat, kalau terkait food estate iya mempengaruhi
<b>B</b> 1	<b>STRUKTUR BIROKRASI</b> Bagaimanakah Bapak menilai kerjasama antara DinasPertanian, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP 2 DesaTanjungBuka?	: Bagus, Dinas pertanian dan PPL selalu memberikan informasi dan manfaat bagi petani

2	<p>Bagaimanakah Kinerja Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan di SP 2 Desa Tanjung Buka selama ini? Apakah perlu ditingkatkan dengan memangkas prosedur pelaporan dari lapangan ke dinas atau badan,</p>	<p>: Kinerja nya sudah baik, selaku gapoktan memberikan laporan ke PPL kadang bersama PPL dalam rembuk tani, diharapkan prosedur pelaporan juga lebih di tingkatkan lagi</p>
3	<p>Bagaimanakah pelibatan aparat Desa, mulai dari Kades, Kepala UPT, dan Camat dalam setiap kegiatan Petanian.</p>	<p>: Belum terlibat secara rutin di petani kecil dalam hal memantau, tapi kalo ada kegiatan panen raya dan sekolah lapang selalu terlibat</p>
<b>C</b>	<b>KOMUNIKASI</b>	
1	<p>Apakah Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) rutin melaksanakan Pelatihan / Sosialisasi bagi Petani di SP. 2 Desa Tanjung Buka, pelatihan apa saja dan dilaksanakan dimana?</p>	<p>: Rutin kalo ada program pangan saja, sosialisasi tanam dan GP-PTT, setahun ada 6 kali pertemuan</p>
2	<p>Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan harapan petani dan kondisi lapangan dengan metode yang mudah di pahami oleh masyarakat petani?</p>	<p>: sudah memenuhi harapan dan dapat di pahami oleh masyarakat</p>
3	<p>Menurut anda berapa kali dalam sebulan Dinas Pertanian / PPL harus melakukan Pelatihan / Sosialisasi tentang pertanian?</p>	<p>: di harapkan ke Dinas Pertanian sebulan sekali, PPL seminggu 2 kali, selama ini dinas pertanian kira-kira setahun ada 6 kali pertemuan/pelatihan</p>
4	<p>Apakah saluran komunikasi juga dipakai petani dalam melakukan kordinasi dengan PPL seperti pemakaian HP, HT atau lainnya, jika tidak ada bagaimanakan prosedur pelaporan suatu kegiatan secara cepat dan tangap.</p>	<p>: Pertemuan langsung kadang komunikasi hp, musyawarah dengan kelompok tani dan menyampaikan laporan perkembangan pertanian</p>
<b>D</b>	<b>DISPOSISI</b>	
1	<p>Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam melakukan pendampingan kemasyarakat petani?</p>	<p>: Sikapnya sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi</p>



2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan PPL sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. 2 Desa Tanjung Buka?	: sudah bagus, yang pasti kerjasama dalam pemasaran agar ditepati
3	Bagaimana sikap Bapak jika petugas lapangan juga membantu bapak mencarikan peluang pasar/agent, tidak hanya memberikan teknologi budidaya	: senang sekali, PPL dan Gapoktan mencari informasi tentang pemasaran
4	Saran dan Harapan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Mendukung program food estate, harus ada sosialisasi tentang food estate</li> <li>: penampungan hasil panen dengan harga yg sesuai</li> <li>: Dinas Pertanian, Pendampingan di lapangan rutin guna meningkatkan SDM di lapangan</li> <li>: Dinas Perhubungan, akses Jembatan, jalan, dermaga dan angkutan khusus</li> <li>: Disperindagkop, dibutuhkan koperasi untuk permodalan</li> </ul>



Nama : Sukanto  
 Jabatan : Ketua Gapoktan SP. 7 UPT. Desa Tg. Buka  
 Gapoktan : Wono Mukti

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	<p>Dalam satu GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) untuk wilayah, di SP. 7 Desa Tanjung Buka terdiri atas berapa kelompok tani dan apa nama GAPOKTAN nya, Jelaskan ?</p>	
	a. Dalam satu kelompok tani rata-rata berapa orang?	: Rata-rata 20 orang, paling banyak ada 25 orang dan 29 orang
	b. Dalam satu Gapoktan rata-rata berapa kelompok tani?	: 10 Kelompok Tani
	c. Sejak Kapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) SP. 7 Desa Tanjung Buka berdiri /dibentuk, apakah memiliki Struktur Organisasi, dan Program Kerjanya apa saja? Sebutkan	: Tahun 2008, Struktur Organisasi ada, program kerja di pertanian, pelaksanaan tanaman pangan masa tanam 1 dan masa tanam 2, penanaman masa bero pangan dan hortik
2	Menurut Bapak apakah keberadaan penyuluh lapang sudah mencukupi untuk wilayah Tanjung Buka SP.7, apakah perlu ditambah dengan PPL Swakarsa dari petani, atau dibagi secara khusus, seperti PPL tanaman pangan, PPL Hortikultura, ppl peternakan dan lainnya?	: sebenarnya PPL satu wilayah sudah cukup, tetapi harapannya dibutuhkan pendampingan PPL Perikanan dan Peternakan, dalam satu pemukiman tidak cukup 1 PPL
3	Bagaimanakah Tingkat Pendidikan dan usia Petani yang tergabung pada GAPOKTAN SP. 7 Desa Tanjung Buka,?	: Secara umum SD, SMP, SLTA, Sarjana dan Non Akademik, usia petani yang paling muda 35 Tahun
4	Selain melakukan kegiatan usaha tani, Apakah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani memiliki pekerjaan diluar pertanian, jelaskan?	: Ada, ada guru honor, tenaga buruh, wirausaha dan nelayan
5	Bagaimanakah peran ibu-ibu dan generasi muda dalam mendukung kegiatan berusaha tani di SP.7 Tg. Buka?	: Ibu2 kegiatannya sangat solid, kelompok wanita tani tapi pembinaannya masih kurang dari PPL dan Dinas Pertanian

6	Jenis Komoditas Pertanian apa saja yang di tanam oleh Kelompok Tani dan diantara komoditas tersebut apakah yang menjadi unggulan?	: Pertanian (Padi, Kedelai, Sayuran, Jeruk, Kelapa, Rambutan dan Jambu Air ) yang paling unggul Padi
7	Apakah ada hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Kelompok Tani dan Bagaimana harapan kedepan dalam mengelola lahan pertanian khususnya di wilayah SP.7 Tg. Buka?	: Ada, harapan kedepan sebelum bantuan di distribusikan, harus ada koordinasi agar bisa menyesuaikan kebutuhan di lapangan
	a. Budidaya (jika ada) mulai dari persiapan lahan, Pengairan, Pembibitan, Pemeliharaan, Pemupukan, hingga panen	: dari sisi benih dengan kualitas terjamin, pengolahan tanah secara manual dengan kondisi lahan per kk 2 Ha perlu ada alat bajak secara modern, wilayah pasang surut dalam waktu beberapa jam dalam satu musim dengan jumlah 1 kel hanya 5 Ha perlu mesin pompa air
	b. Pascapanen (jika ada)	: Pengolahan pasca panen menggunakan mobil thresher, power thresher, harapannya kalo bisa thresher pake mesin ketinting
	c. Pengolahan hasil (jika ada)	: Perlu Pembinaan terkait pengolahan hasil
	d. Pemasaran (jika ada)	: belum ada kerjasama, baik dari pemerintah terutama disperindagkop tentang kesepakatan harga jual, pernah kerjasama dgn bulog, tetapi bulog bisa menerima dgn harga yg rendah, walau harga bulog menggunakan standar nasional kalau bisa dapat di subsidi kekurangannya di APBD
	e. Permodalan	: selama ini modal murni dari Petani dan Gerakan penerapan pengolahan pertanian, di tiap desa permodalan model PUAP ada kendalanya yaitu status dana PUAP bisa di distribusikan dgn syarat desanya harus definitif karena tinggal di satuan pemukiman jadi belum bisa sedangkan di naungi desa induk sedangkan desa induk sudah menerima PUAP sedangkan petani dalam pengembangan pertanian sangat antusias
8	Apakah perlu adanya lembaga Koperasi Simpan Pinjam atau cabang Bank Perkreditan Rakyat di wilayah SP.7 Tg, Buka untuk memudahkan bantuan permodalan?	: sangat perlu dgn syarat kalau membutuhkan surat jaminan harus fleksibel, artinya jangan terlalu baku dengan aturan, aturan harus di barengi dengan kebijakan, di sp 7 semua lahan bersertifikat dgn catatan sertifikat bisa di jadikan jaminan di tahun 2020, di sp 7 ada koperasi tapi belum bisa berkembang

9	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani GAPOKTAN SP. 7 di Desa Tanjung Buka ? apakah juga dipengaruhi dengan adanya kegiatan food estate yang telah berlangsung	: Belum ada merasakan sentuhan terkait food estate, bantuan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan petani, secara umum kesejahteraan masyarakat petani masih rendah dipengaruhi banyak faktor yaitu Unit Pemukiman tidak sama dengan desa, perlu banyak bantuan dari SKPD yang terkait Pokja
<b>B STRUKTUR BIROKRASI</b>		
1	Bagaimanakah Bapak menilai kerjasama antara Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP 7 Desa Tanjung Buka?	: Khusus dinas pertanian sangat baik kecuali dinas lain, karena dinas pertanian semua diakomodir dan ditindak lanjuti benar2 sesuai dgn manfaat dan kebutuhan petani, PPL sebagai fasilitator dan sangat aktif walau tiap hari tidak masuk tapi sering komunikasi
2	Bagaimanakah Kinerja Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan di SP 7 Desa Tanjung Buka selama ini? Apakah perlu ditingkatkan dengan memangkas prosedur pelaporan dari lapangan ke dinas atau badan,	: Food estate ingin dikembangkan harapannya kelompok tani lebih di tingkatkan kinerjanya dan mempunyai peran dgn cara kerja yang semangat agar dapat di beri reward atau insentif, Kinerja Dinas Pertanian dan PPL sudah bagus
3	Bagaimanakah pelibatan aparat Desa, mulai dari Kades, Kepala UPT, dan Camat dalam setiap kegiatan Petanian.	: mereka sebatas mengetahui artinya kades cenderung lebih memikirkan bagaimana mengembangkan desa, padahal petani ini banyak sekali masalahnya dari sisi pertanian, kalo kegiatan panen selalu terlibat
<b>C KOMUNIKASI</b>		
1	Apakah Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) rutin melaksanakan Pelatihan / Sosialisasi bagi Petani di SP. 7 Desa Tanjung Buka, pelatihan apa saja dan dilaksanakan dimana?	: PPL rutin 3 hari sekali selalu melakukan pertemuan, dinas pertanian melakukan sekolah lapang setingkat di BPP, sosialisasi sekali di wilayah desa, biasanya 2 kali dalam sebulan
2	Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan harapan petani dan kondisi lapangan dengan metode yang mudah di pahami oleh masyarakat petani?	: Ilmu sudah dimiliki oleh petani, PPL dan dinas pertanian memberikan materi mudah terserap oleh petani
3	Menurut anda berapa kali dalam sebulan Dinas Pertanian / PPL harus melakukan Pelatihan / Sosialisasi tentang pertanian?	: penyuluhan/sosialisasi di butuhkan tapi lebih efektif pertemuan dilakukan secara langsung di lapangan, PPL dan Dinas Pertanian sering

4	Apakah saluran komunikasi juga dipakai petani dalam melakukan kordinasi dengan PPL seperti pemakaian HP, HT atau lainnya, jika tidak ada bagaimanakan prosedur pelaporan suatu kegiatan secara cepat dan tangap.	Menggunakan HP dan komunikasi langsung
<b>D</b>	<b>DISPOSISI</b>	
1	Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam melakukan pendampingan kemasyarakat petani?	: sikap sudah bagus, sudah dipahami, menyadari dan dimengerti bahwa kaltara merupakan baru dan SDM yang kurang akibat terpisahnya PPL ke BP2KP
2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan PPL sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. 7 Desa Tanjung Buka?	: dinas pertanian iya sudah memenuhi, kalau dari pusat dan propinsi harus di tingkatkan lagi
3	Bagaimana sikap Bapak jika petugas lapangan juga membantu bapak mencarikan peluang pasar/agent, tidak hanya memberikan teknologi budidaya	: Harapan petani kalau bisa ada suatu link, kinerja atau penghubung dari tiap kabupaten terkait komunikasi, petani menanam padi dan melimpah harapannya bisa barter dan pemasarannya bisa lancar, petani antusias menanam palawija, dan harapan punya pasar tani di tanjung selor agar dapat menampung hasil pertanian dari petani, harapannya PPL dapat membantu dalam mencari peluang pasar
4	Saran dan Harapan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Dinas Pertanian, SDM di tambah agar kinerja lebih maksimal</li> <li>: Dinas Perhubungan dan PU, akses dan infrastruktur lebih di prioritaskan terutama jembatan dari desa ke pusat kota, kalo belum bisa mungkin dibantu 2 unit perahu dgn muatan 7 ton dari lokasi ke kota</li> <li>: Disperindagkop, untuk memberikan semangat ke petani dapat memberikan pembinaan koperasi dan memberikan jalan ke para investor agar dapat memudahkan permodalan</li> </ul>

Nama : Sabar  
 Jabatan : Ketua Gapoktan SP. 8 UPT. Desa Tg. Buka  
 Gapoktan : Subur Makmur

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
A.	<b>SUMBER DAYA</b>	
1	<p>Dalam satu GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) untuk wilayah, di SP. 8 Desa Tanjung Buka terdiri atas berapa kelompok tani dan apa nama GAPOKTAN nya, Jelaskan ?</p>	
	a. Dalam satu kelompok tani rata-rata berapa orang?	: Rata-rata 25 Orang, Paling banyak 46 orang
	b. Dalam satu Gapoktan rata-rata berapa kelompok tani?	: 10 Kelompok Tani
	c. Sejak Kapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) SP. 8 Desa Tanjung Buka berdiri /dibentuk, apakah memiliki Struktur Organisasi, dan Program Kerjanya apa saja? Sebutkan	: Sejak Tahun 2011, Struktur Organisasi ada, Program Kerja yaitu pengolahan lahan, pasca panen, memfasilitasi hasil pertanian
2	Menurut Bapak apakah keberadaan penyuluh lapang sudah mencukupi untuk wilayah Tanjung Buka SP.8, apakah perlu ditambah dengan PPL Swakarsa dari petani, atau dibagi secara khusus, seperti PPL tanaman pangan, PPL Hortikultura, ppl peternakan dan lainnya?	: Tidak Perlu, tetapi PPL yang ada kurang maksimal karena masih 3-4 bulan menjadi penyuluh
3	Bagaimanakah Tingkat Pendidikan dan usia Petani yang tergabung pada GAPOKTAN SP. 8 Desa Tanjung Buka,?	: SD, SMP dan SMA, anggotanya ada yg sarjana, usianya maksimal 40 an
4	Selain melakukan kegiatan usaha tani, Apakah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani memiliki pekerjaan diluar pertanian, jelaskan?	: mayoritas buruh dan ada sebagian kecil nelayan
5	Bagaimanakah peran ibu-ibu dan generasi muda dalam mendukung kegiatan berusaha tani di SP.8 Tg. Buka?	: Peran ibu -ibu tergabung dalam Kelompok Wanita Tani berperan pengolahan hasil panen, pengolahan siap saji misalnya pisang dan ubi kayu di bikin kripik, padi dibuat tepung kalau untuk generasi muda membantu mengurus lahan pertanian

6	Jenis Komoditas Pertanian apa saja yang di tanam oleh Kelompok Tani dan dan diantara komoditas tersebut apakah yang menjadi unggulan?	: padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran (kacang panjang, ketimun, tomat, cabe, bayam, kangkung) yang menjadi unggulan hortik yaitu sayur seperti mentimun dan cabe, pangan yang unggul adalah padi
7	Apakah ada hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Kelompok Tani dan Bagaimana harapan kedepan dalam mengelola lahan pertanian khususnya di wilayah SP.8 Tg. Buka?  a. Budidaya (jika ada) mulai dari persiapan lahan, Pengairan, Pembibitan, Pemeliharaan, Pemupukan, hingga panen b. Pascapanen (jika ada) c. Pengolahan hasil (jika ada) d. Pemasaran (jika ada) e. Permodalan	: Ada  : Perlu PPL Khusus terkait pengendalian hama tanaman terpadu  : Tidak ada hambatan : bagus, karena yang berperan dari ibu2 nya yaitu KWT tetapi pengemasan masih dari petani sendiri sehingga perlu di fasilitasi packing : terkendala dgn jembatan penghubung antara desa dan kota, rugi karena biaya transportasi membengkak : masih kurang, saat ini memfasilitasi permodalan masing dgn modal sendiri sehingga butuh sistem lunak
8	Apakah perlu adanya lembaga Koperasi Simpan Pinjam atau cabang Bank Perkreditan Rakyat di wilayah SP.8 Tg, Buka untuk memudahkan bantuan permodalan?	: perlu, karena permodalan petani masih memerlukan jaminan, selaku transmigrasi masih terkendala dgn jaminan, karena sertifikat belum terbit harapannya bisa di permudah oleh perbankan yang ada
9	Bagaimanakah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani GAPOKTANSP. 8 di Desa Tanjung Buka ? apakah juga dipengaruhi dengan adanya kegiatan food estate yang telah berlangsung	: organisasi gapoktan dan kelompok tani belum sejahtera, perlu fasilitasi dari pemerintah berupa insentif, secara umum kesejahteraan petani masih rendah
<b>B</b> 1	<b>STRUKTUR BIROKRASI</b> Bagaimanakah Bapak menilai kerjasama antara Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani di SP 8 Desa Tanjung Buka?	: kerjasama sudah bagus, istilahnya bantuan langsung ke petani selalu di fasilitasi ( Dinas Pertanian ) dan kalo PPL belum karena masih baru, PPL yang lama kerjasamanya sudah bagus

2	Bagaimanakah Kinerja Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan di SP 8 Desa Tanjung Buka selama ini? Apakah perlu ditingkatkan dengan memangkas prosedur pelaporan dari lapangan ke dinas atau badan,	: kinerja pertanian sudah bagus karena sifatnya membantu dalam mendistribusikan, kurang maksimalnya yaitu dalam pendampingan agar penanaman bisa maksimal, kinerja PPL belum maksimal krna masih baru, prosedur pelaporan perlu di tingkatkan PPL punya data petani dan dilaporkan ke dinas dan perlu di tingkatkan pelaporannya
3	Bagaimanakah pelibatan aparat Desa, mulai dari Kades, Kepala UPT, dan Camat dalam setiap kegiatan Pertanian.	: kades belum ada, yg ada UPT peran Ka.UPT sdh bagus, kegiatan pertemuan selalu terlibat
<b>C</b>	<b>KOMUNIKASI</b>	
1	Apakah Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) rutin melaksanakan Pelatihan / Sosialisasi bagi Petani di SP. 8 Desa Tanjung Buka, pelatihan apa saja dan dilaksanakan dimana?	: engga rutin, pelatihan yang telah dilaksanakan tentang pasca panen, pengolahan lahan, pembuatan pupuk organik, pestisida organik, sosialisasi ternak sapi/CPCL dan pelatihan di laksanakan di balai/Aula dan Praktek di Lapangan
2	Apakah materi yang di sampaikan sudah sesuai dengan harapan petani dan kondisi lapangan dengan metode yang mudah di pahami oleh masyarakat petani?	: mudah di pahami, karena langsung praktek kalo di tingkat petani teori aja kurang memahami
3	Menurut anda berapa kali dalam sebulan Dinas Pertanian / PPL harus melakukan Pelatihan / Sosialisasi tentang pertanian?	: minimal 1 bulan sekali untuk SKPD, minimal 2 kali dalam 1 minggu untuk melakukan pendampingan
4	Apakah saluran komunikasi juga dipakai petani dalam melakukan kordinasi dengan PPL seperti pemakaian HP, HT atau lainnya, jika tidak ada bagaimanakan prosedur pelaporan suatu kegiatan secara cepat dan tangap.	: lisan, komunikasi lewat HP malah susah dan tidak pas, kalo bisa ketemu dan menyelesaikan suatu permasalahan disampaikan ke petani, tetapi PPL yang baru masih belum bisa adaptasi dgn masyarakat
<b>D</b>	<b>DISPOSISI</b>	



1	Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam melakukan pendampingan masyarakat petani?	: sikap dinas pertanian dan ppl kurang maksimal dalam melakukan pendampingan
2	Apakah peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan PPL sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi masyarakat petani di SP. 8 Desa Tanjung Buka?	: Peranan dinas pertanian sudah memenuhi harapan karena sudah banyak memberi manfaat bagi petani, Peranan PPL yang baru belum berperan diharapkan harus di berikan pengarahan lagi dari atasannya, kalau PPL yang lama sudah memenuhi harapan
3	Bagaimana sikap Bapak jika petugas lapangan juga membantu bapak mencarikan peluang pasar/agent, tidak hanya memberikan teknologi budidaya	: sangat senang sekali tapi PPL yang sekarang belum ada upaya ke arah tersebut
4	Saran dan Harapan Petani	: pemasaran di matangkan dulu baru program di turunkan : PPL kinerjanya harus di tingkatkan lagi : Dinas perhubungan, terkait transportasi jalan dan jembatan : disperindagkop harus berperan dalam memasarkan produk



Samarinda, 12 Oktober 2015

Nomor : ~~06~~ UN.31.46/11-2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. 1. Sekda Kabupaten Bulungan  
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan  
3. Asisten II Sekda Kabupaten Bulungan  
di  
Tanjung Selor


Sehubungan dengan akan adanya rencana penelitian Tesis yang merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ-UJ Samarinda tersebut di bawah ini:

Nama : Nurmawati, S1  
NIM : 500025084  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik UJ  
Judul Tesis : Implementasi Pengembangan Delta Kayan Food Estate  
(DeKaFe) di Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan.

Untuk keperluan tersebut diatas, kami mohon izin mengadakan penelitian dan permintaan data serta kesediaan untuk menjadi Informan. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak kami mengucapkan terima kasih

Kepala UPBJJ-UJ Samarinda

  
Drs. Yurizal Rahman, M.KKK  
NIP. 195406111987031001

**BUPATI BULUNGAN****KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR : 490/K-VI/520/2011****TENTANG****PENETAPAN KAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
*FOOD ESTATE* KABUPATEN BULUNGAN****BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Bulungan pada khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya, bersifat lintas sektor dan multidisipliner, sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Instansi lintas sektor terkait;
  - bahwa dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu menetapkan suatu Kawasan pembudidayaan pangan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Kawasan Pembangunagn dan Pengembangan *Food Estate* Kabupaten Bulungan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 );
  - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5073);
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2010 tentang tatacara penetapak kawasan khusus (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomoe 59
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Nomor 3 seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2002 tentang <sup>12296.101</sup> Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Nomor 3 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan *FOOD ESTATE* di Kabupaten Bulungan sebagaimana tersebut dalam peta lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Mempermudah upaya koordinasi antar instansi lintas sektor terkait dalam memfokuskan Pembangunan dan Pengembangan *FOOD ESTATE* di Kabupaten Bulungan;
  2. Mempermudah upaya pemantauan pemanfaatan ruang bidang pangan, sehingga mencegah terjadinya *overlapping* pemanfaatan ruang;
  3. Menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan investasi di bidang pangan dan menjadi katalisator mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat Agroindustri yang maju;
- KETIGA : Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pangan di Kawasan *FOOD ESTATE* Kabupaten Bulungan berpedoman pada peraturan dan mekanisme pemanfaatan ruang yang berlaku;
- KELIMA ; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

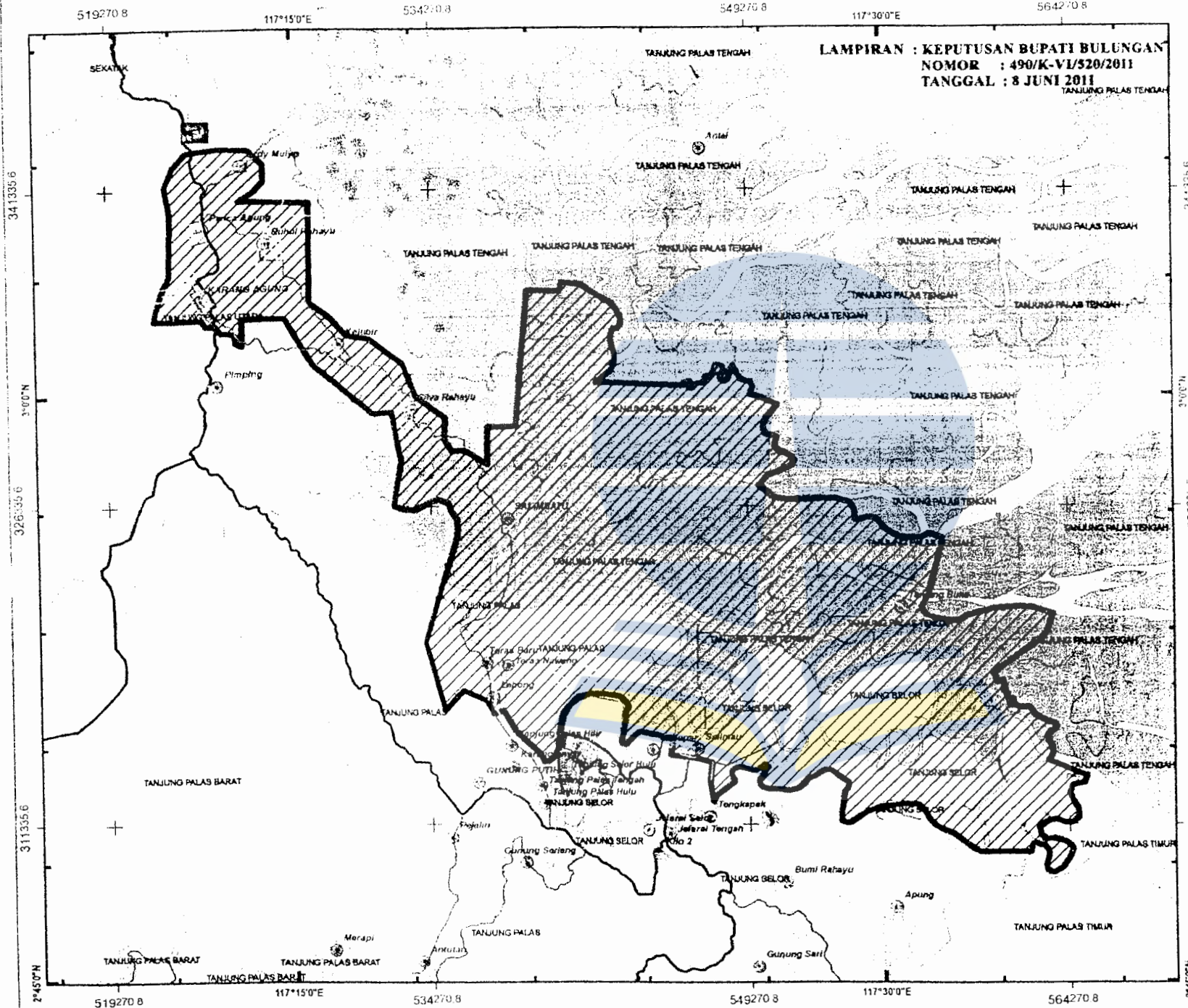
Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 8 Juni 2011

BUPATI BULUNGAN,

  
BUDIMAN ARIFIN

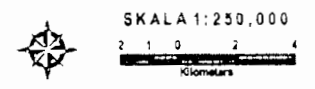
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim di Samarinda
4. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Bulungan di Tg. Selor
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Bulungan di Tanjung Selor
9. Kepala Dinas Kekerjaan Umum Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala BPN Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
11. Kepala Bagian Hukum Setkab Bulungan di Tanjung Selor
12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilkab Bulungan di Tanjung Selor
13. Kepala Bagian Perekonomian Setwilkab Bulungan di Tanjung Selor
14. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN  
 NOMOR : 490/K-VI/520/2011  
 TANGGAL : 8 JUNI 2011

PETA  
 PENETAPAN  
 KAWASAN FOOD ESTATE BULUNGAN  
 (50.000 Ha)  
 KABUPATEN BULUNGAN



KETERANGAN

Sistem Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Geografi dan UTM
Datum	WGS 84
Zone	Utara 50

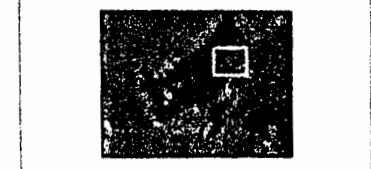
- Legend
- Ibu\_kota\_Desa
  - Arter Primer
  - Kolektor Primer
  - Kolektor Sekunder
  - Kawasan\_Food\_Estate\_Bulungan

- SUMBER PETA
1. Peta RBI Skala 1:50000 Th. 1991 BAKOSURTANAL
  2. Peta Administrasi Kab. Bulungan Skala 1:200.000 Tahun 2007, BAPPEDA KAB. BULUNGAN
  3. Hasil Analisis Rawan Bencana Skala 1:50.000, Kabupaten Bulungan, 2010
  4. Hasil Analisis Kemampuan Lahan Skala 1:300.000, Kabupaten Bulungan, 2010
  5. Hasil Analisis Keterlntasan Jalan Skala 1:300.000 Kabupaten Bulungan, 2010
  6. Monev Ciri Bawah SPOT-4 Tahun 2008-2010 Skala 1:50.000, Kabupaten Bulungan, 2010
  7. Peta Kawasan Hutan, Skala 1:750.000, Kabupaten Bulungan, 2009

Ditetapkan di Tanjung Selor  
 Pada tanggal : 8 Juni 2011

BUPATI BULUNGAN  
  
 DRs. BUDIMAN ARIFIN, M.Si

LOKASI K.A.B. BULUNGAN, KALTIM



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN BULUNGAN  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



## BUPATI BULUNGAN

### SALINAN

### KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR : 431/K-VII/050/2012

### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DELTA KAYAN FOOD ESTATE KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012

#### BUPATI BULUNGAN,

**Membaca** : Surat An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/483/Bapp.03/V/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Usulan Penerbitan Keputusan Bupati;

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka penumbuhan agroindustri pangan di Kabupaten Bulungan, dikembangkan penumbuhan kawasan sentra industri pangan pada areal Delta Kayan dengan sebutan Delta Kayan Food Estate;
- b. bahwa dalam rangka percepatan, pelaksanaan dan monitoring Delta Kayan Food Estate dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA);
- c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sesuai tugas dan fungsinya terkait langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas Kelompok Kerja (POKJA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan Tahun 2012;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 1959);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 26 );

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 1148/HK-XII/900/2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2012;
  2. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 180/189/HK-XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Usulan Pengajuan Keputusan Bupati Tahun 2012;
  3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 003.1/154/III/org.II/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tata Naskah Dinas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan, dengan Susunan Kelompok Kerja (POKJA) sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Kelompok	Nama	Jabatan
I	Pembina	Drs. H. Budiman Arifin, M.Si	Bupati Bulungan
		Dr. Drs. Liet Ingai, M.Si	Wakil Bupati Bulungan
		H. Hasbullah	Ketua DPRD Kab. Bulungan
II	Ketua	H. Sudjati, SH	Sekretaris Daerah
III	Wakil Ketua	Drs. H. Sugiono, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian, Kesejahteraan & Pembangunan Kab. Bulungan



IV	Sekretaris	Ir. H. M. Idham, M.Si	Kepala Dinas Pertanian Kab. Bulungan
V	Wakil Sekretaris	Ir. H. Syaiful Herman, MAP	Kepala Bappeda Kab. Bulungan
VI	Bidang-bidang:		
	<b>Bid. Infrastruktur</b>	Drs. Sutrisno	Kepala Dinas Nakertrans Kab. Bulungan
		H. Zainal Abidin, ST	Kepala Dinas PU Kab. Bulungan
		Ir. M. Ali. P. Khar	Kepala Dinas Pertamb. & Energi Kab. Bulungan
		Drs. H. Hamidan, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulungan
		Ir. Timbul Simanjuntak	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan
		Drs. Zainuddin, MAP	Kepala Bapedalda Kab. Bulungan
		Haerumuddin, SH, MAP	Kepala Diknas Kab. Bulungan
		dr. H. Idewan Budi Santoso, M.Si	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bulungan
		Adriani, ST, M.AP	Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Bulungan
	<b>Bid. Kelembagaan</b>	Ajer Supriyono, SE	Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bulungan
		dr.H.Burhanuddin, M.SI	Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan
		Dwi Setyobudiotomo, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bulungan
		AKBP Hari Nugroho. SIK	Kapolres Bulungan

	Letkol. Inf. Gema Repelita	Komandan Kodim Kab. Bulungan
	Hj. Asnah Heriyani, SE	Kepala BPMD Kab. Bulungan
	H. Abdul Djalil, S.Sos, MAP	Camat Tg. Selor
	Abu Bakar, SH	Camat Tg. Palas Timur
	Drs. Ahmad Safri	Camat Tg. Palas Tengah
	Errin Wiranda, SE	Camat Tg. Palas
	Edy Jumani, SE	Camat Tg. Palas Utara
	Risdianto, S.Pi, M.Si	Kabid. Sosbud Kab. Bulungan
	Fuad, SE	Lurah Tg. Selor Hilir
	Moh. Roem	Lurah Tg. Selor Timur
	Dra. Tanti	Lurah Tg. Palas Hilir
	Daud Ingan	Kepala Desa Teras Nawang
	Herodes	Kepala Desa Teras Baru
	Zakaria	Kepala Desa Salimbatu
	Sumastur	Kepala UPT SP 1 Tanjung Buka
	Sutomo	Kepala UPT SP 2 Tanjung Buka
	Sujarwo	Kepala UPT SP 7 Tanjung Buka
	Suwito	Kepala UPT SP 8 Tanjung Buka
	<b>Bidang Produksi</b>	
	Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.AP	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bulungan
	Hj. Indriyati, SH, M.Si	Kepala Bag. Hukum Kab. Bulungan

	Drs. H. Iriansyah, M.Si	Kepala Bag. Ekonomi Kab. Bulungan
	Ir. Risham Riyadi, M.Si	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bulungan
	Ir. Heri Rudiono	Kabid. Bina Tanaman & Pangan Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	Ir. Nurhamdi	Kabid. Bina Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	Tri Joko Santoso, SP, MM	Kabid. Bina Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	Ir. Suharto Sondakh	Kabid. Bina Pternakan Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	Ir. H. Muhammad Iqbal, M.Si	Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Bulungan
	Kristiyanto, SP, MT	Kasubbid. Pengemb. Pertanian dan SDA Bappeda Kab. Bulungan

- KEDUA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Delta Kayan Food Estate Sesuai tugas pokok dan fungsi serta Memberikan saran dan pertimbangan serta membuat laporan secara berkala kepada Bupati Bulungan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Bulungan secara berkala;
- KEEMPAT** : Ketentuan dan aturan pelaksanaan Delta Kayan Food Estate lebih lanjut dituangkan dalam bentuk petunjuk maupun petunjuk teknis;

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bulungan (APBD II), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dari pihak swasta yang terlibat didalamnya;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 25 Juli 2012

**BUPATI BULUNGAN,**

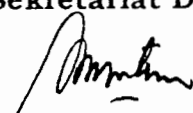
ttd

**BUDIMAN ARIFIN**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Menteri Transmigrasi di Jakarta
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
5. Menteri Perindustrian di Jakarta
6. Menteri Perdagangan di Jakarta
7. Menteri Negara BUMN di Jakarta
8. Kementerian Perikanan dan Kelautan di Jakarta
9. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
10. Ketua DPRD Kalimantan Timur di Samarinda
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian di Jakarta
12. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta
13. Direktur Jenderal P2HP Kementerian Pertanian di Jakarta
14. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di Jakarta
15. Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian di Jakarta
16. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta
18. Direktur Pengelolaan Lahan Ditjen PLA Kementerian Pertanian di Jakarta
19. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
21. Kepala KPPN di Tarakan
22. Yang Bersangkutan

**Salinan Sesuai dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan**

  
**Hj. INDRIYATI, SH., MSi**

**Pembina / IV a**  
**NIP. 196403281995032001**